



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

INSPEKTORAT

Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Telp. 3822463 Fax.3845857
Website : <http://inspektorat.jakarta.go.id> E-mail : Inspektorat@jakarta.go.id
JAKARTA

Kode Pos :10110

Nomor : 244 / PA.01.01
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

26 Januari 2023

Kepada

Yth. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

di
Jakarta

Menindaklanjuti Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor e-0050 TAHUN 2022 tentang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022, dengan ini saya sampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Inspektur Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, ✓


Syaefuloh Hidayat
NIP 197612221998111001

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekda Provinsi DKI Jakarta



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

INSPEKTORAT

Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Telp. 3822463 Fax.3845857
Website : <http://inspektorat.jakarta.go.id> E-mail : Inspektorat@jakarta.go.id
JAKARTA

Kode Pos :10110

Nomor : 244 / PA . 01 . 01
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Inspektorat
Provinsi DKI Jakarta Tahun
2022

26 Januari 2023

Kepada

Yth. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi
DKI Jakarta

di

Jakarta

Menindaklanjuti Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor e-0050 TAHUN 2022 tentang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022, dengan ini saya sampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Inspektur Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Syaefuloh Hidayat
NIP 197612221998111001

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekda Provinsi DKI Jakarta



INSPEKTORAT
PROVINSI DKI JAKARTA

2022

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

INSPEKTORAT PROVINSI DKI JAKARTA



inspektorat@jakarta.go.id



[inspektoratjakarta](https://www.instagram.com/inspektoratjakarta)

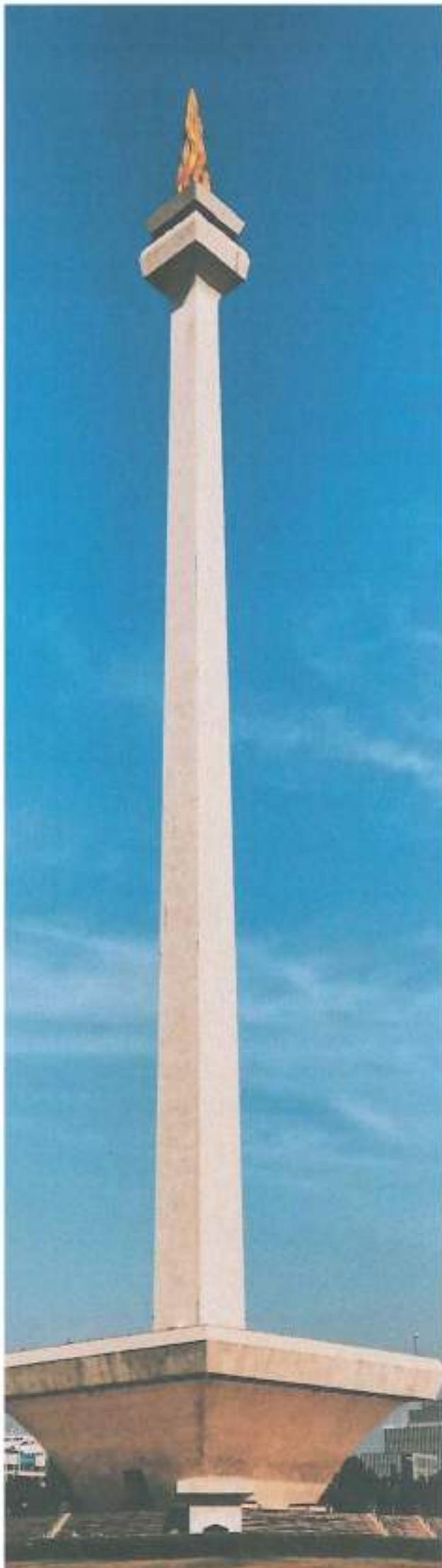


Inspektorat Provinsi DKI Jakarta



Balai Kota DKI Jakarta Blok G Nomor 8-9, Jalan Medan Merdeka Selatan Telp : 3822263 Fax : 3813523
Website : inspektorat.jakarta.go.id
JAKARTA





KATA PENGANTAR

Penyusunan *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)* merupakan bagian dari bentuk pertanggungjawaban Inspektorat Provinsi DKI Jakarta atas pelaksanaan program kegiatan dan penggunaan anggaran sepanjang tahun 2022 dalam mewujudkan visi dan misi Inspektorat.

LKIP merupakan *alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja* di lingkungan Inspektorat dan merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP Inspektorat Tahun 2022 merupakan laporan kelima dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2017-2022 sejalan dengan RPJMD Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 – 2022 dan pelaksanaan Perjanjian Kinerja (Perkin) tahun 2022.

Melalui *visi* "Lembaga Pengawas Internal Terdepan di Lingkungan Pemerintah Daerah", Inspektorat terus melakukan perbaikan atas pembinaan dan pengawasan guna memberikan nilai tambah bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pencapaian terhadap target Renstra dan Perjanjian Kinerja Inspektorat Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2022 terdapat beberapa permasalahan yang mengakibatkan terhambatnya capaian kinerja Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.

Namun demikian Inspektorat dengan menerapkan nilai-nilai Inspektorat yaitu **PROAKTIF**, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya, dengan fokus pada pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dalam rangka mendorong organisasi perangkat daerah mencapai tujuannya melalui pelaksanaan kegiatan audit, reviu, monitoring dan evaluasi, bimbingan teknis, konsultasi, koordinasi dengan stakeholders dan lain-lain.

Kedepan, perbaikan secara terus menerus akan ditingkatkan pada seluruh jajaran Inspektorat dalam melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan kepada seluruh organisasi perangkat daerah yang berada di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Atas diselesaikannya LKIP ini, Inspektur Provinsi DKI Jakarta mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan LKIP dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik sebagai informasi maupun evaluasi terhadap kinerja Inspektorat.

Jakarta, 26 Januari 2023

Inspektur Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Syaefuloh Hidayat
NIP.197612221998111001

Namun demikian Inspektorat dengan menerapkan nilai-nilai Inspektorat yaitu **PROAKTIF**, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya, dengan fokus pada pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dalam rangka mendorong organisasi perangkat daerah mencapai tujuannya melalui pelaksanaan kegiatan audit, reviu, monitoring dan evaluasi, bimbingan teknis, konsultasi, koordinasi dengan stakeholders dan lain-lain.

Kedepan, perbaikan secara terus menerus akan ditingkatkan pada seluruh jajaran Inspektorat dalam melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan kepada seluruh organisasi perangkat daerah yang berada di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Atas diselesaikannya LKIP ini, Inspektur Provinsi DKI Jakarta mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan LKIP dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik sebagai informasi maupun evaluasi terhadap kinerja Inspektorat.

Jakarta, 26 Januari 2023

Inspektur Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Syaefuloh Hidayat
NIP.197612221998111001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT	2
C. KEDUDUKAN PERANGKAT DAERAH	3
D. TUGAS DAN FUNGSI	3
E. STRUKTUR ORGANISASI	4
F. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI	6
G. SUMBER DAYA MANUSIA	7
H. SARANA/PRASARANA	9
I. PERMASALAHAN UMUM	10
J. SISTEMATIKA PENULISAN	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
A. VISI DAN MISI INSPEKTORAT	12
B. PERJANJIAN KINERJA	14
C. TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022	19
B. CAPAIAN SASARAN STRATEGIS INSPEKTORAT TAHUN 2022	22
C. CAPAIAN SASARAN KHUSUS INSPEKTORAT TAHUN 2022	65
D. CAPAIAN SASARAN OPERASIONAL INSPEKTORAT TAHUN 2022	103
E. REALISASI ANGGARAN INSPEKTORAT TAHUN 2022	107
BAB IV PENUTUP	122
A. KESIMPULAN	122
B. STRATEGI MENDATANG	125

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Inspektorat Provinsi DKI Jakarta	6
Gambar 1.2	Aspek Strategis Inspektorat Provinsi DKI Jakarta	6
Gambar 1.3	Jumlah Pegawai Inspektorat	7
Gambar 1.4	Komposisi Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin	8
Gambar 1.5	Komposisi Pegawai berdasarkan Jabatan pada masing-masing Wilayah	8
Gambar 1.6	Komposisi Kinerja berdasarkan Jabatan di Inspektorat	8
Gambar 1.7	Peta Sebaran Gedung Perkantoran Inspektorat	9
Gambar 2.1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	12
Gambar 2.2	Visi dan Misi Inspektorat Provinsi DKI Jakarta	13
Gambar 2.3	Nilai-nilai Inspektorat Provinsi DKI Jakarta	14
Gambar 2.4	Tujuan dan Sasaran Inspektorat Provinsi DKI Jakarta	18



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah dan kondisi barang inventaris	9
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Inspektur Provinsi DKI Jakarta	15
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama (IKU) pada RPJMD Tahun 2017-2022	17
Tabel 3.1	Capaian Perjanjian Kinerja Inspektur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022	20
Tabel 3.2	Target dan Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi DKI Jakarta	23
Tabel 3.3	Target dan Capaian Opini LKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022	28
Tabel 3.4	Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021 oleh Menpan RB secara nasional	35
Tabel 3.5	Target dan Capaian Nilai/predikat AKIP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2021	37
Tabel 3.6	Target dan Capaian Tingkat Maturitas SPIP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022	41
Tabel 3.7	Target dan Capaian Tingkat Kapabilitas APIP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2021	46
Tabel 3.8	Hasil Quality Assurance PK APIP Oleh BPKP	46
Tabel 3.9	Target dan Realisasi Kualitas Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022	49
Tabel 3.10	Target dan Realisasi Kualitas Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022	58
Tabel 3.11	Renaksi dan Realisasi KSD Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022	60
Tabel 3.12	Sasaran Khusus terkait PEN Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022	66
Tabel 3.13	Sasaran Khusus terkait e-Order Inspektorat Provinsi DKI Jakarta	67
Tabel 3.14	Sasaran Khusus terkait Komunikasi Publik Inspektorat Provinsi DKI Jakarta	68
Tabel 3.15	Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022	98
Tabel 3.16	Sasaran Khusus terkait Implementasi SAKIP Inspektorat Provinsi DKI Jakarta	100
Tabel 3.17	Sasaran Khusus terkait e-Office Inspektorat Provinsi DKI Jakarta	102
Tabel 3.18	Sasaran Khusus terkait Produk Hukum Inspektorat Provinsi DKI Jakarta	103
Tabel 3.19	Sasaran Operasional terkait Penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur Inspektorat Provinsi DKI Jakarta	104
Tabel 3.20	Sasaran Operasional terkait Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Inspektorat Provinsi DKI Jakarta	105
Tabel 3.21	Penanganan Pengaduan Masyarakat Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022	105
Tabel 3.22	Sasaran Operasional terkait Penyelesaian TL RHP BPK RI Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022	107

Tabel 3.23	Anggaran dan Realisasi Inspektorat Provinsi DKI Jakarta	107
Tabel 3.24	Perbandingan Anggaran dan Realisasi Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2022	108
Tabel 3.25	Capaian Anggaran Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Berdasarkan Program Tahun 2022	108
Tabel 3.26	Capaian Anggaran dan Realisasi Fisik berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022	109

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 merupakan pertanggungjawaban akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi secara transparan dalam rangka menuju *good governance*. Selain itu, Laporan Kinerja ini juga merupakan wujud dari kinerja dalam pencapaian visi dan misi Gubernur DKI Jakarta tahun 2017-2022, sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022. RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2022.

Dalam rangka mendukung mewujudkan visi RPJMD tersebut, yaitu "Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua", Inspektorat Provinsi DKI Jakarta mempunyai tugas penting membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan



tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, pengelolaan sumber daya daerah, pengelolaan BUMD, pencegahan dan investigasi.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang telah disusun dan ditandatangani pada tanggal 31 Januari 2022, bahwa selama periode tersebut Inspektorat telah melaksanakan seluruh kegiatan sebanyak 3 (tiga) sasaran dan 4 (empat) indikator sasaran.

Perjanjian Kinerja dilakukan oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dan Inspektorat Pembantu Wilayah Kota/Kabupaten. Berikut ringkasan pencapaian dari sasaran dan indikator sasaran dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2022 :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI 2022	CAPAIAN
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	Indeks Reformasi Birokrasi	91	N/A	N/A
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Opini Laporan Keuangan Daerah	3 (WTP)	3 (WTP)	100%
		Nilai / Predikat AKIP	91	N/A	N/A
3	Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Intern Instansi Pemerintah	Tingkat Maturitas SPIP	3,570	3,570	100%
4	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	91%	91,93%	101%
5	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase penyelesaian rencana aksi Meraih Laporan Keuangan Daerah dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) nomor (38)	100%	100%	100%
		Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan predikat AA nomor (39)	100%	100%	100%
		Persentase penyelesaian rencana aksi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) nomor (41)	100%	100%	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI 2022	CAPAIAN
		Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Layanan Pengaduan Masyarakat melalui aplikasi Citizen Relation Management (CRM) nomor (60)	100%	100%	100%
		Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan nomor (61)	100%	100%	100%
		Persentase penyelesaian rencana aksi Perbaikan Pengelolaan Tenaga Non ASN nomor (62)	100%	100%	100%
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi	Persentase penyelesaian rencana aksi implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) nomor (63)	100%	100%	100%
7	Suksesnya Penyerapan Anggaran Pinjaman PEN 2021 dan Ketercapaian Output sesuai KAK	Persentase pelaksanaan penugasan pengawasan atas kegiatan yang dibiayai PEN	100%	100%	100%
8	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemanfaatan E-Order	100%	100%	100%
9	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	100%	100%	100%
10	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022	AA (91)	AA (96,68)	106,24%
11	Peningkatan penggunaan e-Office dalam kegiatan administrasi persuratan	Jumlah Surat atau Nota Dinas masuk kea kun seluruh SKPD yang terproses/terdisposisi	100%	100%	100%
12	Peningkatan penggunaan e-Produk hukum	Jumlah perbal/produk hukum yang dibuat melalui sistem e-perbal	100%	100%	100%
13	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	100%	100%	100%
14	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	100%	100%	100%
15	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut	100%	100%	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI 2022	CAPAIAN
	temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)			

Pada tahun 2022, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Indikator-indikator kinerja yang telah diperjanjikan tersebut telah terealisasi sesuai dengan target, kecuali Indeks Reformasi Birokrasi dan nilai/ predikat AKIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dalam proses penilaian oleh Kementerian PAN dan RB.

Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Tahun 2022 terdapat 3 (tiga) program dengan total anggaran sebesar Rp 145.672.232.941,- dan realisasi anggaran Tahun 2022 sebesar Rp 130.840.143.580,- sehingga capaian penyerapan anggaran sebesar 89,82%.

Berikut merupakan perbandingan capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Provinsi DKI Jakarta pada RPJMD tahun 2018-2022:

Tahun		2018	2019	2020	2021	2022
Opini LKPD	Target	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Realisasi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Capaian	100%	100%	100%	100%	100%
Nilai/ Predikat AKIP	Target	A	A	A	A (81)	AA (91)
	Realisasi	BB (71,04)	BB (73,84)	BB (74,41)	A (80,10)	N/A
	Capaian	87,70%	91,16%	91,86%	98,88%	N/A



BAB I PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Penjelasan mengenai latar belakang dan kewajiban Kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan LKIP setiap akhir tahun anggaran

MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

Penjelasan mengenai maksud, tujuan dan manfaat dari LKIP

KEDUDUKAN PERANGKAT DAERAH

Penjelasan mengenai posisi Inspektorat Provinsi DKI Jakarta

TUGAS DAN FUNGSI

Penjelasan mengenai tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada Inspektorat

STRUKTUR ORGANISASI

Bagan Struktur Organisasi

ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Penjelasan mengenai amanat Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur dalam tugas pembinaan dan pengawasaan

SUMBER DAYA MANUSIA

Penjelasan mengenai SDM yang dimiliki Inspektorat

PERMASALAHAN UMUM

Penjelasan mengenai permasalahan umum sehubungan dengan tugas pembinaan dan pengawasan



A. LATAR BELAKANG

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, rewiu dan evaluasi kinerja. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan (indikator kinerja). Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang

menggambarkan tewujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah. Secara paralel, laporan kinerja tahunan disampaikan bersamaan dengan laporan keuangan.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kepala Perangkat Daerah menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Gubernur/Bupati/Walikota, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Inspektorat Provinsi DKI Jakarta selaku entitas akuntabilitas kinerja satuan kerja berkewajiban melakukan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).



B. MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

Maksud penyusunan LAKIP Inspektorat Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja selaku entitas akuntabilitas kinerja satuan kerja yang menggambarkan pencapaian kinerja dari target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Inspektur Provinsi DKI Jakarta dengan Gubernur DKI Jakarta Tahun 2022. Adapun tujuan penyusunan LAKIP yaitu sebagai :

1. bentuk pertanggungjawaban kinerja Inspektur Provinsi DKI Jakarta yang terukur kepada pemberi mandat (Gubernur DKI Jakarta) atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai
2. memberikan rumusan perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya

Manfaat yang diperoleh disusunnya LAKIP Inspektorat Provinsi DKI Jakarta setidaknya sebagai berikut:

1. Memperoleh gambaran akuntabilitas kinerja Inspektorat Provinsi DKI Jakarta yang telah dicapai selama tahun 2022.
2. Bahan pengambilan kebijakan pimpinan bagi perbaikan kinerja tahun berikutnya



C. KEDUDUKAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 252 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat. Inspektorat merupakan unsur pengawasan internal penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektur bertanggungjawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.



D. TUGAS DAN FUNGSI

Inspektorat mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, pengelolaan sumber daya daerah, pengelolaan BUMD, pencegahan dan investigasi.



Tugas Inspektorat dijabarkan ke dalam fungsi-fungsi yang harus dijalankan oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tercantum dalam sebagai berikut:

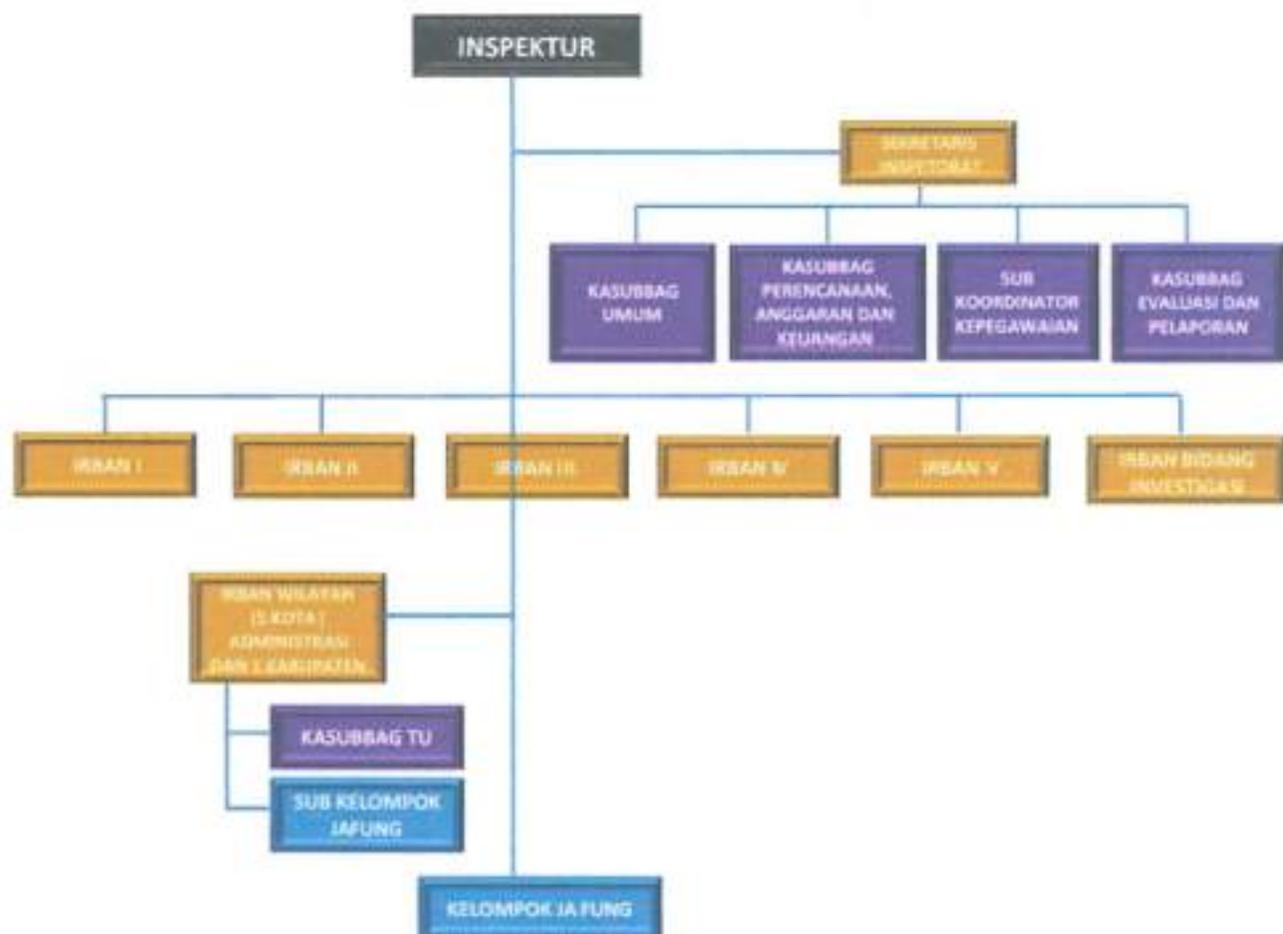
1. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Inspektorat;
2. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Inspektorat;
3. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, pengelolaan sumber daya daerah, pengelolaan BUMD, pencegahan dan investigasi;
4. Pengawasan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah oleh perangkat daerah;
5. Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur;
6. Evaluasi laporan kinerja dan akuntabilitas perangkat daerah;
7. Pengawasan pengelolaan BUMD;

8. Pengawasan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan barang daerah pada perangkat daerah;
9. Pemeriksaan dan pengusutan dugaan adanya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang oleh pegawai;
10. Pelaksanaan tindakan awal sebagai pengamanan dini terhadap dugaan adanya penyimpangan yang dapat merugikan daerah;
11. Fasilitasi dan koordinasi pemeriksaan/pengawasan oleh lembaga pemeriksa keuangan negara dan aparat pengawasan intern pemerintah;
12. Pelaksanaan pengendalian mutu, kegiatan pengawasan (audit, evaluasi, reviu, pemantauan dan pengawasan lain);
13. Koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan lembaga pemeriksa keuangan negara dan oleh aparat pengawasan intern pemerintah dan lembaga pengawasan lainnya;
14. Koordinasi dan kerja sama dengan pihak yang berkompeten dalam rangka menunjang tugas pengawasan;
15. Pemantauan kepatuhan sistem pengendalian internal pemerintah daerah;
16. Pelayanan informasi pengawasan;
17. Pelaporan hasil pengawasan kepada Gubernur;
18. Pelaksanaan tugas khusus pengawasan yang diperintahkan oleh Gubernur;
19. Pelaksanaan pengelolaan unit pengendali gravitasi;
20. Pengelolaan dan pengamanan dokumen pengawasan;
21. Pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Inspektoriat;
22. Pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Inspektoriat;
23. Pengelolaan kearsipan, data dan informasi Inspektoriat; dan
24. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektoriat



E. STUKTUR ORGANISASI

Susunan organisasi Inspektoriat berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 252 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektoriat, sebagai berikut :

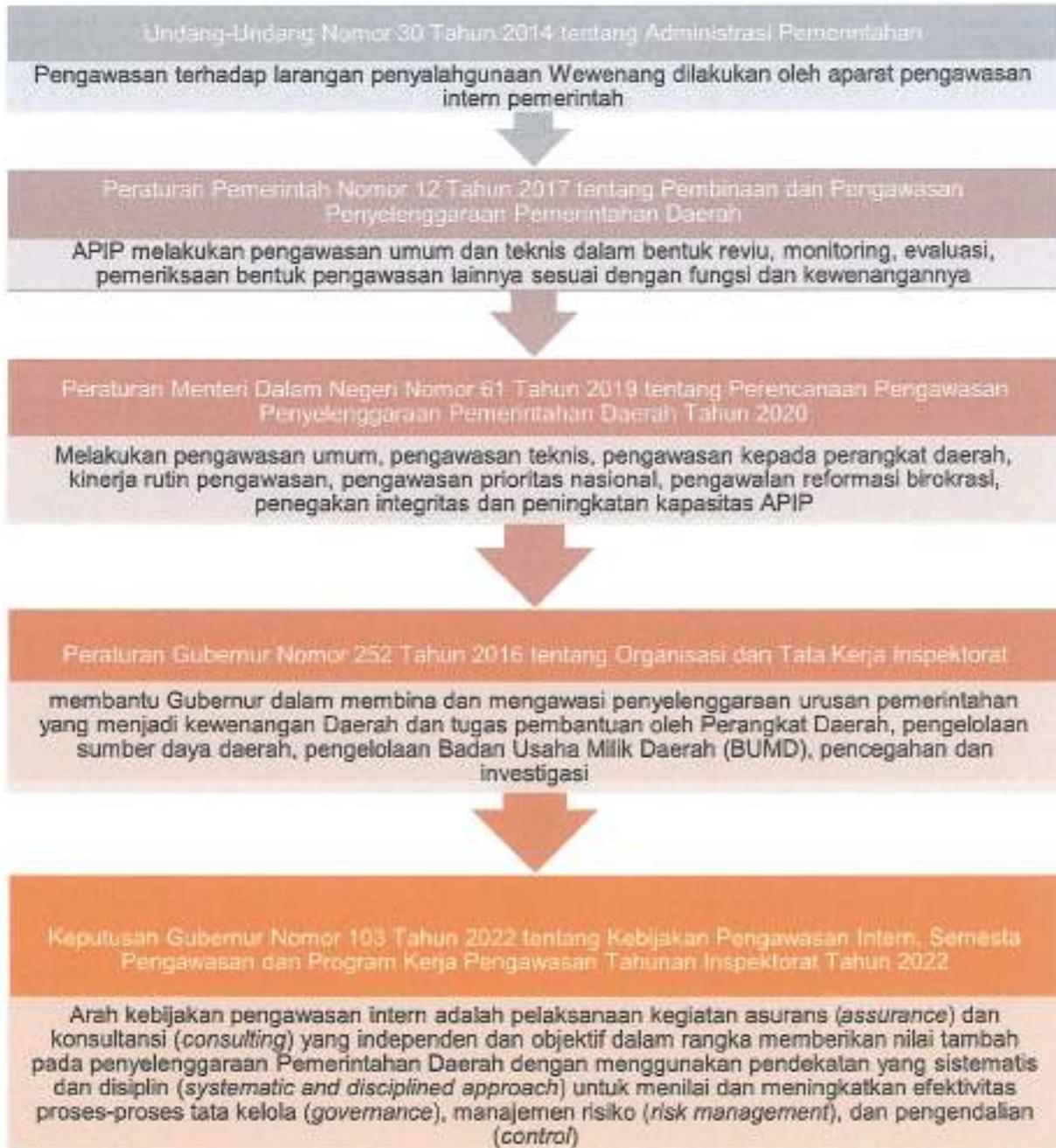


Gambar 1.1 Struktur Organisasi Inspektorat Provinsi DKI Jakarta



F. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Aspek Strategis Inspektorat dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1.2 Aspek Strategis Inspektorat Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 103 Tahun 2022 tentang Kebijakan Pengawasan Intern, Semesta Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Tahun 2022, arah kebijakan pengawasan intern adalah pelaksanaan kegiatan asurans (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*) yang independen dan objektif dalam rangka memberikan nilai tambah pada penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan menggunakan pendekatan yang sistematis dan disiplin

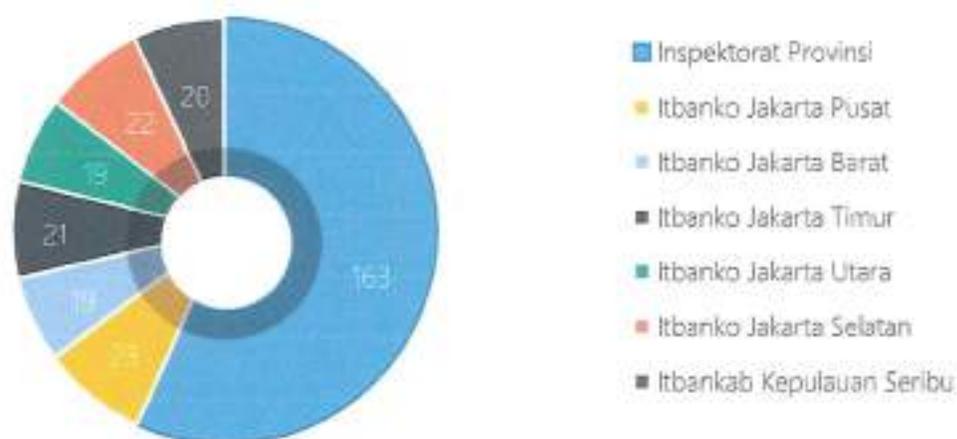
(*systematic and disciplined approach*) untuk menilai dan meningkatkan efektivitas proses-proses tata kelola (*governance*), manajemen risiko (*risk management*), dan pengendalian (*control*), meliputi :

1. pembangunan dan penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang berkelanjutan (*sustainable*) melalui pengembangan dan penerapan model Tiga Lini Pertahanan (*Three Lines of Defense*);
2. pelaksanaan asurans (*assurance*) yang focus pada program dan kegiatan prioritas yang memiliki resiko tinggi;
3. pemberian konsultasi (*consulting*) untuk meningkatkan efektivitas proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian;
4. pelaksanaan pengawasan intern dalam rangka meningkatkan dan memelihara kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; dan
5. peningkatan kapabilitas APIP dengan pendekatan *Internal Audit Capability Model (IACM)*



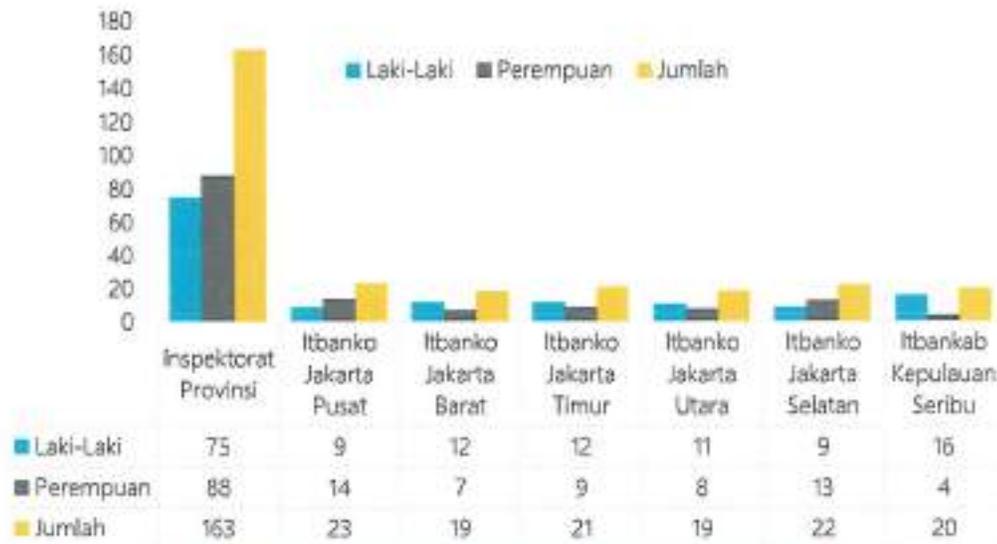
G. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Jumlah pegawai di Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 adalah 287 pegawai dengan sebaran penugasan sebagai berikut:



Gambar 1.3 Jumlah Pegawai Inspektorat

Berdasarkan jenis kelamin hampir seimbang antara laki-laki dan perempuan dengan rincian sebagaimana terlihat pada gambar berikut :



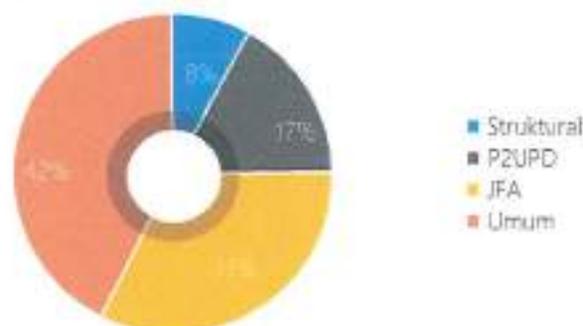
Gambar 1.4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Komposisi Pegawai berdasarkan jabatan Tahun 2022 sebagai berikut:



Gambar 1.5 Komposisi Pegawai berdasarkan Jabatan pada Masing-masing Wilayah

Berdasarkan jabatan didominasi oleh Jabatan Fungsional Umum, diikuti dengan Jabatan Fungsional Auditor, dan Jabatan P2UPD, sehingga jika dipersentasekan jumlah pegawai berdasarkan jabatan dapat dilihat pada chart berikut:



Gambar 1.6 Komposisi Pegawai berdasarkan Jabatan di Inspektorat



H. SARANA/PRASARANA

Inspektorat Provinsi DKI Jakarta menempati 2 lantai di Gedung Balaikota Blok G, lantai 17 dan 18. Inspektorat Pembantu Kota Administrasi menempati gedung di Kantor Walikota masing-masing, namun khusus untuk Inspektorat Pembantu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu menempati gedung di Kantor Bupati dan di Gedung Mitra Praja, Kota Administrasi Jakarta Utara.



Gambar 1. 7 Peta Sebaran Gedung Perkantoran Inspektorat

Barang Inventaris

Rincian barang inventaris yang dimiliki Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat dalam Kartu Inventaris Barang antara lain sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Jumlah dan Kondisi Barang Inventaris

No	Jenis Barang	Provinsi		Itban JP		Itban JS		Itban JB		Itban JU		Itban JT		Itban KS	
		Jml	Kondisi	Jml	Kondisi	Jml	Kondisi	Jml	Kondisi	Jml	Kondisi	Jml	Kondisi	Jml	Kondisi
1	Mobil Dinas	7	Baik	1	Baik	1	Baik	1	Baik	1	Baik	1	Baik	-	-
2	Motor Dinas	7	Baik	2	Baik	1	Baik	0	-	2	Rusak Ringan	0	0	2	Rusak Ringan
3	PC/Komputer	61	Baik	5	Baik	9	Baik	17	Baik	17	Rusak Ringan	13	Baik	17	Rusak Ringan
4	Laptop	156	Baik	10	Baik	31	Rusak Berat	26	Baik	19	Rusak Ringan	28	Baik	24	Rusak Ringan
5	LCD Projector	19	Baik	1	Baik	2	Baik	3	Baik	2	Rusak Ringan	2	Baik	1	Baik
6	Printer	46	Rusak Ringan	7	Baik	11	Rusak Berat	20	Baik	15	Rusak Ringan	12	Baik	6	Rusak Ringan
7	Camera	45	Rusak Ringan	2	Baik	4	Baik	5	Baik	1	Rusak Ringan	3	Baik	2	Rusak Ringan
8	Handy Cam	8	Rusak Ringan	1	Rusak Ringan	1	Baik	2	Baik	1	Rusak Ringan	1	Baik	2	Rusak Ringan



I. PERMASALAHAN UMUM

Di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan, Inspektorat menghadapi permasalahan strategis sebagai dasar didalam pertimbangan arah kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan. Permasalahan strategis dimaksud antara lain :



1. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki 745 perangkat daerah dengan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 77.448.713.889.500 yang harus dilakukan pengawasan oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, namun Inspektorat Provinsi DKI Jakarta tidak memungkinkan seluruh perangkat daerah untuk dilakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan dalam waktu 1 (satu) tahun.
2. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki 23 BUMD dengan tata kelola BUMD belum sesuai yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dari :
 - a. kurangnya regulasi yang ditetapkan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi BUMD;
 - b. kinerja BUMD yang masih rendah yang ditandai dengan masih adanya ketergantungan terhadap penyertaan modal daerah, campur tangan birokrasi yang masih dominan, BUMD belum mampu memberikan kontribusi yang optimal kepada Pendapatan Daerah; dan
 - c. sarana prasarana yang dimiliki dan dikelola oleh BUMD tidak layak.
3. Efektifitas penyelenggaraan SPIP di Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari hasil penilaian mandiri maturitas SPIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat menunjukkan masih kurangnya pemahaman perangkat daerah dalam mengimplementasikan SPIP dan tingkat kematangan SPIP yang masih rendah. Ukuran tingkat kematangan SPIP meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

4. Tingkat kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2017-2021 menunjukkan level 2 dari target level 3. Hal ini dapat dilihat dari beberapa elemen yaitu:
 - a. Elemen pengelolaan SDM (kurangnya peningkatan kompetensi auditor dan PPUPD)
 - b. Elemen praktik profesional (perencanaan kegiatan pengawasan belum sepenuhnya berbasis risiko)
 - c. Elemen peran dan layanan (pelaksanaan kegiatan audit belum berkualitas dan belum dirasakan manfaatnya secara nyata oleh perangkat daerah)
5. Formasi Jabatan Fungsional pada Inspektorat bahwa kebutuhan formasi pada Inspektorat seharusnya adalah berjumlah 283 orang untuk jabatan fungsional tertentu, sedangkan kondisi per 30 Desember 2022 hanya terdapat 143 jabatan fungsional tertentu, sehingga masih dibutuhkan sekitar 140 pegawai dengan jabatan fungsional tertentu;



J. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Bab I penjelasan yang terdiri dari sub bab Latar Belakang; Maksud, Tujuan dan Manfaat; Kedudukan Perangkat Daerah; Tugas dan Fungsi; Struktur Organisasi; Aspek Strategis Organisasi; Sumber Daya Manusia; Sarana/Prasarana; Permasalahan Umum; dan Sistematika Penulisan.

BAB II PERJANJIAN KINERJA

Bab II penjelasan yang terdiri dari sub bab visi dan misi; perjanjian kinerja; dan tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab II penjelasan yang terdiri dari sub bab capaian kinerja berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2022; capaian sasaran strategis Inspektorat Provinsi DKI Jakarta 2022; capaian sasaran khusus Inspektorat Provinsi DKI Jakarta 2022; capaian sasaran operasional Inspektorat Provinsi DKI Jakarta 2022; dan Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

Bab IV penjelasan yang terdiri dari sub bab kesimpulan dan strategi mendatang.



PENANDATANGANAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Inspektorat Provinsi DKI Jakarta melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kinerja sebagai komitmen bersama dan pedoman dalam melaksanakan tugas, yang dipimpin langsung oleh Inspektur

Jakarta, 11 April 2022



BAB II PERENCANAAN KINERJA

VISI DAN MISI INSPEKTORAT

Penjelasan mengenai visi, misi, penjabaran misi dan perjanjian kinerja Inspektorat

PERJANJIAN KINERJA

Penjelasan mengenai sasaran strategis, sasaran khusus, dan sasaran operasional Inspektur Provinsi DKI Jakarta

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Penjelasan mengenai tujuan dan sasaran RPJMD dan penjabaran ke tujuan dan sasaran Inspektorat



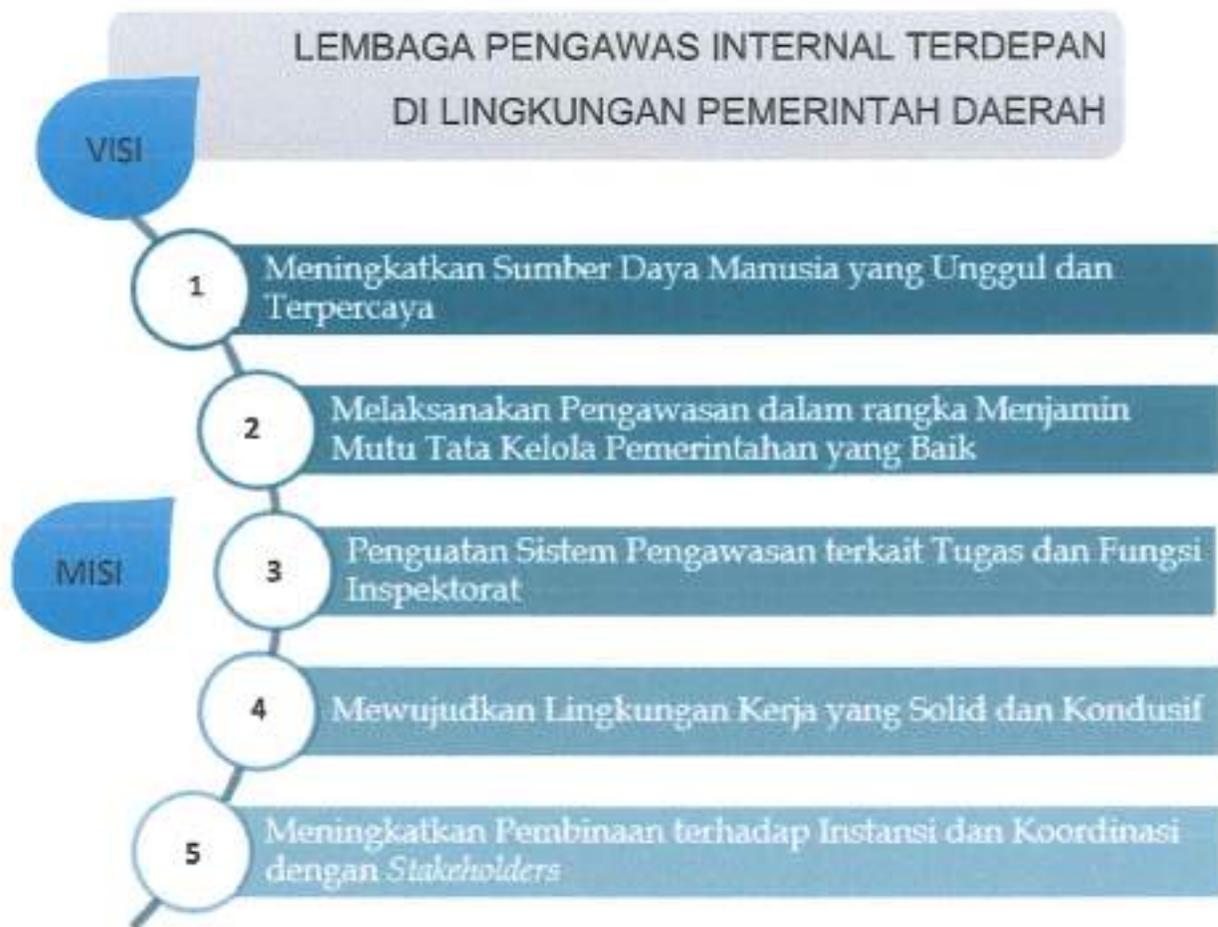
A. VISI DAN MISI

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 menjelaskan visi dan misi Gubernur DKI Jakarta dan penjabaran visi dan misi yang diwujudkan dalam tujuan dan sasaran RPJMD. Sebagai salah perangkat daerah, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta menjabarkan tujuan dan sasaran RPJMD dimaksud kedalam Rencana Strategis Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022. Adapun visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD

Didalam rencana strategis Inspektorat Provinsi DKI Jakarta ditetapkan Visi, Misi dan Nilai-Nilai Inspektorat. Visi Inspektorat dilatarbelakangi oleh keinginan Inspektorat untuk menjadi lembaga pengawas internal pemerintah terdepan dan terbaik dari seluruh pengawas internal pemerintah daerah dan dapat dijadikan *best practice*.

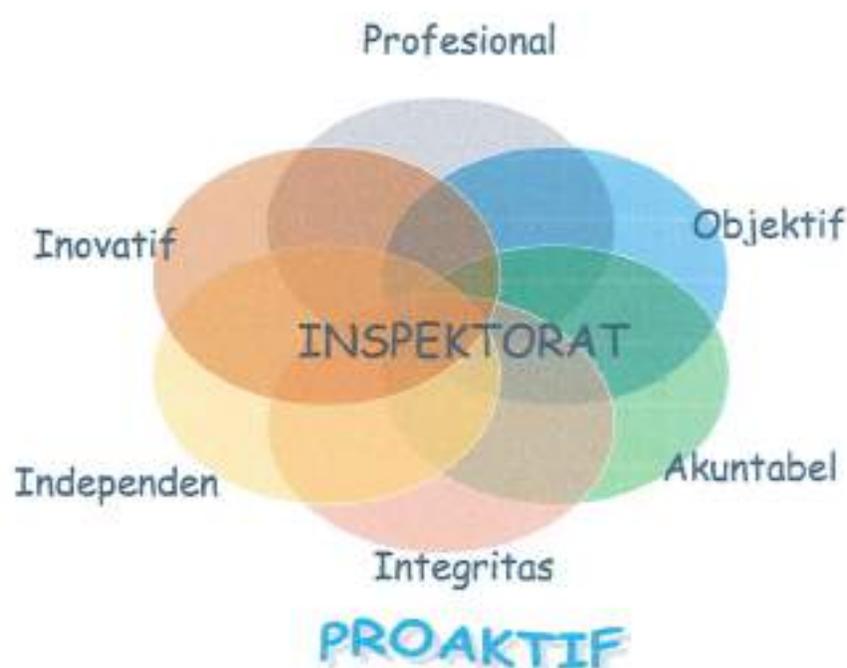


Gambar 2.2 Visi dan Misi Inspektorat Provinsi DKI Jakarta

Penjelasan Misi Inspektorat:



1. Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk mewujudkan budaya kerja yang dapat membuat Inspektorat menjadi yang terbaik dan unggul;
2. Peningkatan kualitas dan kinerja pembinaan serta pengawasan;
3. Meningkatkan Produktivitas dan integritas aparatur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan;
4. Meningkatkan rasa kebersamaan dan rasa memiliki organisasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang baik dan nyaman;
5. Menumbuhkan kepercayaan Organisasi Perangkat Daerah kepada Inspektorat



Gambar 2.3 Nilai-nilai Inspektorat Provinsi DKI Jakarta

Nilai-nilai Inspektorat:

1. Profesional:
Keahlian yang memiliki kompetensi berdasarkan norma dan standar
2. Objektif:
Menilai suatu kondisi berdasarkan fakta dan diyakini kebenarannya
3. Akuntabel:
Tindakan dan keputusan yang harus dapat dipertanggungjawabkan
4. Integritas:
Pikiran, ucapan dan tindakan yang baik dan benar
5. Independen:
Tidak berpihak dan bebas dari pengaruh kepentingan siapapun
6. Inovatif:
Kemampuan berfikir untuk menciptakan perubahan yang lebih baik

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi

dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Informasi Perjanjian Kinerja, Program dan Anggaran tahun 2022 disajikan pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2. 1 Perjanjian Kinerja Inspektur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
Sasaran Strategis				
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	Indeks Reformasi Birokrasi	91	Indeks
2	Terwujudnya tata kelola yang taktis dan adaptif berbasis data, serta model organisasi pemerintahan yang dinamis	Opini Laporan Keuangan Daerah	WTP	Predikat
		Nilai / Predikat AKIP	AA (91)	Predikat
3	Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Intern Instansi Pemerintah	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	3.570	Level
4	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	91%	Persen
5	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase penyelesaian rencana aksi Meraih Laporan Keuangan Daerah dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) nomor (38)	100%	Persen
		Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan predikat AA nomor (39)	100%	Persen
		Persentase penyelesaian rencana aksi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) nomor (41)	100%	Persen
		Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Layanan Pengaduan Masyarakat melalui aplikasi Citizen Relation Management (CRM) nomor (60)	100%	Persen

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
		Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan nomor (61)	100%	Persen
		Persentase penyelesaian rencana aksi Perbaikan Pengelolaan Tenaga Non ASN nomor (62)	100%	Persen
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi	Persentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) nomor (63)	100%	Persen
Sasaran Khusus				
7	Suksesnya Penyerapan Anggaran Pinjaman PEN 2021 dan Ketercapaian output sesuai KAK	Persentase pelaksanaan penugasan pengawasan atas kegiatan yang dibiayai PEN	100%	Persen
8	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam pengadaan barang dan jasa	Persentase Pemanfaatan E-Order	100%	Persen
9	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan perangkat daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	100%	Persen
10	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022	AA (91)	Predikat
11	Peningkatan penggunaan e-Office dalam kegiatan administrasi persuratan	Jumlah Surat atau Nota Dinas masuk kea kun seluruh SKPD yang terproses/terdisposisi	100%	Persen
12	Peningkatan penggunaan e-Produk hukum	Jumlah perbal/produk hokum yang dibuat melalui sistem e-perbal	100%	Persen
Sasaran Operasional				
13	Terselesaikannya tindak lanjut arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian tindak lanjut arahan Gubernur	100%	Persen
14	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	100%	Persen

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
15	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100%	Persen



C. TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja Utama pada RPJMD Tahun 2017-2022 dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah. Penetapan Indikator Kinerja Utama terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017-2022 diuraikan pada tabel berikut ini dimana Inspektorat menjadi bagian dalam tercapainya visi misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) pada RPJMD Tahun 2017-2022

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Tahunan					Kondisi Akhir
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	Nilai/Predikat AKIP	Predikat	B	A	A	A	A	AA (91)	AA
2	Opini Laporan Keuangan Daerah	Predikat	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017 – 2022, salah satu tujuan pada salah satu misi di RPJMD diturunkan menjadi tujuan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta sehingga dapat terlihat hubungan kualitasnya. Dibawah ini adalah tujuan dan sasaran beserta indikatornya pada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, yang selanjutnya diwujudkan dengan program-program dan kegiatan-kegiatan:

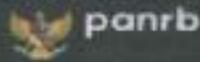


Gambar 2.4 Tujuan dan Sasaran Inspektorat Provinsi DKI Jakarta



SAKIP & RB AWARD 2021

VE] SAKIP & RB AWARD 2021



SAKIP & RB
AWARD 2021

SYNERGI TOGETHER | CHANGE FOR BETTER

BerAKHLAK



Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Meraih Predikat A dalam Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi [SAKIP] Tahun 2021



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Penjelasan mengenai gambaran umum target dan realisasi perjanjian kinerja Inspektur Provinsi DKI Jakarta

CAPAIAN SASARAN STRATEGIS INSPEKTORAT TAHUN 2022

Penjelasan mengenai 6 (enam) indikator kinerja yaitu indeks reformasi birokrasi, opini WTP LKPD, Predikat AKIP, Tingkat Maturitas SPIP, Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran, dan Kebijakan Strategis Daerah

REALISASI ANGGARAN

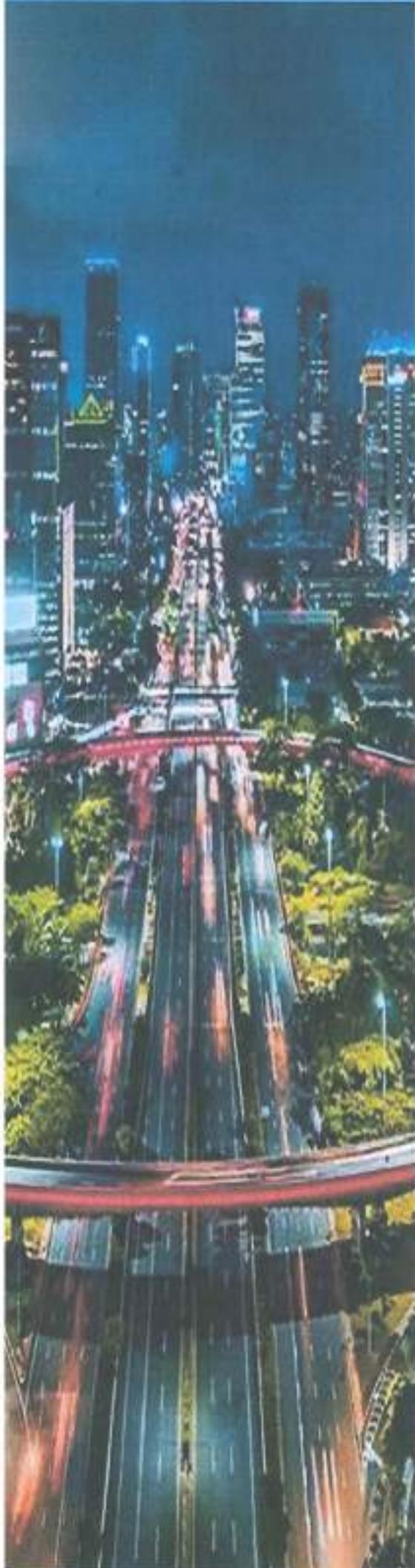
Penjelasan mengenai realisasi anggaran dan fisik per masing-masing Inspektorat (Provinsi dan Wilayah), pendekatan program, dan realisasi anggaran dan fisik per sub kegiatan

CAPAIAN SASARAN KHUSUS INSPEKTORAT TAHUN 2022

Penjelasan mengenai 6 (enam) indikator kinerja yaitu Pelaksanaan Penugasan Pengawasan atas kegiatan yang dibiayai PEN, Pemanfaatan E Order, Implementasi renstra komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemprov DKI Jakarta, Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022, Peningkatan penggunaan e-office dalam kegiatan administrasi persuratan, peningkatan penggunaan e-produk hukum,

CAPAIAN SASARAN OPERASIONAL INSPEKTORAT TAHUN 2022

Penjelasan mengenai 3 (tiga) indikator kinerja yaitu penyelesaian tindak lanjut arahan Gubernur, penyelesaian pengaduan masyarakat, dan progress penyelesaian TL RHP BPK RI



A. CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Akuntabilitas Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja merupakan perwujudan dari pencapaian kinerja secara menyeluruh dari Inspektorat Provinsi DKI Jakarta. Pencapaian kinerja menunjukkan kontribusi dari seluruh jajaran Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dan kegiatan selama tahun 2022.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 antara Gubernur Provinsi DKI Jakarta dengan Inspektur Provinsi DKI Jakarta, ditetapkan *3 (tiga) jenis sasaran yaitu:*

1. Sasaran Strategis
2. Sasaran Khusus
3. Sasaran Operasional

Secara umum terdapat banyak keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2022 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1 Capaian Perjanjian Kinerja Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI TAHUN 2022	CAPAIAN
Sasaran Strategis					
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	Indeks Reformasi Birokrasi	91	N/A	N/A
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Opini Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	100%
		Nilai / Predikat AKIP	91	N/A	N/A
3	Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Intern Instansi Pemerintah	Tingkat Maturitas SPIP	3,570	3,570	100%
4	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	91%	91,93%	101,02%
5	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase penyelesaian rencana aksi Meraih Laporan Keuangan Daerah dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) nomor (38)	100%	100%	100%
		Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan predikat AA nomor (39)	100%	100%	100%
		Persentase penyelesaian rencana aksi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) nomor (41)	100%	100%	100%
		Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Layanan Pengaduan Masyarakat melalui aplikasi <i>Citizen Relation Management</i> (CRM) nomor (60)	100%	100%	100%
		Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan nomor (61)	100%	100%	100%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI TAHUN 2022	CAPAIAN
		Persentase penyelesaian rencana aksi Perbaikan Pengelolaan Tenaga Non ASN nomor (62)	100%	100%	100%
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi	Persentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Nomor (63)	100%	100%	100%
Sasaran Khusus					
7	Suksesnya Penyerapan Anggaran Pinjaman PEN 2021 dan Ketercapaian output sesuai KAK	Persentase pelaksanaan penugasan pengawasan atas kegiatan yang dibiayai PEN	100%	100%	100%
8	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam pengadaan barang dan jasa	Persentase Pemanfaatan E-Order	100%	100%	100%
9	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan perangkat daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	100%	100%	100%
10	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022	AA (91)	AA (96,68)	106,24%
11	Peningkatan penggunaan e-Office dalam kegiatan administrasi persuratan	Jumlah Surat atau Nota Dinas masuk kea kun seluruh SKPD yang terproses/terdisposisi	100%	100%	100%
12	Peningkatan penggunaan e-Produk hukum	Jumlah perbal/produk hukum yang dibuat melalui sistem e-perbal	100%	100%	100%
Sasaran Operasional					
13	Terselesaikannya tindak lanjut arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian tindak lanjut arahan Gubernur	100%	100%	100%
14	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	100%	100%	100%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI TAHUN 2022	CAPAIAN
15	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100%	100%	100%

B. CAPAIAN SASARAN STRATEGIS TAHUN 2022

1

INDIKATOR KINERJA 1

Indeks Reformasi Birokrasi

Target : AA (91)

Realisasi : N/A

Capaian : N/A

Reformasi birokrasi diartikan sebagai upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*). Berdasarkan Pasal 5 dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dimana Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah diamanatkan untuk melakukan penilaian mandiri (*self assessment*) dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip *Total Quality Management* dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan Permenpanrb Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi maka Indeks Reformasi Birokrasi adalah nilai akhir dari serangkaian kegiatan evaluasi atau penilaian 8 (delapan) area, yaitu:

1. Manajemen Perubahan
2. Deregulasi Kebijakan
3. Penataan dan Penguatan Organisasi
4. Penataan Tatalaksana
5. Penataan Sistem Manajemen SDM
6. Penguatan Akuntabilitas
7. Penguatan pengawasan
8. Peningkatan kualitas pelayanan publik.



Hasil Pelaksanaan Evaluasi Penilaian Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Kemenpanrb menunjukkan peningkatan, meskipun masih jauh dari target yang ditetapkan. Indeks Reformasi Birokrasi Pemprov DKI Jakarta secara berturut-turut, yaitu:

2017	2018	2019	2020	2021
63,75	70,92	74,57	76,54	78,88

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) juga dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Tahun 2022. Namun, hasil Evaluasi Eksternal Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi belum diperoleh sampai dengan tanggal penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini sehingga realisasi atas indikator ini masih diisi dengan keterangan N/A. Berikut capaian indeks reformasi birokrasi Provinsi DKI Jakarta :

Tabel 3.2 Target dan Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022

Tahun		2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Reformasi Birokrasi	Target	68	73	78	85	91
	Realisasi	70.92	74.57	74.41 (BB)	78.88 (BB)	N/A
	Capaian	104.29%	102.15%	95.40%	94.80%	N/A

Beberapa upaya dilakukan oleh Inspektorat dalam mendorong pencapaian target Indeks Reformasi Birokrasi antara lain :

1. Peran ke eksternal

- a. Berperan aktif didalam proses penyusunan dan penetapan Peraturan Gubernur Nomor 58 tahun 2021 tentang Road map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 dengan prioritas SDM Aparatur Pemerintah Daerah, Peraturan Perundang-Undangan dan Mental Aparatur;
- b. Berperan aktif dalam kegiatan sosialisasi pelaksanaan kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang diselenggarakan bersama dengan Biro Organisasi Reformasi Birokrasi dengan peserta seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- c. Melakukan pendampingan dan evaluasi atas pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah dilakukan terhadap 42 (empat puluh dua) Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan nilai rata-rata hasil evaluasi atas PMPRB Tahun 2022 adalah 34,40 atau 94,79%.

2. Peran internal selaku Perangkat Daerah

- a. Dalam hal deregulasi kebijakan, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Berperan aktif didalam proses penyusunan dan penetapan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Peraturan Gubernur ini merupakan bentuk penyederhanaan regulasi terkait organisasi dan tata kerja yang tadinya merupakan Peraturan Gubernur tersendiri untuk masing-masing Perangkat Daerah, sekarang ini disederhanakan menjadi satu Peraturan Gubernur sebagaimana tersebut di atas;
- b. Dalam hal pemehunan unsur penataan dan penguatan organisasi, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta juga mengalami perubahan. Perubahan perbaikan tersebut dapat dilihat dari struktur organisasi untuk Sub Bagian Kepegawaian berubah menjadi Sub Koordinator Kepegawaian. Selain itu juga adanya penambahan fungsi informasi dan komunikasi pada fungsi Sub Bagian Umum dibawah Sekretariat;
- c. Dalam hal pemenuhan unsur Penataan Sistem Manajemen SDM, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta melaksanakan Penyederhanaan birokrasi dengan penyetaraan jabatan administrasi menjadi jabatan fungsional dan telah dilakukan pelantikan pada tanggal 28 Desember 2021. Selain itu, Perencanaan, Pengukuran dan Pencapaian Kinerja Pegawai dilaksanakan dengan mempertimbangkan prinsip pembagian pekerjaan secara berjenjang (*cascading*) dari Indikator Renstra pada dokumen Perjanjian Kinerja. Target kinerja dalam Dokumen Perjanjian Kinerja menjadi target kinerja pegawai dalam capaian SKP dan SKP menjadi komponen perhitungan penerimaan TPP pegawai;
- d. Dalam hal pemenuhan unsur Penguatan Akuntabilitas, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta terus memberikan informasi akuntabilitas kinerja melalui sistem informasi yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu e SAKIP yang juga dilakukan penilaian SAKIP oleh APIP dan evaluasi AKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- e. Dalam hal pemenuhan unsur penguatan pengawasan, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta terus bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta dalam rangka kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan Kapabilitas APIP dalam wujud bimbingan teknis, penilaian mandiri kapabilitas APIP dan kegiatan lainnya yang bertujuan meningkatkan peran dan kualitas pembinaan dan pengawasan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.

- f. Dalam hal pemenuhan unsur penguatan kualitas layanan publik, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta mengoptimalkan perbaikan berkelanjutan sistem pengawasan dan pengendalian APIP sebagai *quality Assurance and Consulting*. Perbaikan dan pengembangan sistem pengawasan terpadu seperti : Cetak Gol, SiPERISAI, Cepat Respon Masyarakat (CRM), SIPADU, E-KLINIK, E-DUMAS, SIMANTAB, SIMANTUL, *Fraud Control Planning* (FCP) bekerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, dan *Monitoring Control for Prevention* (MCP) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),

Aspek Penguatan Pengawasan :

- 1) Gratifikasi : telah dilakukan implementasi dan publikasi cetakgol.jakarta.go.id guna pelaporan gratifikasi;
- 2) Penerapan Manajemen Risiko : telah dilakukan sosialisasi dan bimtek serta penerapan manajemen risiko melalui Siperisai pada OPD;
- 3) Pengaduan Masyarakat : seluruh pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti dan dievaluasi;
- 4) *Whistle Blowing System* : telah dilakukan sosialisasi tentang SiPadu;



- 5) E-KLINIK, merupakan sistem informasi yang digunakan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang akan melakukan konsultasi atas pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan di tahun berjalan;



6) SIMANTAB, merupakan sistem informasi yang terkait dengan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI. Sistem ini secara *realtime* dapat menunjukkan data dan informasi progress penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI



7) SIMANTUL, merupakan sistem informasi yang terkait dengan Pemantuan Tindak Lanjut Pemeriksaan yang dilakukan oleh APIP, baik Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga maupun oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta sendiri. Sistem ini secara *realtime* dapat menunjukkan data dan informasi progress penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.



Hasil evaluasi penilaian Reformasi Birokrasi tahun 2021 dari Menpan RB, bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada area pemenuhan dan reform serta diikuti dengan peningkatan nilai pada komponen hasil, sehingga Indeks Reformasi Birokrasi di Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 adalah 78,88 dengan kategori "BB"

Hasil Evaluasi PMPRB oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Berdasarkan Surat Inspektur Provinsi DKI Jakarta kepada Pj. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1506/PA.02.02 tanggal 11 Juli 2022 perihal Hasil Evaluasi atas PMPRB Tahun 2022 menyampaikan saran kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah agar:

1. Menyusun dokumen rencana kerja Tim Reformasi Birokrasi sekaligus mensosialisasikan kepada seluruh jajarannya;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja tim reformasi birokrasi serta tindaklanjutnya secara berkala dan melaporkannya kepada Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

3. Melakukan pembentukan agent of change/role model yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Melakukan harmonisasi kebijakan yang ada terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Membuat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terintegrasi, Implementasi SPBE, menyusun proses bisnis serta membuat SOP pelayanan dan kebijakan pemberian penghargaan serta sanksi atas pemberian pelayanan sehingga dapat mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat, efisien dan terintegrasi;
6. Melakukan identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi SDM;
7. Menerapkan pelaksanaan penanganan gratifikasi serta melakukan tindak lanjut serta evaluasi penanganan gratifikasi;
8. Menyusun peta proses bisnis;
9. Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dan mempublikasikan hasil survei kepuasan masyarakat;
10. Menerapkan SPIP secara keseluruhan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; dan
11. Melakukan evaluasi terkait penanganan benturan kepentingan dan melakukan tindak lanjut atas hasil evaluasi tersebut.

2.1

INDIKATOR KINERJA 2.1

Opini Laporan Keuangan

Target : WTP

Realisasi : WTP

Capaian : 100%

Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel sudah merupakan suatu keharusan, berbagai upaya telah dilakukan antara lain dengan tujuan diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan opini publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan SAP dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas

dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Laporan Keuangan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam penyusunan LKIP Tahun 2022 data yang digunakan dari hasil audit BPK atas LKPD Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021, karena sesuai ketentuan, hasil audit BPK baru akan diterima awal bulan Juni atau 2 (dua) bulan setelah LKPD diserahkan ke BPK dan hasilnya akan dilaporkan dalam Raperda Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (LP2APBD).

Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 seperti yang tertuang dalam Laporan Nomor 119/-1.924/MON.III/3.2022 tanggal 4 Maret 2022, bahwa LKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 telah disajikan secara wajar (WTP), dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanggal 31 Desember 2021, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun terakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Berdasarkan laporan hasil audit BPK atas LKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut, bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meraih Opini LKPD Tahun 2021 “Wajar Tanpa Pengecualian”, sehingga target dari indikator kinerja untuk Opini LKPD telah tercapai 100%. Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam 5 (lima) tahun ini meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian atau selama periode RPJMD 2017 – 2022 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih meraih WTP, berikut capaian Opini LKPD Wajar Tanpa Pengecualian :

Tabel 3.3 Target dan Capaian Opini LKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2021

LKPD Tahun		2017	2018	2019	2020	2021
Opini LKPD	Target	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Realisasi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Capaian	100%	100%	100%	100%	100%

Hasil Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat dicapai dengan komitmen pimpinan dari tingkat Gubernur sampai dengan pelaksana teknis, adanya konsistensi tindak lanjut yang berkelanjutan serta berbagai upaya yang dilakukan, terutama upaya yang telah dilakukan Inspektorat antara lain :

1. Memfasilitasi penyusunan Instruksi Gubernur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021 dan Rencana Aksi Dalam Rangka Mempertahankan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian;
2. Melakukan kegiatan Reviu LKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021;
3. Melakukan kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Eksternal.

Pada 2022, BPK RI telah memeriksa 541 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021 dari 541 Pemda. Dari 541 Pemda, sebanyak 500 Pemda memperoleh opini WTP (92,4%), 38 Pemda memperoleh opini WDP (7%) dan 3 (tiga) Pemda memperoleh opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) (0,6%) dan sebanyak 41 LKPD belum memperoleh opini

Reviu LKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021

Reviu dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual. Reviu terutama mencakup penelusuran angka, permintaan keterangan kepada pejabat entitas pelaporan/pejabat pengelola keuangan daerah dan prosedur analitis yang diterapkan atas data keuangan. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan.



Tujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan terbatas laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Sedangkan sasaran reviu adalah memperoleh keyakinan bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) dan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah telah disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Ruang lingkup reviu LKPD tahun 2021 meliputi penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LKPD termasuk penelaahan atas catatan akuntansi dan dokumen sumber yang diperlukan. Dari 740 entitas akuntansi berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1292 Tahun 2020 tentang Entitas Akuntansi dan Entitas Akuntansi Penggabungan Tahun 2020, reviu dilakukan secara sampling pada 43 (empat

puluh tiga) SKPD penggabung laporan keuangan dan 1 (satu) entitas pelaporan. Sasaran revidi adalah LKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021, Laporan Keuangan SKPD/UKPD dan Laporan Keuangan BLUD yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Berdasarkan revidi LKPD, Inspektorat memberikan saran sebagai berikut:

1. Para PD/UKPD dan BUMD penerima dana PEN daerah Tahun 2021 untuk melakukan percepatan dan optimalisasi pelaksanaan pekerjaan yang dananya dibiayai oleh Program PEN sampai dengan batas waktu pelaksanaan yaitu tanggal 30 Juni 2022;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) agar:
 - a. melakukan koordinasi secara intensif dengan DJPK Kementerian Keuangan RI untuk memastikan sisa dana PEN TA 2021 tersebut dapat digunakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - b. berkoordinasi dengan Biro KSD untuk mendorong Pemda Kabupaten/Kota Penerima Belanja Bantuan Keuangan tersebut agar segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan;
 - c. melakukan sosialisasi tentang ketentuan dan pengelompokan kode rekening belanja;
 - d. berkoordinasi dengan Biro KSD untuk mendorong Pemda Kabupaten/Kota Penerima Belanja Bantuan Keuangan tersebut agar segera menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan;
 - e. melakukan proses penetapan terhadap rekening BUD yang belum ditetapkan dalam SK Gubernur;
 - f. melakukan pengungkapan di CaLK terhadap saldo kas yang ada di rekening escrow penerimaan maupun pengeluaran Pemprov DKI Jakarta;
 - g. berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan untuk dapat melakukan percepatan proses verifikasi rekening tersebut sebelum ditetapkan dalam SK Gubernur;
 - h. berkoordinasi dengan Kepala BPAD untuk segera melakukan pengesahan melalui SPSB atas penerimaan hibah dalam bentuk barang sesuai dengan ketentuan;
 - i. mempercepat proses revisi Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi yang telah mengatur metode dan penetapan umur amortisasi ATB selain software serta penyesuaian perubahan peraturan pengelolaan keuangan daerah;

- j. menyusun ketentuan mengenai mekanisme penatausahaan penyelesaian kerugian daerah yang terkait dengan pihak ketiga (non ASN);
 - k. berkoordinasi dengan BPAD dan Inspektorat untuk melakukan percepatan penyelesaian rekonsiliasi kerugian daerah yang belum ditetapkan statusnya, yang terkait dengan kerugian belanja modal dengan pencatatan asetnya;
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah agar:
 - a. Menyusun peraturan/ketentuan terkait pemutakhiran piutang pajak selain PBB-P2;
 - b. Melakukan percepatan penyelesaian pemutakhiran data piutang selain PBB-P2;
 4. Kepala Badan Pendapatan Daerah, Kepala Dinas Perhubungan dan Kepala BPKD agar:
 - a. Berkoodinasi dalam melakukan percepatan penyelesaian evaluasi kebijakan penyajian piutang retribusi pemakaian mobil derek;
 - b. Berkoordinasi secara intensif dengan PUPN, untuk penyelesaian penetapan atas 2 (dua) debitur piutang yang telah diserahkan pengurusannya ke PUPN.
 5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman untuk:
 - a. Melakukan sensus atas penghuni rusun untuk penegakan aturan dan memperbaiki database;
 - b. Mengembangkan sistem informasi penatausahaan dan pencatatan piutang rusunami;
 6. Kepala Dinas PPAPP untuk berkoordinasi dengan instansi terkait untuk merumuskan tindak lanjut penyelesaian hasil identifikasi dana bergulir PPMK yang telah dilakukan.
 7. Kepala Badan Pembina BUMD agar mengkoordinasikan para Perusahaan yang nilai penyertaan modalnya menggunakan metode ekuitas untuk segera menyelesaikan Laporan Keuangan Audited Perusahaan dan menyampaikannya kepada BPKD.
 8. Kepala BPAD agar :
 - a. Melakukan monitoring aktif secara periodik atas PKS yang telah habis masa jangka waktu pemanfaatannya namun masih digunakan oleh Pihak Ketiga;
 - b. Melakukan perpanjangan dan/atau pemanfaatan kembali aset kerja sama sesuai dengan ketentuan;
 - c. Melakukan upaya penagihan aktif terhadap piutang sewa yang belum tertagih;
 - d. Menyelesaikan revisi Berita Acara Serah Terima (BAST) atas pemenuhan kompensasi pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) PT Sampoerna Land;
 - e. Membuat rencana aksi percepatan penyelesaian Aset dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset (MPSBMD);

- f. Melaporkan secara periodik kepada Pengelola Barang atas progress penyelesaian MPSBMD;
 - g. Bersama dengan Biro Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk membahas lebih lanjut ketentuan yang digunakan terkait jangka waktu pensertifikatan aset fasos dan fasum;
 - h. Meningkatkan pengendalian administrasi, terutama terkait fasilitasi proses pensertifikatan untuk tanah-tanah yang diserahkan namun belum bersertifikat dan/atau sertifikatnya belum atas nama Pemprov DKI Jakarta dengan biaya dari pemegang izin dan/atau non izin pemanfaatan ruang, sesuai dengan Pasal 27 ayat (3) huruf c Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2020;
 - i. Memastikan penyelesaian proses penerbitan SK Penggunaan atas Aset Fasos Fasum yang telah ditransfer kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah;
 - j. Berkoordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah terkait untuk mempercepat penyelesaian koreksi atas Aset Belum Ditetapkan Statusnya (ABDS) dimaksud sesuai dengan ketentuan.
9. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah untuk memastikan kembali kelayakan anggaran utang belanja pada setiap Perangkat Daerah per 31 Desember 2021 dan 2020 yang selanjutnya dikoordinasikan dengan BPKD dan Bapenda untuk dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran berikutnya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Eksternal

Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan eksternal dilakukan untuk mendukung capaian dari indikator kinerja Opini Wajar Tanpa Pengecualian, dengan mendorong penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI oleh Perangkat Daerah. Untuk meningkatkan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan eksternal, maka capaian tindak lanjut hasil pengawasan menjadi salah satu kegiatan strategis daerah, dimana seluruh SKPD terdapat rencana aksi yang harus diselesaikan.

Inspektorat Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan pemantauan TLHP BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Tahun 2022 dan Tahun sebelumnya. Hasil pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan eksternal dari BPK RI adalah :

Total Rekomendasi LHP BPK RI s.d tahun 2022 :

10.930 Temuan

Jumlah penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dengan kategori telah sesuai dengan rincian sebagai berikut :

Semester I Tahun 2022

- a. Selesai Ditindaklanjuti (Status 1 dan 4) : 9.389 (85,90%)*
- b. Belum selesai (Status 2 dan 3) : 1.541 (14,10%)*

Proyeksi Progress Semester II Tahun 2022

Selesai ditindaklanjuti (status 1 dan 4) : 371 Temuan

Proyeksi Semester II Tahun 2022

- a. Selesai Ditindaklanjuti (Status 1 dan 4) : 9.760 (89,30%)*
- b. Belum selesai (status 2 dan 3) : 1.170 (10,70%)*

Per tanggal 31 Desember 2022, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta masih menunggu hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh BPK RI dalam penyampaian dokumen pendukung Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHP BPK RI ke dalam Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut BPK RI (SIPTL BPK RI). Inspektorat Provinsi DKI Jakarta melakukan upaya dalam percepatan TL LHP BPK RI selama tahun 2022 dengan pelaksanaan kegiatan konsinyering dengan tujuan pembahasan TL LHP BPK RI tahun 2022 dan tahun-tahun sebelumnya sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :

1. Konsinyering TL LHP BPK RI Tanggal 23 s.d. 24 Juni 2022 dengan target sebanyak 718 usulan rekomendasi yang siap diajukan untuk dilakukan pembahasan bersama Tim BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, dengan rincian usulan sebanyak 495 rekomendasi tuntas dan 223 rekomendasi dalam proses.
2. Konsinyering TL LHP BPK RI Tanggal 12 dan 13 Desember 2022 dengan target sebanyak 518 usulan rekomendasi yang siap diajukan untuk dilakukan pembahasan bersama Tim BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, dengan rincian usulan sebanyak 377 rekomendasi tuntas, 119 rekomendasi status dalam proses, dan 22 rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.

Pada Pelaksanaan percepatan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI ditemukan beberapa hambatan, diantaranya :

1. Pejabat/pegawai yang bertanggungjawab sulit ditemukan karena sudah pensiun dan/atau alamat tidak jelas;
2. Pejabat/pegawai yang bertanggungjawab dalam kondisi sakit dan/atau tidak mampu untuk menyelesaikan/membayar TGR;

3. Penyelesaian kerugian daerah oleh pihak ketiga sulit dilakukan dikarenakan pihak ketiga tidak diketahui alamatnya dan mengalami kesulitan ekonomi; dan
4. Terdapat rekomendasi yang membutuhkan pemerintah daerah lainnya sehingga membutuhkan waktu penyelesaian yang cukup panjang/lebih dari 1 Tahun Anggaran.



2.1

INDIKATOR KINERJA 2.1

Nilai/Predikat AKIP	Target : 91	Realisasi : N/A	Capaian : N/A
---------------------	-------------	-----------------	---------------

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan. Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi belum diperoleh sampai dengan tanggal penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini sehingga realisasi atas indikator ini masih diisi dengan keterangan N/A.

Sebagai perbandingan pada skala nasional untuk tingkat Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta berada di urutan kedua dalam perolehan peringkat AKIP dengan mendapat nilai A (80,10) yang lebih baik dari tahun sebelumnya yaitu nilai BB (74,41). Adapun gambaran tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Secara nasional, pada hasil evaluasi SAKIP tahun 2021 terdapat 1 pemerintah provinsi berpredikat AA; 4 pemerintah provinsi dan 12 pemerintah kabupaten/kota berpredikat A; 9 pemerintah provinsi dan 54 kabupaten/kota berpredikat BB.

Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu dari 9 pemerintah provinsi berpredikat BB

Tabel 3.4
Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021 oleh Menpan RB secara nasional

No	Provinsi/Kota/Kabupaten	Predikat
1	Pemerintah Provinsi D.I Yogyakarta	AA
2	Provinsi DKI Jakarta	A
3	Kabupaten Bantul	A
4	Kabupaten Kulon Progo	A
5	Kabupaten Sleman	A
6	Kota Yogyakarta	A
7	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	A
8	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	A
9	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	A
10	Kabupaten Banyuwangi	A
11	Kabupaten Gresik	A
12	Kabupaten Lamongan	A
13	Kabupaten Ngawi	A
14	Kabupaten Situbondo	A
15	Kota Malang	A
16	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	A
17	Kabupaten Banggai	A
18	Pemerintah Provinsi Bali	BB
19	Kabupaten Badung	BB
20	Kota Denpasar	BB
21	Kabupaten Lebak	BB
22	Kabupaten Pandeglang	BB
23	Kabupaten Serang	BB
24	Kabupaten Tangerang	BB
25	Kabupaten Gunung Kidul	BB
26	Kabupaten Bone Bolango	BB
27	Kabupaten Batang Hari	BB
28	Kabupaten Bandung	BB
29	Kabupaten Garut	BB

No	Provinsi/Kota/Kabupaten	Predikat
30	Kabupaten Sumedang	BB
31	Kota Bandung	BB
32	Kota Bogor	BB
33	Kota Sukabumi	BB
34	Kota Tasikmalaya	BB
35	Kabupaten Banyumas	BB
36	Kabupaten Cilacap	BB
37	Kabupaten Wonogiri	BB
38	Kota Pekalongan	BB
39	Kabupaten Bondowoso	BB
40	Kabupaten Jombang	BB
41	Kabupaten Madiun	BB
42	Kabupaten Magetan	BB
43	Kabupaten Malang	BB
44	Kabupaten Mojokerto	BB
45	Kabupaten Pamekasan	BB
46	Kabupaten Pasuruan	BB
47	Kabupaten Ponorogo	BB
48	Kabupaten Trenggalek	BB
49	Kabupaten Tulungagung	BB
50	Kota Blitar	BB
51	Kabupaten Sidoarjo	BB
52	Kota Kediri	BB
53	Kota Madiun	BB
54	Kota Probolinggo	BB
55	Kota Surabaya	BB
56	Kota Pontianak	BB
57	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	BB
58	Kota Banjarmasin	BB
59	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	BB
60	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	BB
61	Pemerintah Provinsi Bangka Belitung	BB
62	Kabupaten Bangka	BB
63	Kabupaten Bangka Tengah	BB
64	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	BB
65	Kabupaten Karimun	BB
66	Kabupaten Natuna	BB
67	Kota Tanjungpinang	BB
68	Provinsi Nusa Tenggara Barat	BB
69	Kabupaten Sorong	BB
70	Kabupaten Polewali Mandar	BB

No	Provinsi/Kota/Kabupaten	Predikat
71	Kota Manado	BB
72	Provinsi Sumatera Barat	BB
73	Kota Bukittinggi	BB
74	Kota Padang	BB
75	Kota Payakumbuh	BB
76	Provinsi Sumatera Selatan	BB
77	Kabupaten Muara Enim	BB
78	Kabupaten Musi Rawas	BB
79	Kota Lubuk Linggau	BB
80	Kabupaten Humbang Hasundutan	BB

Untuk tahun 2022, indikator kinerja nilai/predikat AKIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih dilakukan penilaian oleh Tim Kementerian PAN dan RB, sehingga masih belum diketahui hasil evaluasi AKIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Adapun capaian Nilai/Predikat AKIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2018 s.d tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.5 Target dan Capaian Nilai/Predikat AKIP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2021

Tahun		2018	2019	2020	2021
Nilai/ Predikat AKIP	Target	A	A	A	A (81)
	Realisasi	BB (71,04)	BB (73,84)	BB (74,41)	A (80,10)
	Capaian	87,70%	91,16%	91,86%	98,88%

Upaya yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dalam mendorong peningkatan nilai/predikat AKIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 antara lain:

1. Memfasilitasi pembentukan Tim Penyelenggara Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Inspektur Provinsi DKI Jakarta sebagai Wakil Ketua I;
2. Menjadikan indikator nilai/predikat AKIP sebagai salah satu kegiatan strategis daerah, dimana seluruh SKPD terdapat rencana aksi yang harus diselesaikan;
3. Melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP SKPD Tahun 2022.

Evaluasi atas implementasi SAKIP Perangkat Daerah

Perangkat Daerah bertanggung jawab atas implementasi SAKIP agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel. Inspektorat bertanggung jawab untuk memberikan nilai/predikat atas implementasi SAKIP Tahun 2021 berdasarkan hasil evaluasi. Inspektorat melaksanakan evaluasi dengan mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia.



Evaluasi dilakukan dengan menguji bukti-bukti sesuai dengan prosedur evaluasi berdasarkan pemenuhan pernyataan pada Lembar Kerja Evaluasi. Inspektorat yakin bahwa bukti evaluasi yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat sebagai dasar menyatakan nilai/predikat.

Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta terhadap sebanyak 41 (empat puluh satu) Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 pada komponen evaluasi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi internal menunjukkan bahwa Perangkat Daerah memperoleh nilai rata-rata Akuntabilitas Kinerja dengan sebesar **93,74** (predikat AA). Penilaian tersebut menunjukkan tingkat rata-rata efektivitas dan efisiensi dengan nilai rata-rata capaian kinerja yang lebih baik dari tahun sebelumnya yaitu sebesar **92,94** (Predikat AA).

Secara umum telah terdapat kemajuan dalam implementasi SAKIP dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Perangkat Daerah dibandingkan dengan tahun lalu. Uraian singkat hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah dalam melakukan pengukuran kinerja belum menginformasikan perbandingan laporan kinerja tahun sebelumnya, penjelasan atas hambatan dan dukungan/strategi yang telah dilakukan oleh perangkat daerah dalam mencapai kinerjanya, dan kualitas indikator tujuan dalam rangka pengukuran ketercapaian tujuan yang masih perlu ditingkatkan;
2. Perangkat daerah belum menginformasikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional;
 - b. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja;
 - c. Laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi;
 - d. Draft Laporan Kinerja direviu di lingkup Perangkat Daerah;
 - e. Analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah;
 - f. Analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.
3. Seluruh Perangkat Daerah belum melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang di lingkup Perangkat Daerah masing-masing.
 4. Inspektorat telah melakukan berbagai cara dalam melakukan evaluasi Implementasi SAKIP seperti pendampingan dan mencari solusi atas permasalahan melalui konfirmasi baik lisan maupun tertulis yang dituangkan dalam Berita Acara Konfirmasi kepada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
 5. Capaian perbandingan Kinerja Output dan Outcome pada Perangkat Daerah di tahun 2022 belum dapat dikatakan lebih baik dari tahun sebelumnya walaupun capaiannya telah melebihi 100%. Hal ini disebabkan adanya kriteria dari pihak MenPAN-RB, bahwa capaian kinerja output dan outcome dapat dikatakan baik jika memperoleh nilai capaian > 120%.



Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja pada Perangkat Daerah, Inspektorat merekomendasikan kepada Pj Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

1. Dalam penentuan target kinerja tahunan agar ditentukan berdasarkan kemampuan riil perangkat daerah dan juga menyesuaikan dengan informasi yang tercantum dalam laporan kinerja tahun sebelumnya, terutama dalam pencapaian target pembangunan daerah sesuai dengan fungsi Perangkat Daerah;
2. Pengukuran kinerja agar disusun berdasarkan informasi dalam laporan kinerja, sehingga mengetahui target yang riil yang akan dicapai serta hambatan dan dukungan atau strategi yang harus disusun Perangkat Daerah dalam rangka mencapai kinerja tersebut;
3. Dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah agar dilengkapi dengan :

- a. Analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (benchmark kinerja), apabila tidak ada perbandingan dengan level nasional agar diinformasikan dalam bagian LKIP;
 - b. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja;
 - c. Perangkat Daerah telah melakukan revidi laporan kinerja di lingkup Perangkat Daerah;
 - d. Analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah;
 - e. Analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.
4. Seluruh Perangkat Daerah agar melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang di lingkup Perangkat Daerah dengan dibentuknya Tim SAKIP di Perangkat Daerah.
 5. Terhadap rekomendasi yang telah disampaikan agar ditindaklanjuti seluruhnya sebagai upaya perbaikan dan dalam rangka meyakini atas implementasi SAKIP.

3

INDIKATOR KINERJA 3

Tingkat Maturitas SPIP	Target : 3.570	Realisasi : 3,570	Capaian : 100%
------------------------	----------------	-------------------	----------------

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sedangkan maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, serta mencakup unsur - unsur :

1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Manajemen Risiko Indeks;
3. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi;
4. Kapabilitas APIP.

Keempat unsur di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses penilaian maturitas SPIP. Berikut capaian tingkat maturitas SPIP Provinsi DKI Jakarta:

Tabel 3.6 Target dan Capaian Tingkat Maturitas SPIP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022

Tahun		2018	2019	2020	2021	2022
Tingkat Maturitas SPIP	Target	3	3	3	3	3,570
	Realisasi	3	Tidak ada penilaian dari BPKP		3,262	3,570
	Capaian	100%	N/A	N/A	108,73%	100%

Berbagai upaya dilakukan oleh Inspektorat dalam mendorong peningkatan nilai maturitas SPIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 antara lain:

1. Melakukan bimbingan teknis penilaian mandiri SPIP kepada Seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diselenggarakan atas kerjasama BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta;
2. Melakukan sinergitas dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta dengan mengusulkan SPIP dan menjadi salah satu materi kediklatan resmi;
3. Melakukan sosialisasi dan Bimtek Siperisai untuk identifikasi manajemen risiko pada Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah;
4. Melakukan sosialisasi/road show anti korupsi yang diselenggarakan di beberapa tempat (SMK, Penggiat/komunitas pariwisata dan ekonomi kreatif, dan lain-lain) dan sosialisasi keluarga berintegritas kepada Kepala Perangkat Daerah yang diselenggarakan atas kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi;
5. Melakukan sosialisasi gratifikasi melalui kegiatan Rabu Belajar yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Provinsi DKI Jakarta;
6. Melakukan sosialisasi Saber Pungli pada beberapa Unit Kerja Perangkat Daerah (KUA Kementerian Agama, Walikota Administrasi Jakarta Utara, Walikota Administrasi Jakarta Pusat, TPU Pondok Ronggon dan lain-lain);
7. Melakukan koordinasi pencegahan korupsi dengan KPK RI;
8. Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Bersama KPK RI;
9. Orkestrasi dalam Membangun Budaya Anti Korupsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
10. Melakukan sosialisasi pembinaan tata kelola keuangan di Kecamatan Matraman;

11. Sosialisasi Penilaian Survey Penilaian Integritas (SPI) yang diselenggarakan oleh KPK RI dan Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta;
12. Sosialisasi Whistleblowing System melalui Sipadu di Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara;
13. Implementasi dan Publikasi cetakgol.jakarta.go.id guna pelaporan gratifikasi;
14. Melakukan Rencana Aksi dalam rangka peningkatan kapabilitas APIP Level 3 Tahun 2022;
15. Penilaian *Fraud Control Planning* (FCP) oleh BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta;
16. Penilaian *Monitoring Center for Prevention* (MCP) dalam upaya pencegahan korupsi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Meskipun sesuai capaian target yang ditetapkan, beberapa hambatan selama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta antara lain :

1. Belum adanya kesamaan persepsi dan pemahaman yang menyeluruh terkait dengan komponen/unsur yang terkandung dalam setiap penilaian Maturitas SPIP;
2. Dokumen pendukung yang disajikan oleh Perangkat Daerah belum memenuhi unsur kecukupan untuk dilakukan penilaian pada level yang diusulkan untuk dilakukan penilaian baik oleh Inspektorat maupun BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta;

Indeks Manajemen Risiko Pemerintah Daerah

Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di tingkat Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko. MRI Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. *Pada Tahun 2021, berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta memperoleh indeks sebesar 3,378, lebih baik dari dibanding tahun 2020 yaitu sebesar 2,130. Sedangkan hasil penilaian maturitas MRI tahun 2022 adalah sebesar 3,384* atau mengalami peningkatan yang tidak cukup signifikan yaitu sebesar 0,006.

Beberapa hambatan terkait dengan penerapan manajemen risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta antara lain :

1. Pemahaman baik oleh Auditor/P2UPD dan seluruh jajaran Perangkat Daerah tentang Manajemen Risiko belum merata;
2. Penggunaan Sistem Informasi Pengelolaan Risiko dan Pengendalian (SiPerisai) oleh Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah belum seluruhnya dilakukan;

3. Belum diperoleh gambaran risiko tingkat Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta;
4. Pengembangan SiPerisai belum dilakukan dengan optimal sehingga belum *user friendly*.

Dalam rangka mendorong peningkatan level Maturitas SPIP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022, Inspektorat telah menyusun *Road Map* terkait Rencana Aksi Peningkatan Kualitas Pengawasan dan Penguatan Elemen Kapabilitas. Adapun Rencana Aksi Peningkatan Kualitas Pengawasan antara lain :

1. Keyakinan atas 3E melalui penerapan kendali mutu pengawasan dan optimalisasi per Reviu;
2. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Organisasi melalui optimalisasi peran pembinaan dan pengawasan serta optimalisasi penerapan SPIP;
3. Peningkatan Indeks Manajemen Risiko melalui optimalisasi penerapan manajemen risiko dan penguatan monev penerapan manajemen risiko, dengan *timeline* sebagai berikut :

Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)

Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) merupakan kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di organisasi. Dimensi IEPK merupakan pengembangan dari *Fraud Control Plan (FCP)* yang merupakan kerangka pengelolaan risiko korupsi dalam organisasi.

Dimensi dan indikator IEPK dikelompokkan dalam 3 (tiga) pilar, yaitu :

1. Pilar Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi

Kapabilitas pengelolaan risiko korupsi didefinisikan sebagai karakteristik organisasional yang mengindikasikan 2 (dua) dimensi kapabilitas yaitu kapasitas dan kompetensi organisasi untuk mengelola risiko korupsi.

- a. Kapasitas mencakup semua aspek kebijakan formal antikorupsi, mulai dari pernyataan kebijakan dalam dokumen perencanaan, penetapan struktur, SOP antikorupsi, serta standar perilaku. Kapasitas juga ditampilkan oleh dukungan eksplisit sumber daya, baik keuangan, personal, maupun sarana dan prasarana.
- b. Kompetensi merujuk kepada gabungan pengetahuan, skill (keterampilan), dan pengalaman yang memungkinkan organisasi mengelola risiko korupsi secara efektif.

Unsur penilai Kapabilitas pengelolaan risiko korupsi yaitu kebijakan antikorupsi, seperangkat sistem antikorupsi, dukungan sumber daya, power (kuasa dan wewenang), dan pembelajaran antikorupsi.

2. Pilar Penerapan Strategi Pencegahan

Penerapan strategi pencegahan didefinisikan sebagai satu-kesatuan proses yang menyeluruh pada semua aspek penerapan strategi pencegahan korupsi yang berfokus pada:

- a. Efektivitas pencegahan dan deteksi dini yaitu menilai seberapa konsisten assesment risiko korupsi dilakukan dan program pembelajaran antikorupsi telah meningkatkan kepedulian pegawai dan stakeholder dalam mencegah dan mendeteksi perilaku korupsi.
- b. Menilai seberapa jauh budaya organisasi antikorupsi terbentuk yang tercermin oleh terwujudnya kepemimpinan etis, integritas, organisasional, dan iklim etis yang kondusif.

Unsur penilaian penerapan strategi pencegahan yaitu assesment dan mitigasi risiko korupsi, saluran pelaporan internal yang efektif dan kredibel, kepemimpinan etis, integritas organisasional, dan iklim prinsip.

3. Pilar Penanganan Kejadian Korupsi

Pilar penanganan kejadian korupsi melihat efektivitas pengelolaan risiko korupsi melalui 2 (dua) hal, yaitu sistem respons dan peristiwa korupsi.

- a. Efektivitas sistem respons digambarkan oleh seberapa konsisten langkah-langkah investigatif dilaksanakan atas setiap indikasi korupsi yang terdeteksi serta seberapa jauh pengenaan sanksi kepada pelaku, pemulihan kerugian, dan perbaikan sistem pengendalian dilakukan secara konsisten sebagai tindak lanjutnya;
- b. Kejadian korupsi merupakan peristiwa aktual korupsi yang masih terjadi di dalam lingkungan unit kerja yang keberadaannya menjadi faktor pengurang efektivitas pengendalian korupsi organisasi.

Unsur penilaian penanganan kejadian korupsi yaitu investigasi dan tindakan korektif.

IEPK yang diperoleh dari hasil evaluasi penilaian mandiri yang dilakukan oleh BPKP selama Tahun 2020 s.d Tahun 2022 berturut-turut memperoleh nilai untuk tahun 2020 tidak ada penilaian; Tahun 2021 sebesar 2,322 ; dan tahun 2022 sebesar 2,928. Adapun hambatan

dalam pelaksanaan efektivitas pengendalian korupsi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta antara lain :

1. Perangkat kebijakan yang mendukung terlaksananya upaya pencegahan dan pengendalian korupsi pada level Perangkat Daerah belum tersusun dengan baik sebagai contoh yaitu belum ada standar operasional prosedur penanganan pengaduan internal (*whistleblowing system*) pada beberapa Perangkat Daerah, belum ada pemasangan banner antikorupsi sebagai upaya menciptakan budaya antikorupsi; dan lain-lain;
2. Seluruh Perangkat Daerah belum memahami aspek-aspek pemenuhan dalam upaya pencegahan dan pengendalian korupsi di lingkungan kerjanya masing-masing;
3. Salah upaya pencegahan korupsi adalah tersusunnya *Fraud Risk Assesment* yang dilaksanakan pada masing-masing Perangkat Daerah. Namun demikian sampai dengan akhir 2022, seluruh Perangkat Daerah belum menyusun penilaian dan penanganan risiko *fraud* di masing-masing lingkungan kerjanya.

Tingkat Kapabilitas APIP

Kapabilitas APIP adalah Kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Level Kapabilitas APIP secara tidak langsung dapat memberikan gambaran mengenai tingkat efektivitas tata kelola suatu APIP karena salah satu kriteria dari suatu tata kelola yang baik adalah adanya pengembangan kapasitas dan kapabilitas organisasi. Oleh karenanya APIP dalam kapasitasnya sebagai auditor internal pemerintah harus terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya untuk dapat memberikan penilaian independen dan objektif atas efektivitas operasi dari proses tata kelola organisasi guna memberi nilai tambah bagi organisasi. Penilaian atas penerapan tata kelola APIP di Indonesia dengan mengacu kepada Internal Audit Capability Model mencakup penilaian terhadap enam elemen yaitu :

1. Peran dan Pelayanan APIP;
2. Pengelolaan SDM;
3. Praktik Profesional;
4. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja;
5. Budaya dan Hubungan Organisasi;

6. Struktur Tata Kelola.

Capaian tingkat Kapabilitas APIP Provinsi DKI Jakarta tahun 2018 s.d 2022 :

Tabel 3.7 Target dan Capaian Tingkat Kapabilitas APIP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2021

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022	
Tingkat Kapabilitas APIP	Target	3	3	3	4	
	Realisasi	2	tidak ada penilaian dari BPKP		2,500	N/A
	Capaian	67,77%	N/A	N/A	75%	N/A

Berdasarkan Laporan Hasil Penjaminan Kualitas Peningkatan Kapabilitas APIP level 3 yang disampaikan oleh BPKP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 diantaranya menjelaskan bahwa hasil quality assurance pada 6 (enam) elemen sebagai berikut :

Tabel 3.8 Hasil Quality Assurance PK APIP oleh BPKP

No	Elemen	Level Saat Ini
1	Peran dan Layanan	2
2	Manajemen Sumber Daya Manusia	2
3	Praktik Profesional	2
4	Akuntabilitas dan Manajemen Sumber Daya	3
5	Budaya dan Hubungan Organisasi	3
6	Struktur Tata Kelola	3
	<i>Rata-rata Level</i>	<i>2,5</i>

Sampai dengan 31 Desember 2022, Laporan Hasil Penjaminan Kualitas Peningkatan Kapabilitas APIP level 3 yang dilaksanakan oleh BPKP Provinsi DKI Jakarta belum disampaikan kepada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta. Sehingga dari target nilai kapabilitas APIP level 4 mencapai nilai N/A.

Dalam rangka peningkatan Kapabilitas APIP, Inspektorat telah menyusun Road Map yang saat ini sedang dan akan dilaksanakan ke depannya sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas/Leveling Pengelolaan SDM & menjadi agen perubahan melalui penambahan SDM sesuai peta kebutuhan, peningkatan kompetensi SDM dan peningkatan dukungan operasional pengawasan;
2. Peningkatan Leveling Praktik Profesional & Efektivitas Pengawasan melalui peningkatan kompetensi perencanaan berbasis risiko & monev kode etik serta integrasi sistem informasi pengawasan (AMS, SIPERISAI, CACM);

3. Peningkatan Leveling Akuntabilitas & Manajemen Kinerja melalui peningkatan kompetensi akuntabilitas & manajemen kinerja serta pengembangan sistem kerja Inspektorat;
4. Peningkatan Leveling Budaya & Hubungan Organisasi melalui optimalisasi hubungan kerja internal & stakeholder serta penguatan sistem komunikasi pengawasan;
5. Peningkatan Leveling Struktur Tata Kelola melalui optimalisasi piagam pengawasan dan peningkatan pengelolaan sumber daya;
6. Peningkatan Leveling Peran & Layanan & Optimalisasi Kualitas/Kinerja melalui penguatan proses bisnis (pedoman & SOP) serta optimalisasi sistem informasi pengawasan (Pengawasan : Jakwas, CACM, AMS, SIMANTUL; Konsultasi : E-KLINIK, SIPERISA; Anti Korupsi : CETAKGOL, SIPADU; Internal : SIDISPO).
7. Peningkatan Kapabilitas APIP dengan cara telaah sejawat Eksternal, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah dilakukan Telaah Sejawat Eksternal dari Inspektorat Pemerintah Aceh selaku Penelaah yang ditunjuk oleh Komite AAIP.

4

INDIKATOR KINERJA 4

Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Target : 91	Realisasi : 91.93	Capaian : 101,02%
--	-------------	-------------------	-------------------

Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dilakukan dengan mengukur 3 Komponen yaitu:

1. Penyerapan anggaran. Komponen ini mengukur kesesuaian realisasi anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan di lingkungan Perangkat Daerah. Nilai penyerapan anggaran maksimal adalah 40%. Penyerapan anggaran bernilai 40% apabila serapan anggaran $\geq 80\%$. Apabila serapan anggaran $< 80\%$ maka perhitungan nilai penyerapan anggaran = (persentase serapan anggaran x 40%). Anggaran yang diperhitungkan meliputi APBD dan BLU, dan tidak termasuk dana transfer dari Pemerintah Pusat.
2. Efisiensi adalah sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dari subkegiatan yang target sarannya telah dicapai. Apabila pencapaian output tidak tercapai 100% maka unsur efisiensi tidak diukur. Sisa dana adalah selisih lebih pagu anggaran dengan realisasi anggaran dimana selisih lebih pagu dimaksud sudah tidak dialihkan kembali untuk subkegiatan/belanja lainnya.
3. Pencapaian output adalah persentase capaian indikator kinerja subkegiatan (output). Realisasi pencapaian output dapat dilihat dalam aplikasi e-monev Anggaran.

Formulasi pengukuran adalah sebagai berikut:

1. Serapan Anggaran $\geq 80\%$ dan output 100%.

$$\text{Realisasi} = (40\%) + (\text{efisiensi} \times 10\%) + (\text{pencapaian output} \times 50\%)$$

2. Serapan Anggaran $< 80\%$ dan output $< 100\%$

$$\text{Realisasi} = (\text{Penyerapan Anggaran} \times 40\%) + (\text{efisiensi} \times 10\%) + (\text{pencapaian output} \times 50\%)$$

3. Serapan anggaran $\geq 80\%$ Namun output $< 100\%$.

$$\text{Realisasi} = (40\%) + (\text{pencapaian output} \times 50\%)$$

Adanya pandemi COVID-19 menyebabkan terjadinya perubahan kebijakan dalam penganggaran, yang diprioritaskan sebagian anggaran di seluruh perangkat daerah untuk dialokasikan kembali guna percepatan penanganan COVID-19, demikian juga di Inspektorat terdapat pengurangan anggaran. Namun demikian, untuk kualitas pelaksanaan anggaran, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta mampu merealisasikan 100%, dikarenakan Inspektorat tetap melaksanakan tugas dan pokoknya dengan anggaran yang tersedia.

Dalam pencapaian indikator ini melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.9 Target dan Realisasi Kualitas Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

NAMA UNIT KERJA	PROGRAM	SUB KEGIATAN	PERGESERAN VI	REALISASI	Serapan	Efisiensi	Capaian Output	Capaian KPA				
								Serapan (40%)	Efisiensi (10%)	Capaian Output (50%)	Total	
			126.948.405,794	112.400.256,605								
INSPEKTORAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	112.053.878,600	101.986.620,585	91,02%	8,98%	100%	40%	4,40%	50%	94%	
INSPEKTORAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pelaksanaan Penelusuran dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	27.082.960	25.215,600	93,11%	6,89%	100%	40%	3,45%	50%	93%	
INSPEKTORAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	6.791.430,115	5.294.824,000	77,96%	22,04%	100%	31%	11,02%	50%	92%	
INSPEKTORAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.372.786,094	4.296.012,000	98,29%	1,71%	100%	40%	0,85%	50%	91%	
INSPEKTORAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.528,200	9.421,125	98,88%	1,12%	100%	40%	0,56%	50%	91%	
INSPEKTORAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	44.761,750	38.206,200	85,35%	14,65%	100%	40%	7,32%	50%	97%	
INSPEKTORAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Bahan/Material	169.565,060	169.441,900	99,93%	0,07%	100%	40%	0,04%	50%	90%	
INSPEKTORAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Facilitasi Kunjungan Tamu	108.459,924	106.671,046	98,54%	1,46%	100%	40%	0,73%	50%	91%	
INSPEKTORAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.846,400	6.909,624	38,72%	61,28%	100%	15%	30,64%	50%	96%	
INSPEKTORAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	352.440,000	278.980,000	79,16%	20,84%	100%	32%	10,42%	50%	92%	

NAMA UNIT KERJA	PROGRAM	SUB KEGIATAN	PERGESERAN VI	REALISASI	Serapan	Efisiensi	Capaian Output	Capaian KPA			
			126.948.405.794	112.400.256.615				Serapan (40%)	Efisiensi (10%)	Capaian Output (50%)	Total
INSPEKTORAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	166.272.280	116.454.625	70,04%	29,86%	100%	28%	14,98%	50%	93%
INSPEKTORAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80.083.751	69.300.000	86,53%	13,47%	100%	40%	6,73%	50%	97%
INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKPUS	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pelaksanaan Penelaahan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.776.000	5.776.000	100,00%	0,00%	100%	40%	0,00%	50%	90%
INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKPUS	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	297.286.408	295.311.193	99,34%	0,66%	100%	40%	0,33%	50%	90%
INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKPUS	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	528.330	528.330	100,00%	0,00%	100%	40%	0,00%	50%	90%
INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKPUS	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.248.620	3.248.620	100,00%	0,00%	100%	40%	0,00%	50%	90%
INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKPUS	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Bahan/Material	13.836.000	13.836.000	100,00%	0,00%	100%	40%	0,00%	50%	90%
INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKPUS	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Fasilitas Kunjungan Tamu	45.652.200	45.652.200	100,00%	0,00%	100%	40%	0,00%	50%	90%
INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKPUS	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.240.000	42.238.290	100,00%	0,00%	100%	40%	0,00%	50%	90%

NAMA UNIT KERJA	PROGRAM	SUB KEGIATAN	PERGESERAN VI	REALISASI	Serapan	Efisiensi	Capaian Output	Capaian KPA			
			126.948.495.794	112.400.266.605				Serapan (40%)	Efisiensi (10%)	Capaian Output (50%)	Total
INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKPUS	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11.761.752	11.761.752	100,00%	0,00%	100%	40%	0,00%	50%	99%
INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKPUS	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.035.927	21.035.627	100,00%	0,00%	100%	40%	0,00%	50%	99%
INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKUT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.000.000	5.000.000	100,00%	0,00%	100%	40%	0,00%	50%	90%
INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKUT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	108.168.901	106.316.000	97,39%	2,61%	100%	40%	1,31%	50%	91%
INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKUT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	837.540	800.000	95,52%	4,48%	100%	40%	2,24%	50%	92%
INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKUT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Bahan/Material	9.685.200	9.176.000	94,74%	5,26%	100%	40%	2,63%	50%	93%
INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKUT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Fasilitas Kunjungan Tamu	52.212.776	52.205.500	99,99%	0,01%	100%	40%	0,01%	50%	90%
INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKUT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.240.000	38.280.000	90,63%	9,38%	100%	40%	4,69%	50%	95%

NAMA UNIT KERJA	PROGRAM	SUB KEGIATAN	PERGESERAN VI	REALISASI	Serapan	Efisiensi	Capaian Output	Capaian KPA			
			126.948.485,794	112.400.258.805				Serapan (40%)	Efisiensi (10%)	Capaian Output (50%)	Total
INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKUT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14.067.095	12.855.428	91,39%	8,61%	100%	40%	4,31%	50%	94%
INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKUT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.213.176	13.975.000	91,85%	8,14%	100%	40%	4,07%	50%	94%
INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKBAR	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pelaksanaan Penatrusahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.259.000	1.168.200	92,79%	7,21%	100%	40%	3,61%	50%	94%
INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKBAR	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Peralatan dan Pertengkapan Kantor	362.540.338	299.182.260	82,52%	17,48%	100%	40%	8,74%	50%	99%
INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKBAR	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	726.000	715.300	98,53%	1,47%	100%	40%	0,74%	50%	91%
INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKBAR	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.712.400	1.711.000	99,92%	0,08%	100%	40%	0,04%	50%	99%
INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKBAR	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Bahan/Material	11.310.930	11.310.930	100,00%	0,00%	100%	40%	0,00%	50%	99%
INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKBAR	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.205.325	10.065.027	98,63%	1,37%	100%	40%	0,69%	50%	91%

NAMA UNIT KERJA	PROGRAM	SUB KEGIATAN	PERGESERAN VI	REALISASI	Serapan	Efisiensi	Capaian Output	Capaian KPA			
			126.948.405.794	112.400.258.695				Serapan (40%)	Efisiensi (10%)	Capaian Output (50%)	Total
INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKBAR	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Fasilitas Kunjungan Tamu	46.528.070	46.427.738	99,78%	0,22%	100%	40%	0,11%	50%	90%
INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKBAR	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.240.000	40.534.500	95,95%	4,04%	100%	40%	2,02%	50%	92%
INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKBAR	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48.304.089	47.896.700	98,74%	1,26%	100%	40%	0,63%	50%	91%
INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKSEL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.035.000	4.034.300	99,98%	0,02%	100%	40%	0,01%	50%	90%
INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKSEL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.893.080	2.849.500	98,49%	1,51%	100%	40%	0,75%	50%	91%
INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKSEL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	723.492	707.625	97,81%	2,19%	100%	40%	1,10%	50%	91%
INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKSEL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Bahan/Material	8.416.900	8.416.900	100,00%	0,00%	100%	40%	0,00%	50%	90%
INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKSEL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	413.829.026	405.413.039	97,97%	2,03%	100%	40%	1,02%	50%	91%

NAMA UNIT KERJA	PROGRAM	SUB KEGIATAN	PERGESERAN VI	REALISASI	Serapan	Efisiensi	Capaian Output	Capaian KPA			
			125.946.405.794	112.409.256.605				Serapan (40%)	Efisiensi (10%)	Capaian Output (50%)	Total
INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKSEL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.151.728	4.854.900	94,24%	5,76%	100%	40%	2,88%	50%	93%
INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKSEL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.240.000	38.541.000	91,24%	8,76%	100%	40%	4,38%	50%	94%
INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKSEL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.035.927	19.861.300	94,42%	5,58%	100%	40%	2,79%	50%	93%
INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKSEL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Fasilitas Kunjungan Tamu	41.953.164	41.837.500	99,72%	0,28%	100%	40%	0,14%	50%	90%
INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKTIM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.051.800	5.002.900	99,03%	0,97%	100%	40%	0,48%	50%	90%
INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKTIM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Bahan/Material	9.662.140	9.662.140	100,00%	0,00%	100%	40%	0,00%	50%	90%
INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKTIM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.240.000	39.960.000	94,60%	5,40%	100%	40%	2,70%	50%	93%
INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKTIM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9.855.325	9.133.100	92,67%	7,33%	100%	40%	3,66%	50%	94%

NAMA UNIT KERJA	PROGRAM	SUB KEGIATAN	PERGESERAN VI	REALISASI	Serapan	Efisiensi	Capaian Output	Capaian KPA			
			126.946.405.704	112.400.256.695				Serapan (40%)	Efisiensi (10%)	Capaian Output (50%)	Total
INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKTIM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.982.269	20.002.200	95,33%	4,67%	100%	40%	2,34%	50%	92%
INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKTIM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.380.951	1.254.000	90,81%	9,19%	100%	40%	4,60%	50%	95%
INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKTIM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Facilitasi Kunjungan Tamu	33.695.600	33.676.400	99,94%	0,06%	100%	40%	0,03%	50%	90%
INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKTIM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	153.541.999	149.146.310	97,14%	2,86%	100%	40%	1,43%	50%	91%
INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KABUPATEN - KEP. SERIBU	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6.518.000	6.000.000	92,05%	7,95%	100%	40%	3,97%	50%	94%
INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KABUPATEN - KEP. SERIBU	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	102.331.851	98.310.480	96,07%	3,93%	100%	40%	1,96%	50%	92%
INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KABUPATEN - KEP. SERIBU	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Bahan/Material	3.459.000	3.459.000	100,00%	0,00%	100%	40%	0,00%	50%	90%
INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KABUPATEN - KEP. SERIBU	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Facilitasi Kunjungan Tamu	74.254.700	72.879.723	98,15%	1,85%	100%	40%	0,93%	50%	91%

NAMA UNIT KERJA	PROGRAM	SUB KEGIATAN	PERGESERAN VI	REALISASI	Serapan	Efisiensi	Capaian Output	Capaian KPA			
			126.948.485.794	112.400.236.695				Serapan (40%)	Efisiensi (14%)	Capaian Output (50%)	Total
INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KABUPATEN - KEP. SERIBU	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	456.334.659	456.269.400	99,99%	0,01%	100%	40%	0,01%	50%	90%
INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KABUPATEN - KEP. SERIBU	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	71.529	55.300	76,88%	23,12%	100%	31%	11,56%	50%	92%
INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KABUPATEN - KEP. SERIBU	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.240.000	36.323.000	85,99%	14,01%	100%	40%	7,00%	50%	97%
INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KABUPATEN - KEP. SERIBU	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.105.685	1.832.000	86,99%	13,01%	100%	40%	6,50%	50%	97%
INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KABUPATEN - KEP. SERIBU	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.837.778	16.699.950	98,60%	1,40%	100%	40%	0,70%	50%	91%
INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KABUPATEN - KEP. SERIBU	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.712.320	18.650.000	99,67%	0,33%	100%	40%	0,17%	50%	90%
Rata-Rata Kualitas Pelaksanaan Anggaran											91,93%

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimiliki Inspektorat hanya 287 pegawai dengan rincian sebanyak 22 pejabat struktural; 143 Pegawai merupakan personil yang menduduki jabatan fungsional tertentu terdiri dari sebanyak 96 JFT Auditor dan 46 JFT P2UPD; dan 122 Pegawai merupakan personil yang menduduki Jabatan Fungsional Umum dengan penugasan ruang lingkup yang sangat besar, tidak menjadi penghalang untuk tetap menyelesaikan tugasnya sebagai APIP. Dengan sumber daya manusia sebanyak 287 orang, Inspektorat telah menyelesaikan sebanyak 235 penugasan.

2. Anggaran

Anggaran Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 terjadi penyesuaian yang signifikan, namun demikian seluruh kegiatan yang menjadi tugas pokok pembinaan dan pengawasan dapat diselesaikan. Kualitas penyerapan anggaran Inspektorat tahun 2022 adalah sebesar 91,93%, walaupun lebih rendah capaiannya dibandingkan tahun lalu, namun seluruh kegiatan telah diselesaikan tepat waktu.

3. Waktu

Waktu menjadi sangat penting dalam penyelesaian penugasan pembinaan dan pengawasan, dikarenakan masih adanya sedikit pengaruhi akibat pandemi COVID-19 yang mengakibatkan terjadi pergeseran waktu dalam pelaksanaan tugas pengawasan, namun demikian terhadap pelaksanaan tugas pengawasan tetap dilakukan secara efisien dan prioritas serta dilaksanakan dengan tepat waktu sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan.

4. Sarana Prasarana

Sarana prasarana dalam pelaksanaan tugas pengawasan menjadi sangat penting, dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi di Lingkungan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta melalui Jakwas (Jakarta Pengawasan : <https://jakwas.jakarta.go.id>)





Adanya pandemi COVID-19 menyebabkan terjadinya perubahan kebijakan dalam penganggaran, yang diprioritaskan sebagian anggaran di seluruh perangkat daerah untuk dialokasikan kembali guna percepatan penanganan COVID-19. Berikut adalah perbandingan realisasi anggaran tahun 2022 dengan beberapa tahun sebelumnya untuk Program Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah:

Tabel 3.10 Target dan Realisasi Kualitas Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022 (Rp Miliar)

Tahun		2018	2019	2020	2021	2022
Pelaksanaan Anggaran	Anggaran	126,253	127,621	76,403	114,058	126,948
	Realisasi	115,024	121,975	69,300	108,992	112,400
	Capaian	91,10%	95,57%	90,70%	95,56%	91,93%

5-6

INDIKATOR KINERJA 5-6

KSD	Target : 100%	Realisasi : 100%	Capaian : 100%
------------	---------------	------------------	----------------

Kegiatan Strategis Daerah (KSD) adalah kegiatan yang memiliki sifat strategis dan/atau kegiatan lainnya yang memiliki dampak signifikan untuk memenuhi kebutuhan dasar, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penanggung jawab KSD adalah Kepala Perangkat Daerah atau Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah sesuai lingkup tugas, fungsi dan kewenangannya dalam pelaksanaan

KSD. Penyiapan KSD terdiri dari dua hal yaitu penetapan dokumen rencana aksi dan pengalokasian anggaran.

Penanggungjawab KSD harus mempercepat penyelesaian hambatan dalam pelaksanaan KSD secara efektif, optimal, efisien dan akuntabel. Apabila ada kebutuhan mendesak untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta pelayanan publik, Penanggung jawab KSD dibantu Tim Percepatan Kegiatan Strategis Daerah (TPKSD) melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk merumuskan alternative kebijakan dan/atau tindakan yang diperlukan guna penyelesaian hambatannya. Pemantauan dan pengendalian yang dilakukan oleh TPKSD dilaksanakan sesuai dengan rencana aksi KSD yang telah ditetapkan. Prinsip yang harus diambil dalam pelaksanaan KSD yaitu koordinasi, integrase, sinkronisasi dan simplifikasi terhadap percepatan pelaksanaan KSD.

Sejak tahun 2022, Kegiatan Strategis Daerah termasuk dalam Perjanjian Kinerja masing-masing Kepala PD dan selanjutnya di breakdown ke dalam Perjanjian Kinerja Kepala UKPD-nya. Adapun Kegiatan Strategis Daerah yang menjadi tanggung jawab Inspektorat Provinsi DKI Jakarta beserta realisasi atas Rencana Aksinya sebagai berikut :

Tabel 3.11 Renaksi dan Realisasi KSD Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

No	Nama Kegiatan	Renaksi	Realisasi	Dokumen Pendukung
1	KSD38 : Meraih Laporan Keuangan Daerah dengan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	TLHP BPK RI selesai ditindaklanjuti atas laporan tahun 2021	Telah dilaksanakan <i>Three Partied</i> TLRHP BPK RI	Laporan hasil pemantauan TLRHP BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas LHP Tahun 2022 dan Tahun tahun sebelumnya Nomor 065/SKR/EVLAP/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022
2	KSD39 : Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA	Penyusunan Dokumen Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3 dan 4, Fungsional dan Pelaksana Tahun 2022) pada Inspektorat	Telah ditetapkan Perjanjian Eselon 2, Eselon 3 dan Eselon 4 serta Penginputan SKP oleh seluruh Pegawai Inspektorat	1. Dokumen Rancangan Perjanjian Kinerja Eselon 2 2. Rancangan Perjanjian Kinerja Eselon 3 dan 4 (dituangkan dalam cascading kinerja) 3. Nota Dinas Laporan Hasil Rekapitulasi Penyelesaian SKP Tahun 2021 dan input SKP 2022
		Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 pada Inspektorat	Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023-2026 telah ditetapkan	RPD Inspektorat 2023-2026

No	Nama Kegiatan	Renaksi	Realisasi	Dokumen Pendukung
		Penyusunan Dokumen Hasil Evaluasi Renja dan Dokumen Kinerja Perangkat Daerah TW IV 2021 pada Inspektorat	Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah TW IV Tahun 2021 dan Hasil evaluasi capaian dokumen kinerja eselon 2,3, 4 TW IV Tahun 2021	1. Laporan hasil evaluasi Renja Inspektorat TW IV Tahun 2021 2. Dokumen evaluasi capaian perjanjian kinerja Eselon 2,3,4 dan fungsional TW IV Tahun 2021
		Penyusunan Dokumen Hasil evaluasi Renja dan Dokumen Kinerja Perangkat Daerah TW I 2022 pada Inspektorat	Tersusunnya hasil evaluasi Renja dan Dokumen Kinerja Perangkat Daerah TW I Tahun 2022 pada Inspektorat	1. Laporan hasil evaluasi Renja Inspektorat TW I Tahun 2022 2. Dokumen evaluasi capaian perjanjian kinerja eselon 2, 3, 4 dan fungsional TW I 2022
		Penyusunan Dokumen Hasil evaluasi Renja dan Dokumen Kinerja Perangkat Daerah TW II 2022 pada Inspektorat	Tersusunnya hasil evaluasi Renja dan Dokumen Kinerja Perangkat Daerah TW II Tahun 2022 pada Inspektorat	1. Laporan hasil evaluasi Renja Inspektorat TW II Tahun 2022 2. Dokumen evaluasi capaian perjanjian kinerja eselon 2, 3, 4 dan fungsional TW II 2022
		Penyusunan Dokumen Hasil evaluasi Renja dan Dokumen Kinerja Perangkat Daerah TW III 2022 pada Inspektorat	Tersusunnya hasil evaluasi Renja dan Dokumen Kinerja Perangkat Daerah TW III Tahun 2022 pada Inspektorat	1. Laporan hasil evaluasi Renja Inspektorat TW II Tahun 2022 2. Dokumen evaluasi capaian perjanjian kinerja eselon 2, 3, 4 dan fungsional TW II 2022
		Penyusunan Dokumen LKIP Perangkat Daerah Tahun 2021 pada Inspektorat	Tersusunnya LKIP Inspektorat Tahun 2021	3. Dokumen LKIP Inspektorat Tahun 2021 4. Screenshot upload LKIP di esr.menpan.go.id

No	Nama Kegiatan	Renaksi	Realisasi	Dokumen Pendukung
		Pelaksanaan reuiu informasi capaian akuntabilitas kinerja pada BAB II LPPD	Hasil reuiu atas capaian akuntabilitas kinerja (LPPD Pemprov DKI Jakarta) oleh Inspektorat	Laporan Hasil Reuiu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
		Pelaksanaan evaluasi Implementasi SAKIP seluruh Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP oleh Inspektorat	1. Laporan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022 dan melalui e-SAKIP. 2. Draft Keputusan Gubernur tentang Penetapan Perangkat Daerah Terbaik dalam Pengimplementasian SAKIP.
3	KSD41 : Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Evaluasi pelaksanaan kegiatan atas Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN Tahun 2021	Terlaksananya audit atas pelaksanaan kegiatan peningkatan infrastruktur pengendalian banjir, peningkatan infrastruktur peningkatan layanan air minum dan peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah tahun 2021	LHP Nomor 10/Irban IV/2022 tahun 5 Januari 2022
		Evaluasi pelaksanaan kegiatan atas Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program	Terlaksananya audit atas penggunaan (pengadaan barang/jasa) dan	Surat Sekretaris Nomor 228/LHP/IX/2022 tanggal 30 September 2022

No	Nama Kegiatan	Renaksi	Realisasi	Dokumen Pendukung
		PEN Tahun 2021 yang dilanjutkan ke Tahun 2022	pertanggungjawaban serta pemanfaatan kegiatan transformasi digital <i>Jakarta Smart City</i> dan pengendalian banjir berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang bersumber dari anggaran pinjaman daerah melalui program PEN TA 2021	
4	KSD60 : Peningkatan Layanan Pengaduan Masyarakat melalui aplikasi Citizen Relation Management (CRM)	Laporan monitoring dan evaluasi terhadap SKPD yang tidak memenuhi kriteria ketuntasan pengaduan masyarakat	Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi terhadap SKPD yang tidak memenuhi kriteria ketuntasan pengaduan masyarakat per Triwulan	Laporan monitoring dan evaluasi terhadap SKPD yang tidak memenuhi kriteria ketuntasan pengaduan masyarakat TW I, TW II, TW III, dan TW IV
5	KSD61 : Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan	Penyelesaian Tindak lanjut hasil pengawasan APIP pada Inspektorat atas LHP yang terbit periode 2019 s.d. 2022	Hasil verifikasi TL RHP APIP oleh Inspektorat dan Itjen Kementerian/Lembaga	Berita Acara Penyelesaian TL LHP APIP
6	KSD62 : Perbaikan Pengelolaan Tenaga Non ASN	Penyusunan evaluasi hasil kajian peta kebutuhan dan standar	Terlaksananya evaluasi hasil kajian peta kebutuhan dan standar biaya	Laporan evaluasi hasil kajian peta kebutuhan dan standar biaya penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP)

No	Nama Kegiatan	Renaksi	Realisasi	Dokumen Pendukung
		biaya penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP)	penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP)	
		Reviu/evaluasi atas pemberian rekomendasi penataan tenaga Non ASN sesuai peta kebutuhan	Terlaksananya reviu atas laporan rekomendasi penataan tenaga Non ASN sesuai peta kebutuhan	Laporan Reviu atas laporan rekomendasi penataan tenaga Non ASN sesuai peta kebutuhan
7	KSD 63 : Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi SPBE tahun 2021 dari Kementerian PAN RB (indikator 39)	Tersedianya layanan pengawasan internal pemerintah berbasis elektronik yang telah memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain	1. Laporan tingkat kematangan layanan pengawasan internal pengawasan 2. Laporan Penyusunan Rancangan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE
		Tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi SPBE tahun 2021 dari Kementerian PAN RB (indikator 21)	Terlaksananya reviu atas profil manajemen risiko SPBE Perangkat Daerah	Nota Dinas Inspektur Provinsi DKI Jakarta kepada Pj Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3398/PA.02.02



C. CAPAIAN SASARAN KHUSUS TAHUN 2022

7

INDIKATOR KINERJA 7

Pelaksanaan penugasan pengawasan atas kegiatan yang dibiayai PEN	Target : 100%	Realisasi : 100%	Capaian : 100%
--	---------------	------------------	----------------

Pada tahun 2022, sesuai dengan Lampiran III dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 103 Tahun 2022 tentang Kebijakan Pengawasan Intern, Semesta Pengawasan, dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Tahun 2022 menetapkan beberapa pelaksanaan penugasan pengawasan atas kegiatan yang dibiayai PEN, yaitu :

1. Audit Penggunaan Pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah pada Diskominfo dengan tujuan meyakini secara memadai, terbatas dan/atau cukup atas ketaatan, kehematan, efisien, dan efektif pencapaian tujuan serta pengendalian risiko dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban program.
2. Audit Penggunaan Pinjaman dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah Tahun 2021 atas:
 - a. Program Infrastruktur Pengendali Banjir dan Infrastruktur Pelayanan Air Minum Pada Dinas Sumber Daya Air
 - b. Program Infrastruktur Transportasi Pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI JakartaDengan tujuan meyakini secara memadai, terbatas dan/atau cukup atas ketaatan, kehematan, efisien, dan efektif pencapaian tujuan serta pengendalian risiko dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban program.

Adapun hasil pelaksanaan kegiatan terdiri dari 3 laporan yaitu :

1. Laporan Hasil Audit atas pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Infrastruktur Pengendalian Banjir, Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Layanan Air Minum dan Peningkatan Infrastruktur Pengelolaan Sampah Tahun 2021 dengan Nomor LHP 10/Irbn IV/I/2022 tanggal 05 Januari 2022.
2. Laporan hasil audit atas kegiatan peningkatan Infrastruktur Pengendalian Banjir Tahun 2022 yang bersumber dari pinjaman daerah melalui program PEN pada Dinas Sumber Daya Air Nomor 154/-1.924/ATN.IV/3.2022 tanggal 10 Maret 2022

3. Laporan hasil Post Audit atas penggunaan (pengadaan barang/jasa) dan pertanggungjawaban serta pemanfaatan kegiatan transformasi Digital *Jakarta Smart City* dan Pengendalian Banjir berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang bersumber dari anggaran pinjaman daerah melalui program PEN Tahun anggaran 2021 Nomor LHP 228/LHP/IX/2022

Tabel 3.12 Sasaran Khusus terkait PEN Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun 2022	Capaian
7	Suksesnya Penyerapan Anggaran Pinjaman PEN 2021 dan Ketercapaian output sesuai KAK	Persentase pelaksanaan penugasan pengawasan atas kegiatan yang dibiayai PEN	100%	100%	100%

8

INDIKATOR KINERJA 8

Pemanfaatan E-Order

Target : 100%

Realisasi : 100%

Capaian : 100%

e-Order merupakan bentuk inovasi guna memasarkan produk pedagang UMKM untuk memudahkan penjual mempromosikan dan menjual hingga sampai ke pembeli. Adapun website e-Order beralamat di <https://eorder-bppbj.jakarta.go.id>. E-Order merupakan hasil kolaborasi Pemprov DKI dengan pedagang UMKM untuk saling membantu menggerakkan pertumbuhan ekonomi ibukota, juga membuka kesempatan kerja bagi pelaku usaha pedagang UMKM. Pelaksanaan e-Order didasarkan pada Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 29 Tahun 2021 tentang Tentang Transaksi Pengadaan Langsung dengan Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil Melalui Sistem e-Order. Adapun formula pengukuran kinerja pelaksanaan e-order ini adalah jumlah Realisasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) rekening makan dan minum rapat, jamuan dan lapangan dibandingkan dengan transaksi di e-order dengan sumber data berupa Data Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) BPKD Kode Rekening Makan dan Minum (Dikecualikan untuk Galon, Kopi, Teh, Gula, dst).

Adapun target dan realisasi terhadap sasaran meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam pengadaan barang dan jasa sebagai berikut.

Tabel 3.13 Sasaran Khusus terkait E-Order Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun 2022	Capaian
8	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam pengadaan barang dan jasa	Persentase Pemanfaatan E-Order	100%	100%	100%

Inspektorat dalam pemanfaatan e-Order selama tahun 2022 untuk penyediaan makanan dan minuman adalah senilai Rp. 264.000.000 dan dibayarkan kepada penyedia dengan tepat waktu.

9

INDIKATOR KINERJA 9

Implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Target : 100%	Realisasi : 100%	Capaian : 100%
---	---------------	------------------	----------------

Rencana strategi komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah dilaksanakan dengan indikator kinerja berupa persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ukuran keberhasilan dari indikator kinerja tersebut berupa :

1. Persentase tersusunnya strategi komunikasi program unggulan atau program umum Perangkat Daerah;
2. Persentase tersusunnya editorial plan sesuai Strategi Komunikasi. Dinas Kominfotik menyusun Editorial Plan lingkup Provinsi;
3. Persentase tersusunnya materi mitigasi krisis dan bahan komunikasi pada saat krisis dalam kurun waktu < 6 jam; dan
4. Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal OPD atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang.

Komunikasi publik yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat dapat dilihat melalui website inspektorat.jakarta.go.id yang salah satunya menyajikan informasi mengenai kegiatan-kegiatan umum dan unggulan selama tahun 2022. Adapun target capaian dan

realisasi terhadap sasaran terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan perangkat daerah sebagai berikut.

Tabel 3.14 Sasaran Khusus terkait Komunikasi Publik Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun 2022	Capaian
9	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan perangkat daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	100%	100%	100%

Adapun kegiatan yang dilakukan komunikasi publik, antara lain sebagai berikut:

Triwulan I

a. Materi Komunikasi Kegiatan Pengawasan Intern (*Internal Audit Activity*)

NO	TANGGAL	JUDUL	MEDIA &TAUTAN	FOTO
1	3 Januari 2022	Fasilitasi entry Meeting Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021	https://www.instagram.com/p/CZiloUep5h-/?utm_medium=copy_link	
2	2 Maret 2022	Pembahasan Rencana Penyusunan Road Map Penerapan Manajemen Risiko Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	TWITTER: https://twitter.com/inspektoratjak/status/1498927198924722178?s=21	
3	2 Maret 2022	Pembahasan Rencana Penyusunan Road Map Penerapan Manajemen Risiko Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	https://www.facebook.com/photo/?fbid=258799219773464&set=a.156065120046875	

NO	TANGGAL	JUDUL	MEDIA & TALUTAN	FOTO
4	2 Maret 2022	Pembahasan Rencana Penyusunan Road Map Penerapan Manajemen Risiko Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	https://www.instagram.com/p/CaY8fOzJCM_/?utm_medium=copy_link	
5	8 Maret 2022	Internalisasi Whistle Blowing System dengan Sistem Pengaduan Terpadu (Sipadu) di Lingkungan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta	https://twitter.com/inspektoratjak/status/1501454021315674112?s=21	
6	8 Maret 2022	Internalisasi Whistle Blowing System dengan Sistem Pengaduan Terpadu (Sipadu) di Lingkungan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta	https://www.instagram.com/p/Ca37vFDpXo7/?utm_medium=copy_link	
7	8 Maret 2022	Internalisasi Whistle Blowing System dengan Sistem Pengaduan Terpadu (Sipadu) di Lingkungan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta	https://www.facebook.com/photo/?fbid=267296782257041&set=a.156065120046875	
8	25 Maret 2022	Sosialisasi WBS dengan Sistem Pengaduan Terpadu (SIPADU) pada Kota Administrai Jakarta Timur	https://www.instagram.com/p/CbokDkPJT_v/?utm_medium=copy_link	

NO	TANGGAL	JUDUL	MEDIA &TAUTAN	FOTO
9	25 Maret 2022	Sosialisasi WBS melalui sistem pengaduan terpadu (SIPADU) di di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur, sebagai wujud komitmen Inspektorat dipimpin oleh Inspektur dan dihadiri Walikota dan Wakil Walikota Kota Admistrasi Jakarta Timur beserta jajaran	https://twitter.com/inspektoratjak/status/1508294753376702472?s=21&t=xcaIteztQoGapaajIONw/Q	
10	28 Maret 2022	Membangun Sinergitas Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, dengan penguatan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), dengan Tema Menghindari Resiko Hukum dan Transaksi Bisnis	https://twitter.com/inspektoratjak/status/1508294949602992129?s=21&t=dR37LFQxoUdS6CvTnytEcQ	
11	28 Maret 2022	Membangun Sinergitas Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, dengan penguatan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), dengan Tema Menghindari Resiko Hukum dan Transaksi Bisnis	https://www.instagram.com/p/CbokLOJriG/?utm_medium=copy_link	

b. Program/Kegiatan Kegiatan Pencegahan Korupsi

NO	TANGGAL	JUDUL	MEDIA &TAUTAN	FOTO
1	13 Januari 2022	Rapat Koordinasi UPPL DKI Jakarta	https://www.instagram.com/p/CYQXakhPv8L/?utm_medium=copy_link	

NO	TANGGAL	JUDUL	MEDIA &TAJUAN	FOTO
2	10 Maret 2022	Inspektorat Provinsi DKI Jakarta melakukan internalisasi Pengendalian Gratifikasi melalui Cetak Gol pada tanggal 11 Maret 2022 yang dihadiri seluruh jajaran Inspektorat Provinsi dan Wilayah	https://twitter.com/inspektoratjak/status/1503183730575540226?s=21	
3	10 Maret 2022	Inspektorat Provinsi DKI Jakarta melakukan internalisasi Pengendalian Gratifikasi melalui Cetak Gol pada tanggal 11 Maret 2022 yang dihadiri seluruh jajaran Inspektorat Provinsi dan Wilayah	https://www.instagram.com/p/CbEJixiPw8A/?utm_medium=copy_link	
4	10 Maret 2022	Pembahasan Kegiatan Saber Pungli Kota Administrasi Jakarta Selatan Triwulan I TA 2022	https://www.instagram.com/p/CbG589Xpk7v/?utm_medium=copy_link	
5	17 Maret 2022	KPK berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang difasilitasi oleh Inspektorat	https://twitter.com/inspektoratjak/status/1504337391087394816?s=21	
6	17 Maret 2022	KPK berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang difasilitasi oleh Inspektorat	https://www.facebook.com/photo/?fbid=268135828839803&set=a.156065120046875	

NO	TANGGAL	JUDUL	MEDIA &TAJUAN	FOTO
7	17 Maret 2022	KPK berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang difasilitasi oleh Inspektorat	https://www.instagram.com/p/CbMYTNGJmcW/?utm_medium=copy_link	
8	21 Maret 2022	Sosialisasi Pedoman Monitoring Center For Prevention (MCP) Tahun 2022 yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK-RI)	https://twitter.com/inspektoratjak/status/1505816462115872768?s=21	
9	21 Maret 2022	Sosialisasi Pedoman Monitoring Center For Prevention (MCP) Tahun 2022 yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK-RI)	https://www.instagram.com/p/CbW7gf2p2JB/?utm_medium=copy_link	
10	22 Maret 2022	sosialisasi gratifikasi pada RSUD Cilincing	https://twitter.com/inspektoratjak/status/1506511941405396993?s=21	
11	22 Maret 2022	Sosialisasi gratifikasi pada RSUD Cilincing	https://www.facebook.com/photo/?fbid=272003751786344&set=a.156065120046875	

NO	TANGGAL	JUDUL	MEDIA &TAJUTAN	FOTO
12	23 Februari 2022	Monitoring Pemberantasan Pungutan Liar pada Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Non TPI Jakarta Barat dan Kantor Samsat Jakarta Barat	FACEBOOK: https://www.facebook.com/photo/?fbid=255227506797302&set=a.156065120046875	
13	23 Februari 2022	Sosialisasi Pungutan Liar pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat	https://www.facebook.com/photo/?fbid=255227960130590&set=a.156065120046875	
14	23 Februari 2022	Monitoring Pemberantasan Pungutan Liar pada Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Non TPI Jakarta Barat dan Kantor Samsat Jakarta Barat	https://www.instagram.com/p/CaY8bkFleDp/?utm_medium=copy_link	
15	23 Februari 2022	Monitoring Pemberantasan Pungutan Liar pada Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Non TPI Jakarta Barat dan Kantor Samsat Jakarta Barat	https://twitter.com/inspektoratjak/status/1497093071875772418?s=21	
16	23 Februari 2022	Sosialisasi Pungutan Liar pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat	https://twitter.com/inspektoratjak/status/1497093167451021319?s=21	
17	23 Februari 2022	Sosialisasi Pungutan Liar pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat	https://www.instagram.com/p/CaY8fOzJCM/?utm_medium=copy_link	

NO	TANGGAL	JUDUL	MEDIA &TAUTAN	FOTO
18	24 Maret 2022	Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur menggelar Rencana Pelaksanaan Satuan Pemberantasan Pungutan Liar (Saber Pungli) tahun 2022 di Posko Saber Pungli Kota Administrasi Jakarta Timur, lantai 7 Blok A, Kantor Wali Kota Jakarta Timur	https://www.instagram.com/p/CbeyDnCPDFX/?utm_medium=share_sheet	

c. Program/Kegiatan Kegiatan Strategis Daerah (KSD)

NO	TANGGAL	JUDUL	MEDIA &TAUTAN	FOTO
1	22 Februari 2022	Paparan Implementasi SAKIP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 dalam Forum Panel Evaluator SAKIP Kementerian RB	TWITTER: https://twitter.com/inspektoratjak/status/1496660365417263105?s=21	
2	22 Februari 2022	Implementasi SAKIP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 dalam Forum Panel Evaluator SAKIP Kementerian RB	INSTAGRAM: https://www.instagram.com/p/CaV48ewPytr/?utm_medium=copy_link	
3	22 Februari 2022	Implementasi SAKIP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 dalam Forum Panel Evaluator SAKIP Kementerian RB	FACEBOOK: https://www.facebook.com/photo/?fbid=254613533525366&set=a.156065120046875	

Triwulan II

a. Materi Komunikasi Kegiatan Pengawasan Intern (*Internal Audit Activity*)

NO	TANGGAL	JUDUL	MEDIA &TAUTAN	FOTO
1	1 April 2022	Inspektorat Berwawasan Bimbingan Teknis Resiko Hukum dan Transaksi Bisnis	Facebook: https://www.facebook.com/photo/?fbid=277575431229176&set=a.156065120046875	

NO	TANGGAL	JUDUL	MEDIA & TAJUTAN	FOTO
2	27 April 2022	Penguatan Inspektorat Provinsi Dki Jakarta Terkait Tindak Lanjut TLHP Itjen Kemendagri Dan Penggunaan Sistem Informasi Pengawasan Inspektorat Jendral (Siwasiat) oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri	<i>Instagram:</i> https://www.instagram.com/p/Cc1teV0pOyE/?igshid=YmMyMTA2M2Y=	
3	27 April 2022	Penguatan Inspektorat Provinsi Dki Jakarta Terkait Tindak Lanjut TLHP Itjen Kemendagri Dan Penggunaan Sistem Informasi Pengawasan Inspektorat Jendral (Siwasiat) oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri	<i>Facebook:</i> https://www.facebook.com/photo/?fbid=294349482885104&set=a.156065120046875	
4	27 April 2022	Penguatan Inspektorat Provinsi Dki Jakarta Terkait Tindak Lanjut TLHP Itjen Kemendagri Dan Penggunaan Sistem Informasi Pengawasan Inspektorat Jendral (Siwasiat) oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri	<i>Twitter:</i> https://twitter.com/inspektoratjak/status/1519154491190579200?s=21&t=H2lo7C1dMYRdNE-MSh3QSA	
5	11 Mei 2022	Inspektorat Berwawasan Pelaksanaan Audit Informasi Teknologi	<i>Facebook:</i> https://www.facebook.com/photo/?fbid=308580511462001&set=a.156065120046875	
6	11 Mei 2022	Inspektorat Berwawasan Pelaksanaan Audit Informasi Teknologi	<i>Instagram:</i> https://www.instagram.com/p/CdqLU_xlpVG/?igshid=YmMyMTA2M2Y=	

NO	TANGGAL	JUDUL	MEDIA &TAUTAN	FOTO
7	11 Mei 2022	Inspektorat Berwawasan Pelaksanaan Audit Informasi Teknologi	Twitter: https://twitter.com/inspektorajak/status/1526551551799853056?s=21&t=fpo8ptHjXD4y1KQh4vNO7Ug	
8	25 Mei 2022	Inspektorat Berwawasan "Komunikasi Ala APIP"	Instagram: https://www.instagram.com/p/CeDhmLep7yS/?igshid=YmMyMTA2M2Y=	
9	25 Mei 2022	Inspektorat Berwawasan "Komunikasi Ala APIP"	Twitter: https://twitter.com/inspektorajak/status/1529355519525527552?s=21&t=15FNYPQzQfVfVTCBuVg	
10	25 Mei 2022	Inspektorat Berwawasan "Komunikasi Ala APIP"	Facebook: https://www.facebook.com/photo/?fbid=313907554262630&set=a.156065120046875	
11	25 Mei 2022	Pengarahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Sosialisasi Sistem Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) oleh BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta pada 25 Mei 2022	FACEBOOK: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbidOvvBgs9zFUmAG6RpaSf15K35WlnrtPrbgxGuz4BzURD6nsJ7N4pejcmfeJEi9DtKwl&id=100069301625848	
12	25 Mei 2022	Pengarahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Sosialisasi Sistem Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) oleh BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta pada 25 Mei 2022	Twitter: https://twitter.com/inspektorajak/status/1530721229136486400?s=21&t=c6Rluhdae6zEIK9lisFhyQ	
13	25 Mei 2022	Pengarahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Sosialisasi Sistem Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) oleh BPKP Perwakilan Provinsi	Instagram: https://www.instagram.com/p/CeH93Jlp560/?igshid=YmMyMTA2M2Y=	

NO	TANGGAL	JUDUL	MEDIA &TAJUTAN	FOTO
		DKI Jakarta pada 25 Mei 2022		
14	8 Juni 2022	Pelaksanaan Pengawasan APIP atas Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Rencana Keuangan Daerah Tahun 2023	Facebook: https://www.facebook.com/photo/?fbid=323302866656432&set=a.156065120046875	
15	8 Juni 2022	Pelaksanaan Pengawasan APIP atas Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Rencana Keuangan Daerah Tahun 2023	Twitter: https://twitter.com/inspektortjak/status/1534754077422551042?s=21&t=1KQptzYTan7N7dzzKXFC-A	
16	8 Juni 2022	Pelaksanaan penguatan SPIP dengan memitigasi resiko-resiko pada UKPD dengan narasumber dari BPKP pada Inspektorat Pembantu Jakarat Utara dan Kep. Seribu serta dihadiri Sudin Pemakaman dan Hutan Kota, Sudin Kominfotik, Sudin Pendidikan 1, 2 tanggal 8 Juni 2022	Facebook: https://www.facebook.com/photo/?fbid=323307019989350&set=a.156065120046875	
17	8 Juni 2022	Pelaksanaan penguatan SPIP dengan memitigasi resiko-resiko pada UKPD dengan narasumber dari BPKP pada Inspektorat Pembantu Jakarat Utara dan Kep. Seribu serta dihadiri Sudin Pemakaman dan Hutan Kota, Sudin Kominfotik, Sudin Pendidikan 1, 2 tanggal 8 Juni 2022	Twitter: https://twitter.com/inspektortjak/status/1534754790735237121?s=21&t=1KQptzYTan7N7dzzKXFC-A	
18	8 Juni 2022	Pelaksanaan penguatan SPIP dengan memitigasi resiko-resiko pada UKPD dengan narasumber dari BPKP pada Inspektorat Pembantu Jakarat Utara dan Kep. Seribu serta dihadiri Sudin Pemakaman dan Hutan Kota, Sudin Kominfotik, Sudin Pendidikan 1, 2 tanggal 8 Juni 2022	Instagram: https://www.instagram.com/p/CekjfpUldOa/?igshid=YmMyMTA2M2Y=	

b. Program/Kegiatan Kegiatan Pencegahan Korupsi

NO	TANGGAL	JUDUL	MEDIA &TAUTAN	FOTO
1	6 April 2022	Sosialisasi SIPADU di Kota Administrasi Jakarta Selatan	Twitter: https://twitter.com/inspektoratjak/status/1511597733337268224?s=21&t=7JBQ57Xhf2ZgKYqzMCfzCQ	
2	6 April 2022	Sosialisasi SIPADU di Kota Administrasi Jakarta Selatan	Instagram: https://www.instagram.com/p/CcABSr5pWSP/?utm_medium=copy_link	
3	6 April 2022	Sosialisasi SIPADU di Kota Administrasi Jakarta Barat	Facebook: https://www.facebook.com/photo?fbid=281594970827222&set=a.156065120046875	
4	6 April 2022	Sosialisasi SIPADU di Kota Administrasi Jakarta Barat	Instagram: https://www.instagram.com/p/CcCjfr4JoHB/?utm_medium=copy_link	
5	6 April 2022	Sosialisasi SIPADU di Kota Administrasi Jakarta Barat	Facebook: https://www.facebook.com/photo/?fbid=281595654160487&set=a.156065120046875	
6	7 April 2022	Sosialisasi SIPADU di Kota Administrasi Jakarta Utara	Facebook: https://www.facebook.com/photo/?fbid=283933907259995&set=a.156065120046875	
7	7 April 2022	Sosialisasi SIPADU di Kota Administrasi Jakarta Utara	Instagram: https://www.instagram.com/p/CcMQPdHvgiS/?igshid=YmMyMTA2M2Y=	

NO	TANGGAL	JUDUL	MEDIA &TAUTAN	FOTO
8	7 April 2022	Sosialisasi SIPADU di Kota Administrasi Jakarta Utara	Twitter: https://twitter.com/inspektoratjak/status/1513319668362412033?s=21&t=64OQ7row2sfKP5To5wS6FQ	
9	14 April 2022	Sosialisasi SIPADU di Kabupaten Kepulauan Seribu	Facebook: https://www.facebook.com/photo/?fbid=288669523453100&set=a.156065120046875	
10	23 Mei 2022	Penyuluhan Pemberantasan Pungutan Liar	INSTAGRAM: https://www.instagram.com/p/CeDhec7JWEM/?igshid=YmMyMTA2M2Y=	
11	23 Mei 2022	Penyuluhan Pemberantasan Pungutan Liar	Twitter: https://twitter.com/inspektoratjak/status/1528959007515639809?s=21&t=1VSNbXl6WaCdEb5v_UG9Q	
12	23 Mei 2022	Penyuluhan Pemberantasan Pungutan Liar	Facebook: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=313124127674306&id=100069301625848	
13	24 Mei 2022	Rapat Evaluasi Kegiatan UPPL Provinsi DKI Jakarta	INSTAGRAM: https://www.instagram.com/p/CeDhietp8tJ/?igshid=YmMyMTA2M2Y=	
14	24 Mei 2022	Rapat Evaluasi Kegiatan UPPL Provinsi DKI Jakarta	Twitter: https://twitter.com/inspektoratjak/status/1529283714253225986?s=21&t=i5FNYPpPQzQFioVoTCBuVg	

NO	TANGGAL	JUDUL	MEDIA &TAUTAN	FOTO
15	24 Mei 2022	Rapat Evaluasi Kegiatan UPPL Provinsi DKI Jakarta	Facebook: https://www.facebook.com/photo?fbid=313734624279923&set=a.156065120046875	
16	27 Mei 2022	Infografis UPG	INSTAGRAM: https://www.instagram.com/p/CeDhqtmpVBe/?igshid=YmMyMTA2M2Y=	
17	27 Mei 2022	Infografis Kegiatan UPG	FACEBOOK: https://www.facebook.com/photo?fbid=316494440670608&set=a.156065120046875	
18	27 Mei 2022	Infografis Kegiatan UPG	TWITTER: https://twitter.com/inspektortjak/status/1530103025401942016?s=21&t=AV9gOO-viUZGPGaYcEBSjQ	
	9 uni 2022	Inspektorat Provinsi DKI Jakarta melakukan Rakor Tim Saber Pungli Intelijen, Pencegahan, Penindakan dan Yustisi UPP DKI Jakarta	Twitter: https://twitter.com/inspektortjak/status/1534755172647604224?s=21&t=1KQptzYTan7N7dztKXFC-A	
		Inspektorat Provinsi DKI Jakarta melakukan Rakor Tim Saber Pungli Intelijen, Pencegahan, Penindakan dan Yustisi UPP DKI Jakarta, pada 09 Juni 2022, yang membahas antara lain: 1. Persiapan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan termasuk kendala yang dihadapi semter 1 2. Rencana Tim UPPI Provinsi akan melaksanakan sosialisasi saber dengan sasarnya	Facebook: https://www.facebook.com/photo?fbid=324063903246995&set=a.156065120046875	

NO	TANGGAL	JUDUL	MEDIA &TAUTAN	FOTO
	15 Juni 2022	Inspektorat Provinsi DKI Jakarta bersama Tim UPPL Provinsi melaksanakan sosialisasi saber pungli atas saran hasil lidik dari sub unit intelejen terkait pelayanan administrasi kependudukan pada Kecamatan Duren Sawit pada 7 kelurahan sasarannya LMK, RT, RW dan Tokoh masyarakat, dengan narasumber kejaksaan dan kepolisian.	Facebook: https://www.facebook.com/photo/?fbid=328050699514982&set=a.156065120046875	
	15 Juni 2022	Inspektorat Provinsi DKI Jakarta bersama Tim UPPL Provinsi melaksanakan sosialisasi saber pungli atas saran hasil lidik dari sub unit intelejen terkait pelayanan administrasi kependudukan pada Kecamatan Duren Sawit pada 7 kelurahan sasarannya LMK, RT, RW dan Tokoh masyarakat, dengan narasumber kejaksaan dan kepolisian.	Twitter: https://twitter.com/inspektoratjak/status/1537256843311222785?s=21&t=F8sZZJ4rWxRP9Jyet6vkGA	

c. Program/Kegiatan Kegiatan Strategis Daerah (KSD)

NO	TANGGAL	JUDUL	MEDIA &TAUTAN	FOTO
1	5 April 2022	SAKIP & RB Award	Facebook: https://www.facebook.com/photo?fbid=280285840958135&set=a.156065120046875	
2	5 April 2022	SAKIP & RB Award	Instagram: https://www.instagram.com/p/Cb9Zfp8pAB-/?utm_medium=copy_link	

NO	TANGGAL	JUDUL	MEDIA &TAJUTAN	FOTO
3	5 April 2022	SAKIP & RB Award	Twitter: https://twitter.com/inspektoratjak/status/1511231634867372037?s=21&t=zSoarlm230yvozENGKPeTg	
4	11 April 2022	Penandatanganan Perjanjian Kineja Inspektorat	Instagram: https://www.instagram.com/p/CcRXWwQPpxl/?igshid=YmMyMTA2M2Y=	
5	11 April 2022	Penandatanganan Perjanjian Kineja Inspektorat	Twitter: https://twitter.com/inspektoratjak/status/1514033516568522755?s=21&t=PR42g__jJNWFYb4T5AWew	
6	28 April 2022	Penyerahan Gubernur Atas Pencapaian SAKIP	Twitter: https://twitter.com/inspektoratjak/status/1519607688547954690?s=21&t=MZAO24D2y8WdERJF5RJONQ	
7	28 April 2022	Penyerahan Gubernur Atas Pencapaian SAKIP	Instagram: https://www.instagram.com/p/Cc40bVDJm8n/?igshid=YmMyMTA2M2Y=	
8	28 April 2022	Penyerahan Gubernur Atas Pencapaian SAKIP	Facebook: https://www.facebook.com/photo/?fbid=295115006141885&set=a.156065120046875	

Triwulan III

a. Materi Komunikasi Kegiatan Pengawasan Intern (*Internal Audit Activity*)

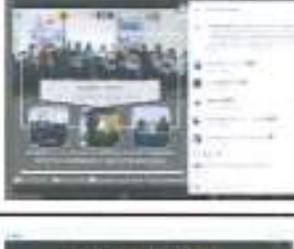
NO	TANGGAL	JUDUL	MEDIA &TAUTAN	FOTO
1	6 Juli 2022	Podcast Opini WTP (Wajar Tanpa Pegecualian)	https://www.facebook.com/photo/?fbid=341596921493693&set=a.156065120046875	
2	6 Juli 2022	Podcast Opini WTP (Wajar Tanpa Pegecualian)	https://www.instagram.com/p/CfoAPVApzN_/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D	
3	2 Agustus 2022	Inspektorat Berwawasan "Teknik Audit Pengelolaan Barang Milik Daerah"	https://www.facebook.com/photo/?fbid=360052612981457&set=a.156065120046875	
4	2 Agustus 2022	Inspektorat Berwawasan "Teknik Audit Pengelolaan Barang Milik Daerah"	https://www.instagram.com/p/CgvgQ_bICu_/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D	
5	2 Agustus 2022	Inspektorat Berwawasan "Teknik Audit Pengelolaan Barang Milik Daerah"	https://twitter.com/inspektoratjak/status/1554359524311863297?s=21&t=heXZCK134_iEY786uPYy3g	
6	10 Agustus 2022	Inspektorat Berwawasan "Pengelolaan Arsip Dinamis"	https://www.instagram.com/p/ChEYVXMpDgr/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D	

NO	TANGGAL	JUDUL	MEDIA &TAUTAN	FOTO
7	10 Agustus 2022	Inspektorat Berwawasan "Pengelolaan Arsip Dinamis"	https://twitter.com/inspektoratjak/status/1557260200570404870?s=21&t=-TXAFKG1tn9dYpFnf84CXA	
8	10 Agustus 2022	Inspektorat Berwawasan "Pengelolaan Arsip Dinamis"	https://www.instagram.com/p/ChEYVXMpDgr/	

b. Program/Kegiatan Kegiatan Pencegahan Korupsi

NO	TANGGAL	JUDUL	MEDIA &TAUTAN	FOTO
1	12 Juli 2022	Kegiatan Sosialisasi Anti Korupsi: Gratifikasi dan Whistleblowing pada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta	https://www.facebook.com/photo/?fbid=348583817461670&set=a.156065120046875	
2	12 Juli 2022	Kegiatan Sosialisasi Anti Korupsi: Gratifikasi dan Whistleblowing pada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta	https://www.instagram.com/p/CgDqMT3pWml/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D	
3	20 Juli 2022	Sosialisasi Saber Pungli di Kota Administrasi Jakarta Selatan	https://www.facebook.com/photo/?fbid=351870073799711&set=a.156065120046875	
4	20 Juli 2022	Sosialisasi Saber Pungli di Kota Administrasi Jakarta Selatan	https://twitter.com/inspektoratjak/status/1549664231569899520?s=21&t=g8tjSAAInUUOmW_zFNy6w	

NO	TANGGAL	JUDUL	MEDIA &TAUTAN	FOTO
5	20 Juli 2022	Sosialisasi Saber Pungli di Kota Administrasi Jakarta Selatan	https://www.instagram.com/p/CgOgSilpuA3/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D	
6	12 Agustus 2022	Inspektorat Provinsi DKI Jakarta mendapat Penghargaan Inovasi Pengawasan Birokrasi tanpa Pungutan Liar Tahun 2022 oleh Masyarakat Anti Pungutan Liar (MAPL)	https://www.facebook.com/photo/?fbid=366907388962646&set=a.156065120046875	
7	12 Agustus 2022	Inspektorat Provinsi DKI Jakarta mendapat Penghargaan Inovasi Pengawasan Birokrasi tanpa Pungutan Liar Tahun 2022 oleh Masyarakat Anti Pungutan Liar (MAPL)	https://twitter.com/inspektoratjak/status/1560085461103968256?s=21&t=OjrFYAOMDaC4JiRfTcIOAw	
8	12 Agustus 2022	Inspektorat Provinsi DKI Jakarta mendapat Penghargaan Inovasi Pengawasan Birokrasi tanpa Pungutan Liar Tahun 2022 oleh Masyarakat Anti Pungutan Liar (MAPL)	https://www.instagram.com/p/ChRSBLNp-vb/	
9	15 Agustus 2022	Pengaktifan Bus Anti Korupsi dan Sosialisasi Anti Korupsi lokasi pertama adalah pada SMAN 21 Jakarta Timur	https://www.facebook.com/photo?fbid=370768788576506&set=pcb.370769215243130	
10	15 Agustus 2022	Pengaktifan Bus Anti Korupsi dan Sosialisasi Anti Korupsi lokasi pertama adalah pada SMAN 21 Jakarta Timur	https://twitter.com/inspektoratjak/status/1560086360484376576?s=21&t=OjrFYAOMDaC4JiRfTcIOAw	
11	15 Agustus 2022	Pengaktifan Bus Anti Korupsi dan Sosialisasi Anti Korupsi lokasi pertama adalah pada SMAN 21 Jakarta Timur	https://www.instagram.com/p/ChRSFc_JbOm/	

NO	TANGGAL	JUDUL	MEDIA &TAUTAN	FOTO
12	16 Agustus 2022	Road Show Bus Anti Korupsi dan Sosialisasi Anti Korupsi pada SMKN 26 Jakarta Timur.	https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0VgpEqZz2AE TaXISQFaQzEo3T1Qmy9okVm7u9VNVuEcoefPm8nsftfBNerakkd5sl&id=100069301625848	
13	16 Agustus 2022	Road Show Bus Anti Korupsi dan Sosialisasi Anti Korupsi pada SMKN 26 Jakarta Timur.	https://twitter.com/inspektokratjak/status/1560086434962636800?s=21&t=OjrFYAOMDaC4jIRftcIOAw	
14	16 Agustus 2022	Road Show Bus Anti Korupsi dan Sosialisasi Anti Korupsi pada SMKN 26 Jakarta Timur.	https://www.instagram.com/p/ChZgzmwJV9r/	
15	18 Agustus 2022	Road Show Bus Anti Korupsi dan Sosialisasi Anti Korupsi pada SMPN 103 Jakarta Timur	https://www.facebook.com/photo/?fbid=371459788507406&set=a.156065120046875	
16	18 Agustus 2022	Road Show Bus Anti Korupsi dan Sosialisasi Anti Korupsi pada SMPN 103 Jakarta Timur	https://twitter.com/inspektokratjak/status/1561655713440886785?s=21&t=_bs3yaT3garIRIYaThuMyw	
17	18 Agustus 2022	Road Show Bus Anti Korupsi dan Sosialisasi Anti Korupsi pada SMPN 103 Jakarta Timur	https://www.instagram.com/p/ChbOW8buvHZK/	
18	19 Agustus 2022	Road Show Bus Anti Korupsi dan Sosialisasi Anti Korupsi pada SDN Jati Negara Kaum 01/03	https://www.facebook.com/photo/?fbid=373392454980806&set=a.156065120046875	

NO	TANGGAL	JUDUL	MEDIA &TAUTAN	FOTO
19	19 Agustus 2022	Road Show Bus Anti Korupsi dan Sosialisasi Anti Korupsi pada SDN Jati Negara Kaum 01/03	https://twitter.com/inspektoratjak/status/1561655848635895808?s=21&t=_bs3yaT3garIRIYaThuMyw	
20	19 Agustus 2022	Road Show Bus Anti Korupsi dan Sosialisasi Anti Korupsi pada SDN Jati Negara Kaum 01/03	https://www.instagram.com/p/ChjKcKOpNDC/	
21	19 Agustus 2022	Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi bersama KPK RI, pada 19 Agustus 2022.	https://www.facebook.com/photo?fbid=373392908314094&set=a.156065120046875	
22	19 Agustus 2022	Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi bersama KPK RI, pada 19 Agustus 2022.	https://twitter.com/inspektoratjak/status/1561655995142897664?s=21&t=_bs3yaT3garIRIYaThuMyw	
23	19 Agustus 2022	Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi bersama KPK RI, pada 19 Agustus 2022.	https://www.instagram.com/p/ChjKMmqpHLd/	
24	22 Agustus 2022	Road Show Bus Anti Korupsi dan Sosialisasi Anti Korupsi pada Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur	https://www.facebook.com/photo/?fbid=374925564827495&set=a.156065120046875	
25	22 Agustus 2022	Road Show Bus Anti Korupsi dan Sosialisasi Anti Korupsi pada Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur	https://www.instagram.com/p/ChojWBdpc-g/	

NO	TANGGAL	JUDUL	MEDIA &TAUTAN	FOTO
26	September 2022	Survei Penilaian Integritas adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh KPK	https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0qUJQCZEK8CUu4ikh614RZ3g9Mgs7Nxsd4YDYKpgpdVij6ute19HMuYHCYRkppeWll&id=100069301625848	
27	September 2022	Survei Penilaian Integritas adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh KPK	https://www.instagram.com/p/Cibpok2pcDR/	

c. Program/Kegiatan Kegiatan Strategis Daerah (KSD)

NO	TANGGAL	JUDUL	MEDIA &TAUTAN	FOTO
1	8 Juli 2022	Rapat Persiapan Evaluasi Reformasi Birokrasi dan SAKIP Tahun 2022 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & RB	https://twitter.com/inspektortjak/status/1556784733883105281?s=21&t=C2Nei1Zwh48nMuWlpXTzjg	
2	8 Juli 2022	Rapat Persiapan Evaluasi Reformasi Birokrasi dan SAKIP Tahun 2022 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & RB	https://www.facebook.com/photo/?fbid=364590429194342&set=a.156065120046875	
3	8 Juli 2022	Rapat Persiapan Evaluasi Reformasi Birokrasi dan SAKIP Tahun 2022 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & RB	https://www.instagram.com/p/ChBw26pUfq/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D	
4	11 Agustus 2022	Entry meeting Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022	https://www.facebook.com/photo/?fbid=366004615719590&set=a.156065120046875	

NO	TANGGAL	JUDUL	MEDIA &TAUTAN	FOTO
5	11 Agustus 2022	Entry meeting Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022	https://twitter.com/inspektoratjak/status/1560085286193070080?s=21&t=OjrFYAOMDaC4JiRfTcIOAw	
6	11 Agustus 2022	Entry meeting Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022	https://www.instagram.com/p/ChG8WZ9JdM-/	
7	18 Agustus 2022	Kick Off Meeting Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi	https://www.facebook.com/photo/?fbid=370770808576304&set=a.156065120046875	
8	18 Agustus 2022	Kick Off Meeting Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi	https://twitter.com/inspektoratjak/status/1560086577740939264?s=21&t=OjrFYAOMDaC4JiRfTcIOAw	
9	18 Agustus 2022	Kick Off Meeting Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi	https://www.instagram.com/p/ChZg4ctpZ3T/	

Triwulan IV

a. Materi Komunikasi Kegiatan Pengawasan Intern (*Internal Audit Activity*)

NO	TANGGAL	JUDUL	MEDIA &TAUTAN	FOTO
1	21 Oktober 2022	Exit meeting Inspektorat Aceh selaku tim telaah sejawat ekstern 2022 pada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta	https://www.facebook.com/photo/?fbid=419272360392815&set=a.156065120046875	
2	21 Oktober 2022	Exit meeting Inspektorat Aceh selaku tim telaah sejawat ekstern 2022 pada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta	https://www.instagram.com/p/Cj-RLNDpaMT/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D	
3	25 Oktober 2022	Inspektur Provinsi DKI Jakarta sebagai narasumber pada Workshop Persiapan Pemeriksaan Kinerja Terinci atas Efektifitas Sistem Pencegahan Korupsi dan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) di BPK RI	https://www.facebook.com/photo/?fbid=422527626733955&set=a.156065120046875	
4	25 Oktober 2022	Inspektur Provinsi DKI Jakarta sebagai narasumber pada Workshop Persiapan Pemeriksaan Kinerja Terinci atas Efektifitas Sistem Pencegahan Korupsi dan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) di BPK RI	https://twitter.com/inspektoratjak/status/1585441016311586816?s=46&t=OqxH7XYyP67olmUr7e-cSQ	
5	25 Oktober 2022	Inspektur Provinsi DKI Jakarta sebagai narasumber pada Workshop Persiapan Pemeriksaan Kinerja Terinci atas Efektifitas Sistem Pencegahan Korupsi dan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) di BPK RI	https://www.instagram.com/p/CkMwyTCppLf/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D	
6	30 November 2022	Inspektorat Provinsi DKI Jakarta melaksanakan Acara Pengarahan Sekretaris Daerah Atas Kegiatan Pembangunan Fisik / Konstruksi	https://www.instagram.com/p/ClpWdHTvQnQ/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D	

NO	TANGGAL	JUDUL	MEDIA &TAUTAN	FOTO
		Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2022		
7	12 Desember 2022	Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK, merupakan hal penting sebagai upaya peningkatan Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	https://www.instagram.com/p/CmD5laNpLaa/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D	
8	12 Desember 2022	Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK, merupakan hal penting sebagai upaya peningkatan Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	https://twitter.com/inspektoratjak/status/1602216735524126721?s=46&t=lfHm8X_wMdCe2RxZEsOywwA	
9	12 Desember 2022	Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK, merupakan hal penting sebagai upaya peningkatan Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02LaxWTxRUeMNRFEThqEnysi1Bt5Wx3Rj9ai3wYjCTprCtyoxg5gd49PmRRjH8Tol&id=100069301625848&sfn=wiwspwa&mibextid=RUBZ1f	

b. Program/Kegiatan Kegiatan Pencegahan Korupsi

NO	TANGGAL	JUDUL	MEDIA &TAUTAN	FOTO
1	1 Oktober 2022	Informasi Survei Penilaian Integritas	https://www.instagram.com/p/C1bpok2pcDR/?igshid=NDc0ODYOMjQ%3D	
2	14 Oktober 2022	Inspektorat Provinsi DKI Jakarta melakukan Road Show Bus Anti Korupsi dan Sosialisasi Anti Korupsi sebagai Pendukung Gerakan Anti Korupsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	https://www.facebook.com/photo/?fbid=413554624297922&set=a.156065120046875	

NO	TANGGAL	JUDUL	MEDIA &TAUTAN	FOTO
3	14 Oktober 2022	Inspektorat Provinsi DKI Jakarta melakukan Road Show Bus Anti Korupsi dan Sosialisasi Anti Korupsi sebagai Pendukung Gerakan Anti Korupsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	https://www.instagram.com/p/Cj5lv0zJhib/?igshid=NDRkN2NkYzU%3D	
4	20 Oktober 2022	Inspektorat Provinsi DKI Jakarta melakukan Road Show Bus Anti Korupsi dan Sosialisasi Anti Korupsi sebagai Pendukung Gerakan Anti Korupsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dilaksanakan di SMK N 57 Jakarta	https://www.instagram.com/p/Cj62fAPJkMu/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D	
5	20 Oktober 2022	Inspektorat Provinsi DKI Jakarta melakukan Road Show Bus Anti Korupsi dan Sosialisasi Anti Korupsi sebagai Pendukung Gerakan Anti Korupsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dilaksanakan di SMK N 57 Jakarta	https://www.facebook.com/photo?fbid=418205163832868&set=a.156065120046875&_rdc=1&_rdr	
6	26 Oktober 2022	Inspektorat Provinsi DKI Jakarta melakukan Road Show Bus Anti Korupsi dan Sosialisasi Anti Korupsi sebagai pendukung Gerakan Anti Korupsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	https://twitter.com/inspektoratjak/status/1585444880771272704?s=46&t=OqxH7XYyP67oImUr7e-c5Q	
7	26 Oktober 2022	Inspektorat Provinsi DKI Jakarta melakukan Road Show Bus Anti Korupsi dan Sosialisasi Anti Korupsi sebagai pendukung Gerakan Anti Korupsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	https://www.instagram.com/p/CkMxBjepmMU/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D	
8	26 Oktober 2022	Inspektorat Provinsi DKI Jakarta melakukan Road Show Bus Anti Korupsi dan Sosialisasi Anti Korupsi sebagai pendukung Gerakan Anti Korupsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0FVjKL7kBKH6kdNFoV1FrD6JcU749qk1kEaELGDT1jRjqbDTC6BHU8K74J9Pn4fm9I&id=100069301625848&_rdc=1&_rdr	

NO	TANGGAL	JUDUL	MEDIA &TAUTAN	FOTO
9	3 November 2022	Road Show Anti Korupsi di laksanakan oleh Inspektur Pembantu Kota Jakarta Utara di SMA 56	https://www.youtube.com/watch?v=9vOQfFkXeuM	
10	4 November 2022	Gebyar anti korupsi SMAN Negeri 13 "road show bus anti korupsi"	https://www.youtube.com/watch?v=V8djVICO_cQ	
11	4 November 2022	Puncak acara gebyar anti korupsi Kota Adm. Jakarta Utara yang diFasilitasi oleh Inspektorat Pembantu Kota Jakarta Utara	https://www.instagram.com/reel/CkieGjrJ5Fv/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D	
12	4 November 2022	Puncak Acara Gebyar Anti Korupsi Jakarta Utara	https://www.facebook.com/watch/?v=1523549144813127&extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GKOT-GK1C&ref=sharing	
13	4 November 2022	Puncak Acara Gebyar Anti Korupsi Jakarta Utara	https://twitter.com/kotajakut/status/1588530765096452096?t=2tXa7OeON4Dv_j1ZJdw90g&s=19	
14	4 November 2022	Inspektorat Provinsi DKI Jakarta melakukan Kegiatan Gebyar Anti Korupsi melalui Road Show Bus Anti Korupsi dan Sosialisasi Anti Korupsi di Jakarta Utara	https://www.instagram.com/p/CkhPp1fvgwU/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D	
15	4 November 2022	Inspektorat Provinsi DKI Jakarta melakukan Kegiatan Gebyar Anti Korupsi melalui Road Show Bus Anti Korupsi dan Sosialisasi Anti Korupsi di Jakarta Utara	https://www.facebook.com/photo/?fbid=430722915914426&set=a.156065120046875	

NO	TANGGAL	JUDUL	MEDIA &TAUTAN	FOTO
16	4 November 2022	Inspektorat Provinsi DKI Jakarta melakukan Kegiatan Gebyar Anti Korupsi melalui Road Show Bus Anti Korupsi dan Sosialisasi Anti Korupsi di Jakarta Utara	https://twitter.com/inspektoratjak/status/1589089248711708673?s=12&t=p3GS6lydghpl5uijz5rKqQ	
17	8 November 2022	Inspektorat Provinsi DKI Jakarta memfasilitasi rapat koordinasi membahas Konsep Hari Anti Korupsi Sedunia Hakordia) Tahun 2022 bersama KPK. Yang bertema "Indonesia Pulih Bersatu Lawan Korupsi".	https://www.facebook.com/photo/?fbid=432837969036254&set=a.156065120046875&_rdc=1&_rdr	
18	8 November 2022	Inspektorat Provinsi DKI Jakarta memfasilitasi rapat koordinasi membahas Konsep Hari Anti Korupsi Sedunia Hakordia) Tahun 2022 bersama KPK. Yang bertema "Indonesia Pulih Bersatu Lawan Korupsi".	https://www.instagram.com/p/CkuUNkdpz25/?igshid=YmMyMTA2MzY%3D	
19	16 November 2022	Bus kampanye anti korupsi. Kendaraan yang dirancang khusus itu terparkir di halaman SMPN 229 Kebon Jeruk	https://www.instagram.com/p/CIBsYnDJ_Lp/?igshid=MDJmNzVkMjY%3D	
20	16 November 2022	Bus kampanye anti korupsi. Kendaraan yang dirancang khusus itu terparkir di halaman SMPN 229 Kebon Jeruk	https://www.instagram.com/p/CIBuY4Jbsa/?igshid=MDJmNzVkMjY%3D	
21	18 November 2022	Festival Patriot Anti Korupsi di Rusun Pesakih oleh Inspektorat Kota Ad. Jakarta Barat	https://www.instagram.com/p/CIFVuDFvHgF/?igshid=MDJmNzVkMjY%3D	
22	19 November 2022	Inspektorat DKI Gelar Festival Patriot Anti Korupsi	https://m.beritajakarta.id/video/play/29557/inspektorat-dki-gelar-festival-patriot-anti-korupsi	

NO	TANGGAL	JUDUL	MEDIA &TAUTAN	FOTO
23	19 November 2022	Inspektorat Provinsi DKI Jakarta melakukan Kegiatan Gebyar Anti Korupsi melalui Road Show Bus Anti Korupsi dan Festival Patriot Anti Korupsi Kota Administrasi Jakarta Barat.	https://www.instagram.com/p/C1lm3ijp3wa/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D	
24	19 November 2022	Inspektorat Provinsi DKI Jakarta melakukan Kegiatan Gebyar Anti Korupsi melalui Road Show Bus Anti Korupsi dan Festival Patriot Anti Korupsi Kota Administrasi Jakarta Barat.	https://www.facebook.com/photo/?fbid=440761484910569&set=a.156065120046875&_rdc=1&_rdr	
25	22 November 2022	Dunia usaha bebas dari Korupsi dengan KPK	https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbidONz5gKGDtzNCDKQ9MSFUJUMjmRW4hwnkZqDqUcM67WvpKroSPjzoBJ6TsH6RXpTbAl&id=100069301625848	
26	22 November 2022	Inspektorat Provinsi DKI Jakarta pada hari ini melakukan "KOORDINASI PENCEGAHAN KORUPSI DALAM DUNIA USAHA " Sebagai tindak lanjut dari Pasal 6 Huruf D Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002	https://www.youtube.com/watch?v=8gX7ajPW4dk	
27		Seminar "KOORDINASI PENCEGAHAN KORUPSI DALAM DUNIA USAHA "	https://www.instagram.com/p/C1QfcRdJrOA/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D	
28	13 Desember 2022	Kepulauan Seribu gaung slogan untuk cegah ASN tersangkut korupsi	https://www.antarane.ws.com/berita/3302043/kepulauan-seribu-gaung-slogan-untuk-cegah-asn-tersangkut-korupsi?utm_source=antaranews&utm_medium=mobile&utm_campaign=top_category	

NO	TANGGAL	JUDUL	MEDIA &TAUTAN	FOTO
29	15 Desember 2022	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkolaborasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan Koordinasi Pencegahan Korupsi Tahun 2022 yang diinisiasi oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta	https://www.instagram.com/p/CmLLNpgvgiw/?igshid=MDJmNzVkMjY%3D	
30	15 Desember 2022	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkolaborasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan Koordinasi Pencegahan Korupsi Tahun 2022 yang diinisiasi oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta	https://www.instagram.com/p/CmLLNpgvgiw/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D	
31	15 Desember 2022	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkolaborasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan Koordinasi Pencegahan Korupsi Tahun 2022 yang diinisiasi oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta	https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbidOTpscZNqV1npiR1eXdvVoXdQWwHtM5ub8doULJGpPAAwsRkBu6J7VUzz75StzZMZeI&id=100069301625848&sfnsn=mo	
32		Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkolaborasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan Koordinasi Pencegahan Korupsi Tahun 2022 yang diinisiasi oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.	https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbidO2eM2epTeAPHzgIvtXvUoj4nBhvmn5CPcK6wUws8D6ysTUPAwXDooScuuv2Mx2tvPjI&id=100069301625848&sfnsn=mo	
33		Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkolaborasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan Koordinasi Pencegahan Korupsi Tahun 2022 yang diinisiasi oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.	https://twitter.com/inspektoratjak/status/1603245856743772162?s=46&t=77ZmxXSxQAeWDM-Wbl7wJA	
34	20 Desember 2022	Inspektorat Provinsi DKI Jakarta bersama KPK RI melakukan Kegiatan Pendidikan Antikorupsi Bagi Komunitas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Taman Margasatwa Ragunan	https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbidOAuBnaF14n2NHRqFpwMpnYBEgUmRqmD141wpP3j1gPFAWEwMMjZ7PitLwFWPpt7REI&id=100069301625848&sfnsn=mo	

NO	TANGGAL	JUDUL	MEDIA &TAUTAN	FOTO
35	20 Desember 2022	Inspektorat Provinsi DKI Jakarta bersama KPK RI melakukan Kegiatan Pendidikan Antikorupsi Bagi Komunitas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Taman Margasatwa Ragunan	https://twitter.com/inspektoratjak/status/1605144453508800512?s=46&t=ZaRufvZ2qwZF3pMvW1giuw	
36	20 Desember 2022	Inspektorat Provinsi DKI Jakarta bersama KPK RI melakukan Kegiatan Pendidikan Antikorupsi Bagi Komunitas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Taman Margasatwa Ragunan	https://www.instagram.com/p/CmYt3UpclV/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D	

c. Program/Kegiatan Kegiatan Strategis Daerah (KSD)

NO	TANGGAL	JUDUL	MEDIA &TAUTAN	FOTO
1	23 November 2022	Rapat pleno evaluasi sakin Tahun 2022	https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02mqgB1N53eu3295q1BmULmwPCgkcu6eEKK455yFjQEDHom6HrcVceT4waPJ5cpaki&id=100069301625848&sfnsn=mo	
2	23 November 2022	Inspektorat Provinsi DKI Jakarta melaksanakan Rapat Pleno Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah. Dan Penguatan dalam evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021	https://www.instagram.com/p/CITbwxTpPOf/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D	
3	23 November 2022	Rapat pleno Evaluasi sakin Perangkat daerah	https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02mqgB1N53eu3295q1BmULmwPCgkcu6eEKK455yFjQEDHom6HrcVceT4waPJ5cpaki&id=100069301625848&sfnsn=mo	

NO	TANGGAL	JUDUL	MEDIA & TALUTAN	FOTO
4	23 November 2022	Inspektorat Provinsi DKI Jakarta melaksanakan Rapat Pleno Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022.	https://www.instagram.com/p/CiddJ1WJLUg/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D	

10

INDIKATOR KINERJA 10

Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022	Target : 100%	Realisasi : 100%	Capaian : 100%
--	---------------	------------------	----------------

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Inspektorat Provinsi sebagai evaluator telah melakukan evaluasi implementasi SAKIP Tahun 2022 pada 41 (empat puluh satu) Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk mengetahui sejauhmana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan seluruh Perangkat Daerah lebih berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan sebagai dukungan implementasi SAKIP Perangkat Daerah.

Adapun hasil evaluasi atas Penilaian Mandiri Implementasi SAKIP oleh Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta sesuai surat Inspektur kepada kepada Pj. Gubernur DKI Jakarta Nomor 3417/PA.02.02 perihal Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 3.15 Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022

No	Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP 2022	
		Nilai	Predikat
1	Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Provinsi DKI Jakarta	97,56	AA

No	Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKP 2022	
		Nilai	Predikat
2	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta	97,11	AA
3	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta	96,81	AA
4	Inspektorat Provinsi DKI Jakarta	96,68	AA
5	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta	96,66	AA
6	Kota Administrasi Jakarta Pusat	96,66	AA
7	Kota Administrasi Jakarta Timur	96,41	AA
8	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta	96,26	AA
9	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta	96,01	AA
10	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta	95,31	AA
11	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta	95,31	AA
12	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta	95,01	AA
13	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta	94,41	AA
14	Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta	94,41	AA
15	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	94,41	AA
16	Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta	94,26	AA
17	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta	93,51	AA
18	Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta	93,51	AA
19	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta	93,51	AA
20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta	93,51	AA
21	Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta	93,51	AA
22	Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta	92,91	AA
23	Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta	92,91	AA
24	Kota Administrasi Jakarta Selatan	92,91	AA
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta	92,91	AA
26	Kota Administrasi Jakarta Utara	92,91	AA
27	Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta	92,91	AA

No	Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP 2022	
		Nilai	Predikat
28	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta	92,71	AA
29	Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta	92,61	AA
30	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta	92,45	AA
31	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta	92,35	AA
32	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi DKI Jakarta	92,30	AA
33	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta	92,01	AA
34	Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta	92,01	AA
35	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta	91,91	AA
36	Kota Administrasi Jakarta Barat	91,66	AA
37	Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta	91,56	AA
38	Badan Pelayanan Pengadaan Barang Jasa Provinsi DKI Jakarta	91,56	AA
39	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta	91,56	AA
40	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta	91,26	AA
41	Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta	91,11	AA
	Nilai Rata-rata	93,79	AA

Adapun target capaian dan realisasi terhadap sasaran terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut :

Tabel 3.16 Sasaran Khusus terkait Implementasi SAKIP Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun 2022	Capaian
10	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	Predikat Perangkat Daerah Tahun 2022	AA (91)	AA (96,68)	106,24%

Berdasarkan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP di Inspektorat terdapat rekomendasi untuk lebih mengaktifkan penerapan budaya kinerja, yaitu :

1. Agar dalam menyusun dokumen laporan kinerja dilengkapi dengan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional,

apabila tidak ada perbandingan dengan level nasional perlu diinformasikan di dalam bagian LKIP.

2. Agar dalam menyusun dokumen laporan kinerja menginformasikan analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.
3. Agar melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang pada tahun 2023 dengan membuat SK Tim/Surat Tugas dalam kaitan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal Inspektorat Provinsi DKI Jakarta selaku perangkat daerah.

11

INDIKATOR KINERJA 11

Peningkatan penggunaan e-Office dalam kegiatan administrasi persuratan	Target : 100%	Realisasi : 100%	Capaian : 100%
--	---------------	------------------	----------------

Salah satu penerapan teknologi informasi di Pemprov DKI Jakarta adalah dengan pengembangan aplikasi e-Office persuratan digital dari tahun 2018. Penggunaan e-office ini merujuk pada Permenpan RB No. 6 Tahun 2011 tentang "Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah" dengan tujuan agar dapat meningkatkan kinerja birokrasi serta perbaikan pelayanan menuju terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu juga mendukung peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan; terwujudnya percepatan reformasi birokrasi, terciptanya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antar pemerintah; dan juga memperoleh kemudahan dalam pengelolaan dokumen naskah dinas dan juga penggunaannya. Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ini Pemprov DKI sudah menggunakan e-office dalam pengelolaan tata naskah dinas. *Dasar hukum teknis pelaksanaan e-office di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta salah satunya yaitu Instruksi Gubernur Nomor 117 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Uji Coba dan Persiapan Penerapan Tata Kelola Persuratan Melalui Aplikasi Layanan E-office.*

Indikator pengukuran untuk sasaran peningkatan penggunaan e-office dalam kegiatan administrasi persuratan yaitu jumlah surat masuk sama dengan Jumlah surat terdisposisi / terproses pada hari yang sama. Pengecekan dan pelaporan dapat dimonitoring dengan menggunakan fitur "Laporan Surat Masuk / Surat Keluar atau Disposisi Masuk dan Disposisi Keluar yang ada pada e-office". Diperlukan penentuan penanggung jawab akun

e-office di setiap SKPD. Jumlah surat belum terdisposisi/terproses yang terdapat pada fitur "Surat Masuk" di akun E-Office SKPD akan mempengaruhi TKD dari SKPD tersebut.

Adapun target dan realisasi capaian sasaran peningkatan penggunaan e-Office dalam kegiatan administrasi persuratan sebagai berikut.

Tabel 3.17 Sasaran Khusus terkait e-Office Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun 2022	Capaian
11	Peningkatan penggunaan e-Office dalam kegiatan administrasi persuratan	Jumlah Surat atau Nota Dinas masuk ke akun seluruh SKPD yang terproses/terdisposisi	100%	100%	100%

Selama tahun 2022, dalam penerapan e-Office Inspektorat telah mengelola surat masuk sebanyak 3677 dan terdisposisi sebanyak 984 surat.

12

INDIKATOR KINERJA 12

Peningkatan penggunaan e-Produk hukum	Target : 100%	Realisasi : 100%	Capaian : 100%
---------------------------------------	---------------	------------------	----------------

Produk hukum adalah setiap putusan, ketetapan, peraturan, dan keputusan yang dihasilkan oleh Instansi Pemerintah sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya. Produk hukum sendiri adalah produk hukum yang ditandatangani hanya oleh satu orang pejabat, sedangkan produk hukum bersama adalah produk hukum yang ditandatangani oleh dua orang pejabat atau lebih. Inspektorat Provinsi DKI Jakarta sebagai salah satu Instansi Pemerintah juga melakukan inisiasi/sebagai pemrakarsa produk hukum yang akan dilakukan harmonisasi bersama dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk selanjutnya ditetapkan baik melalui Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur atau pun Instruksi Gubernur. Hal yang telah menjadi rutin dalam penyusunan produk hukum di Inspektorat yaitu Keputusan Gubernur DKI Jakarta tentang Kebijakan Pengawasan Intern, Semesta Pengawasan, dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Tahun 2022.

Adapun indikator pengukuran kinerja pada sasaran ini yaitu jumlah draft Pergub yang diajukan dalam e-produk hukum untuk tahap harmonisasi per Jumlah draft pergub yang diajukan dalam e-produk hukum untuk tahap hamonisasi Biro Hukum Perangkat Daerah/Biro Pemeraksa.

Tabel 3.18 Sasaran Khusus terkait Produk Hukum Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun 2022	Capaian
12	Peningkatan penggunaan e-Produk hukum	Jumlah perbal/ produk hukum yang dibuat melalui sistem e-perbal	100%	100%	100%



D. CAPAIAN SASASARAN OPERASIONAL TAHUN 2022

13

INDIKATOR KINERJA 13

Penyelesaian tindak lanjut arahan Gubernur	Target : 100%	Realisasi : 100%	Capaian : 100%
--	---------------	------------------	----------------

Inspektorat Provinsi DKI Jakarta mempunyai tugas membantu Gubernur DKI Jakarta dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, pengelolaan sumber daya daerah, pengelolaan BUMD, pencegahan dan investigasi. Lebih lanjut, salah satu fungsi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta adalah melaksanakan tugas khusus pengawasan yang diperintahkan Gubernur. Dalam rangka melaksanakan fungsi tersebut Inspektur Provinsi DKI Jakarta mendapat arahan dari Gubernur DKI Jakarta dalam lingkup tugas pembinaan dan pengawasan dan selanjutnya akan memerintahkan Inspektur Pembantu Bidang/Wilayah dan/atau Inspektur Pembantu Bidang Investigasi dalam rangka penyelesaian tindak lanjut arahan Gubernur dimaksud. Adapun target dan capaian realisasi terkait sasaran terselesaikannya tindak lanjut arahan Gubernur dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.19 Sasaran Operasional terkait Penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun 2022	Capaian
13	Terselesainya tindak lanjut arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian tindak lanjut arahan Gubernur	100%	100%	100%

14

INDIKATOR KINERJA 14

Penyelesaian pengaduan masyarakat

Target : 100%

Realisasi : 100%

Capaian : 100%

Pengaduan masyarakat adalah bentuk penerapan dari pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat kepada Aparatur Pemerintah Daerah, berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun. Penanganan pengaduan masyarakat adalah proses kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan, penelaahan, penanganan pengaduan masyarakat, pelaporan, tindak lanjut dan pengarsipan. Dasar hukum yang digunakan dalam penanganan pengaduan masyarakat diantaranya yaitu Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat. Selanjutnya Inspektorat Provinsi DKI Jakarta mengatur lebih lanjut mengenai Petunjuk Teknis Penanganan Pengaduan Masyarakat melalui Keputusan Inspektur Provinsi DKI Jakarta Nomor 50 Tahun 2021. Di dalam keputusan tersebut diatur mengenai prinsip, etika, syarat dan ruang lingkup penanganan pengaduan masyarakat; tahapan penanganan pengaduan masyarakat; penelaahan penanganan pengaduan masyarakat; pemeriksaan penanganan pengaduan masyarakat; tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan panduan e-dumas.

Penanganan Pengaduan Masyarakat di Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dilakukan baik oleh masing-masing Inspektorat Pembantu Bidang dan Wilayah maupun yang secara khusus ditangani oleh Inspektorat Pembantu Bidang Investigasi.

Adapun target dan capaian realisasi sasaran yang terkait dengan penanganan pengaduan masyarakat dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.20 Sasaran Operasional terkait Penyelesaian Pengaduan Masyarakat
Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun 2022	Capaian
14	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	100%	100%	100%

Selama tahun 2022, Inspektorat telah menerima dan menangani sebanyak 37 atas pengaduan masyarakat yang bersumber dari Jaki, CRM, Sipadu, e-Dumas, Twitter dan SP4N. Adapun rincian penanganan pengaduan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.21 Tabel Penanganan Pengaduan Masyarakat
Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

NO	BULAN	JUMLAH RESPONDEN	ASAL LAPORAN	KATEGORI MASALAH	STATUS	
1	Januari	9	Jaki dan Email	Pungutan Ujar	2 Responden	Selesai
				Gedung Sekolah	6 Responden	
				Komunikasi Pemerintah	1 Responden	
2	Februari	10	Jaki dan Email	Gedung Sekolah	8 Responden	Selesai
				Pungutan Ujar	1 Responden	
				Pembebasan Lahan	1 Responden	
3	Maret	2	Jaki dan Twitter	Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban	1 Responden	Selesai
				Pungutan Ujar	1 Responden	
4	April	1	Twitter	Pungutan Ujar	1 Responden	Selesai
5	Juli	1	Jaki	DPD	1 Responden	Selesai
6	Agustus	3	Jaki dan SP4N	Hubungan Pekerja-Pengusaha	2 Responden	Selesai
				Pungutan Ujar	1 Responden	
7	September	1	Jaki	Kurikulum dan Kegiatan Sekolah	1 Responden	Selesai
8	Oktober	4	Jaki dan SP4N	Perizinan Bidang Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	2 Responden	Selesai
				Sembilan Bahan Pokok	1 Responden	
				Arus Lalu Lintas	1 Responden	
9	November	1	Aduan Biro Pemerintahan	Keluhan Pelayanan	1 Responden	Selesai
10	Desember	5	Jaki dan Pindopo Balaikota	Tempat Wisata	1 Responden	Selesai
				Keluhan Pelayanan	1 Responden	
				Gangguan Keterberaman dan Ketertiban	1 Responden	
				Pungutan Ujar	1 Responden	
				Pembebasan Lahan	1 Responden	Proses TL
TOTAL		37				SELESAI : 36 DAN PROSES TL 1

15

INDIKATOR KINERJA 15

Progress penyelesaian
TL RHP BPK RI

Target : 100%

Realisasi : 100%

Capaian : 100%

Salah satu tugas fungsi Inspektorat Provinsi DKI Jakarta sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 256 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja yaitu penghimpunan, pengelolaan, evaluasi, pelaporan dan koordinasi tindak lanjut hasil pengawasan oleh APIP dan lembaga pengawasan lainnya.

BPK RI sebagai salah satu lembaga pengawasan lain dan merupakan pemeriksa eksternal melaksanakan kegiatan pemeriksaan di instansi Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui Pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta maupun Pemeriksaan lainnya (Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu/Pemeriksaan



Investigasi). Pemantauan tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan BPK RI dilaksanakan oleh Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat Inspektorat Provinsi DKI Jakarta setidaknya melalui dua cara yaitu dengan pemantauan melalui Sistem Informasi Monitoring Tindak Lanjut BPK RI (SIMANTAB) yang diintegrasikan dengan website inspektorat.jakarta.go.id dan kegiatan konsiyering *three partied* yang dilaksanakan antara BPK RI, Perangkat Daerah dan Inspektorat yang bertujuan untuk menyepakati terhadap usulan tindak lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan pihak BPK RI.

Adapun target dan capaian realisasi sasaran meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) yang juga tidak lepas dari realisasi sebagaimana pada sasaran strategis Opini WTP, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.22 Sasaran Operasional terkait Penyelesaian TL RHP BPK RI Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun 2022	Capaian
15	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100%	100%	100%

Berikut adalah proyeksi posisi akhir jumlah rekomendasi hasil pembahasan *Three Parties* dengan BPK RI:

- Total rekomendasi : 10.930 rekomendasi
- Selesai Ditindaklanjuti : 9.760 rekomendasi (89,30%)
- Belum Selesai Ditindaklanjuti : 1.170 rekomendasi (10,70%)



E. REALISASI ANGGARAN INSPEKTORAT TAHUN 2022

Dalam rangka mendukung capaian kinerja sasaran strategis, sasaran khusus dan sasaran operasional, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta mempunyai anggaran senilai : Rp. 145.672.232.941 dan realisasi senilai Rp. 130.840.143.575 dengan persentase sebesar 89,82%. Adapun efisiensi dan kualitas pelaksanaan anggaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.23 Anggaran dan Realisasi Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

NO	SKPD	BELANJA		
		Anggaran	Realisasi(Rp)	Realisasi(%)
1	INSPEKTORAT	136.499.116.697	121.881.332.605	89,29%
2	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KABUPATEN - KEP. SERIBU	1.566.756.202	1.508.756.453	96,30%
3	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKBAR	1.422.126.340	1.355.589.655	95,32%
4	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKPUS	1.563.874.045	1.561.896.820	99,87%
5	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKSEL	1.587.247.025	1.540.916.064	97,08%

NO	SKPD	BELANJA		
		Anggaran	Realisasi(Rp)	Realisasi(%)
6	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKTIM	1.426.354.364	1.408.137.050	98,72%
7	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKUT	1.606.758.268	1.583.514.928	98,55%
TOTAL		145.672.232.941	130.840.143.575	89,82%

Tabel 3.24 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2022

ANGGARAN DAN REALISASI	2020	2021	2022
Anggaran	79.690.717.154	120.208.375.105	145.672.232.941
Realisasi	72.495.399.905	114.957.639.937	130.840.143.575
Capaian (%)	90,97%	95,63%	89,82%

Tabel 3.25 Capaian Anggaran Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Berdasarkan Program Tahun 2022

NO	PROGRAM	APBD PERUBAHAN (Rp)	REALISASI TAHUN 2022 (Rp)	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	126.948.405.793	115.041.896.172	90,62%
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	9.525.671.960	7.675.167.000	80,57%
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	9.198.155.188	8.123.080.408	88,31%
Jumlah		145.672.232.941	130.840.143.580	89,82 %

Tabel 3.26 Capaian Anggaran dan Realisasi Fisik berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

No.	PD/UKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Target Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10) = (9) / (6) x 100%	(10)	(11)	(12) = (11) / (10) x 100%
1	INSPEKTORAT	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	4.497.702.760	3.205.045.000	71%	100%	100%	100%
2	INSPEKTORAT	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Reviu Laporan Keuangan	1.331.828.000	922.772.000	69%	100%	100%	100%
3	INSPEKTORAT	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APJP	655.941.200	606.600.000	92%	100%	100%	100%
4	INSPEKTORAT	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	5.141.509.188	4.433.600.000	86%	100%	100%	100%
5	INSPEKTORAT	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Pendampingan dan Asistensi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	661.750.336	299.429.000	45%	100%	100%	100%
6	INSPEKTORAT	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	16.250.000	13.630.000	84%	100%	100%	100%

No.	PDI/UKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Target Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)	% Capaian
7	INSPEKTORAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	112.053.878.690	101.966.620.585	91%	100%	100%	100%
8	INSPEKTORAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	27.082.960	25.215.600	93%	100%	100%	100%
9	INSPEKTORAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	6.791.430.115	5.294.824.000	78%	100%	100%	100%
10	INSPEKTORAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.372.786.094	4.298.012.000	98%	100%	100%	100%
11	INSPEKTORAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.528.200	9.421.125	99%	100%	100%	100%
12	INSPEKTORAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	44.761.750	38.206.200	85%	100%	100%	100%
13	INSPEKTORAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan/Material	169.565.050	169.441.800	100%	100%	100%	100%
14	INSPEKTORAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu	108.459.924	106.871.046	99%	100%	100%	100%

No.	PDUKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Target Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)	% Capaian
15	INSPEKTORAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.846.400	6.909.624	39%	100%	100%	100%
16	INSPEKTORAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	352.440.000	278.980.000	79%	100%	100%	100%
17	INSPEKTORAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Blaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	166.272.279	116.454.625	70%	100%	100%	100%
18	INSPEKTORAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80.083.751	69.300.000	87%	100%	100%	100%
19	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKPUS	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PADA TINGKAT KABUPATEN/KOTA	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	567.000.000	567.000.000	100%	100%	100%	100%
20	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKPUS	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI PADA TINGKAT KABUPATEN/KOTA	Pendampingan dan Asistensi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	555.508.808	555.508.808	100%	100%	100%	100%
21	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKPUS	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.776.000	5.776.000	100%	100%	100%	100%

No.	PO/UKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Target Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)	% Capaian
22	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKPUS	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	297.288.408	295.311.163	99%	100%	100%	100%
23	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKPUS	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	528.330	528.330	100%	100%	100%	100%
24	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKPUS	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.248.620	3.248.620	100%	100%	100%	100%
25	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKPUS	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan/Material	13.836.000	13.836.000	100%	100%	100%	100%
26	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKPUS	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Facilitasi Kunjungan Tamu	45.652.200	45.652.200	100%	100%	100%	100%
27	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKPUS	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.240.000	42.238.290	100%	100%	100%	100%
28	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKPUS	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11.761.752	11.761.752	100%	100%	100%	100%

No.	PDIUKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Target Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)	% Capaian
29	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKPUS	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.035.927	21.035.627	100%	100%	100%	100%
30	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKUT	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PADA TINGKAT KABUPATEN/KOTA	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	463.200.000	450.000.000	97%	100%	100%	100%
31	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKUT	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI PADA TINGKAT KABUPATEN/KOTA	Pendampingan dan Asistensi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	895.133.580	894.907.000	100%	100%	100%	100%
32	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKUT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.000.000	5.000.000	100%	100%	100%	100%
33	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKUT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	109.168.901	106.316.000	97%	100%	100%	100%
34	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKUT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	837.540	800.000	96%	100%	100%	100%
35	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKUT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan/Material	9.685.200	9.176.000	95%	100%	100%	100%

No.	PDUKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Target Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)	% Capaian
36	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKUT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu	52.212.776	52.205.500	100%	100%	100%	100%
37	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKUT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.240.000	38.280.000	91%	100%	100%	100%
38	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKUT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14.067.095	12.855.428	91%	100%	100%	100%
39	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKUT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.213.176	13.975.000	92%	100%	100%	100%
40	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKBAR	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PADA TINGKAT KABUPATEN/KOTA	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	315.000.000	315.000.000	100%	100%	100%	100%
41	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKBAR	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI PADA TINGKAT KABUPATEN/KOTA	Pendampingan dan Asistensi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	582.300.208	581.778.000	100%	100%	100%	100%

No.	PDIUKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Target Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)	% Capaian
42	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKBAR	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penelausahan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.259.000	1.168.200	93%	100%	100%	100%
43	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKBAR	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	362.540.338	299.182.260	83%	100%	100%	100,0%
44	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKBAR	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	726.000	715.300	99%	100%	100%	100%
45	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKBAR	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.712.400	1.711.000	100%	100%	100%	100%
46	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKBAR	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan/Material	11.310.930	11.310.930	100%	100%	100%	100%
47	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKBAR	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitas Kunjungan Tamu	46.528.070	46.427.738	100%	100%	100%	100%
48	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKBAR	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.240.000	40.534.500	96%	100%	100%	100%

No.	PDIUKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Target Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)	% Capaian
49	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKBAR	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.205.325	10.065.027	99%	100%	100%	100%
50	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKBAR	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48.304.069	47.696.700	99%	100%	100%	100%
51	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKSEL	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PADA TINGKAT KABUPATEN/KOTA	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	621.000.000	588.600.000	95%	100%	100%	100%
52	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKSEL	PROGRAM PERUMUSAN KEBLIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI PADA TINGKAT KABUPATEN/KOTA	Pendampingan dan Asistensi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	425.968.708	425.800.000	100%	100%	100%	100%
53	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKSEL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.035.000	4.034.300	100%	100%	100%	100%
54	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKSEL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	413.829.026	405.413.039	98%	100%	100%	100%

No.	PD/UKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Target Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)	% Capaian
55	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKSEL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	723.492	707.625	98%	100%	100%	100%
56	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKSEL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.893.080	2.849.500	98%	100%	100%	100%
57	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKSEL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan/Material	8.416.900	8.416.900	100%	100%	100%	100%
58	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKSEL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitas Kunjungan Tamu	41.963.164	41.837.500	100%	100%	100%	100%
59	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKSEL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.240.000	38.541.000	91%	100%	100%	100%
60	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKSEL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.151.728	4.854.900	94%	100%	100%	100%
61	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKSEL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.035.927	19.861.300	94%	100%	100%	100%

No.	PDUKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Target Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)	% Capaian
62	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKTIM	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PADA TINGKAT KABUPATEN/KOTA	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	534.000.000	524.400.000	98%	100%	100%	100%
63	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKTIM	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI PADA TINGKAT KABUPATEN/KOTA	Pendampingan dan Asistensi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	615.944.280	615.900.000	100%	100%	100%	100%
64	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKTIM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.051.800	5.002.900	99%	100%	100%	100%
65	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKTIM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	153.541.999	149.146.310	97%	100%	100%	100%
66	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKTIM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.380.951	1.254.000	91%	100%	100%	100%
67	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKTIM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan/Material	9.062.140	9.062.140	100%	100%	100%	100%
68	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKTIM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu	33.895.600	33.676.400	100%	100%	100%	100%

No.	PDUKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Target Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)	% Capaian
69	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKTIM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.240.000	39.960.000	95%	100%	100%	100%
70	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKTIM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9.855.325	9.133.100	93%	100%	100%	100%
71	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKTIM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.982.259	20.002.200	95%	100%	100%	100%
72	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KABUPATEN - KEP. SERIBU	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PADA TINGKAT KABUPATEN/KOTA	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	540.000.000	495.750.000	92%	100%	100%	100%
73	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KABUPATEN - KEP. SERIBU	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI PADA TINGKAT KABUPATEN/KOTA	Pendampingan dan Asistensi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	303.790.080	302.527.600	100%	100%	100%	100%
74	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KABUPATEN - KEP. SERIBU	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6.518.000	6.000.000	92%	100%	100%	100%

No.	PDUKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Target Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)	% Capaian
75	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KABUPATEN - KEP. SERIBU	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	102.331.851	98.310.480	96%	100%	100%	100%
76	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KABUPATEN - KEP. SERIBU	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	-	-	-
77	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KABUPATEN - KEP. SERIBU	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	-	-	-	-	-
78	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KABUPATEN - KEP. SERIBU	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan/Material	3.459.000	3.459.000	100%	100%	100%	100%
79	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KABUPATEN - KEP. SERIBU	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu	74.254.700	72.879.723	98%	100%	100%	100%
80	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KABUPATEN - KEP. SERIBU	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	456.334.659	456.269.400	100%	100%	100%	100%

No.	PDUKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Target Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)	% Capaian
81	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KABUPATEN - KEP. SERIBU	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.712.320	18.650.000	100%	100%	100%	100%
82	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KABUPATEN - KEP. SERIBU	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	71.929	55.300	77%	100%	100%	100%
83	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KABUPATEN - KEP. SERIBU	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.240.000	36.323.000	86%	100%	100%	100%
84	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KABUPATEN - KEP. SERIBU	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.105.885	1.832.000	87%	100%	100%	100%
85	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KABUPATEN - KEP. SERIBU	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.937.776	16.699.950	99%	100%	100%	100%
JUMLAH					145.672.232.941	130.840.143.575	89,82%	100%	100%	100%



PENINGKATAN KAPABILITAS APIP



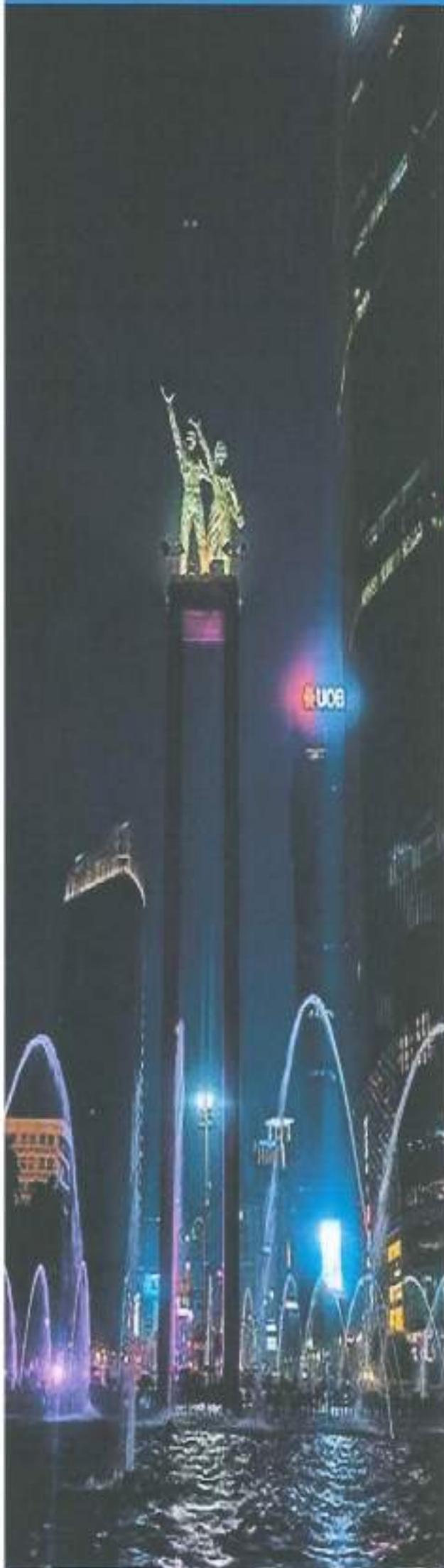
BAB IV PENUTUP

KESIMPULAN

Penjelasan mengenai simpulan masing-masing Indikator kinerja Inspektorat Provinsi DKI Jakarta yang telah dicapai selama Tahun 2022

STRATEGI MENDATANG

Penjelasan mengenai strategi-strategi yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dalam mencapai target-target yang ditetapkan di tahun mendatang.



Inspektorat Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 telah melaksanakan tugas dan pokok sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah telah mencapai target yang telah ditetapkan sebagai dukungan pencapaian target Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun demikian, dalam pelaksanaannya banyak terdapat permasalahan sehingga diperlukan strategi baru untuk mengatasi hal tersebut.

A. KESIMPULAN

Dengan mengacu pada uraian bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa simpulan utama yang terkait dengan akuntabilitas kinerja Inspektorat Provinsi DKI Jakarta tahun 2022, yakni:

1. Inspektorat Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 252 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat;
2. Inspektorat Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan seluruh kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditetapkan, selama periode tersebut Inspektorat telah melaksanakan seluruh kegiatan sebanyak 15 (lima belas) sasaran dan 21 (dua puluh satu) indikator sasaran;
3. Dalam rangka menunjang kegiatan pelaksanaan pengawasan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta serta Inspektorat Pembantu Wilayah Kota dan Kabupaten mempunyai personil/pegawai posisi sampai dengan tanggal Jumlah pegawai di Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 adalah 287 pegawai;



4. Sasaran Inspektorat Provinsi DKI Jakarta pada Perjanjian Kinerja terdiri dari 3 (tiga) sasaran yaitu : Sasaran Strategis, Sasaran Khusus, dan Sasaran Operasional. Sasaran Strategis terdiri dari 6 (enam) indikator sasaran, Sasaran Khusus 6 (enam) indikator sasaran dan Sasaran Operasional 3 (tiga) indikator sasaran, dengan capaian sebagai berikut :
- a. Indikator sasaran "Indeks Reformasi Birokrasi" dengan target dari indikator sasaran ini yaitu **91**, namun sampai dengan laporan ini selesai hasil Evaluasi Eksternal Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi belum diperoleh;
 - b. Indikator sasaran "Opini Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta" dengan target dari indikator sasaran ini yaitu **WTP** dan realisasi **WTP** sehingga capaian yang diperoleh **100%**, dengan ini Inspektorat berhasil mencapai indikator sasaran yang telah diperjanjikan;
 - c. Indikator sasaran "Nilai Predikat AKIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta" Target dari indikator sasaran ini yaitu **AA (91)** namun sampai dengan laporan ini selesai hasil Evaluasi Eksternal Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi belum diperoleh;
 - d. Indikator sasaran "Tingkat Maturitas SPIP" dengan target dari indikator sasaran ini yaitu **Level 3,570** dan realisasi **3,570** sehingga capaian yang diperoleh **100%**, dengan ini Inspektorat berhasil mencapai indikator sasaran yang telah diperjanjikan;
 - e. Indikator sasaran "Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran". Target dari indikator sasaran ini yaitu **91** dan realisasi **91,93** sehingga capaian yang diperoleh **101,02%**. Dengan ini Inspektorat berhasil melebihi target sasaran yang telah diperjanjikan;
 - f. Indikator sasaran "Persentase penyelesaian rencana aksi Meraih Laporan Keuangan Daerah dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) nomor (38)". Target dari indikator sasaran ini yaitu **100%** dengan realisasi **100%**;
 - g. Indikator sasaran "Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan predikat AA nomor (39). Target dari indikator sasaran ini yaitu **100%** dengan realisasi **100%**;
 - h. Indikator sasaran "Persentase penyelesaian rencana aksi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) nomor (41). Target dari indikator sasaran ini yaitu **100%** dengan realisasi **100%**;
 - i. Indikator sasaran "Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Layanan Pengaduan Masyarakat melalui aplikasi *Citizen Relation Management (CRM)* nomor (60)". Target dari indikator sasaran ini yaitu **100%** dengan realisasi **100%**;

- j. Indikator sasaran "Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan nomor (61)". Target dari indikator sasaran ini yaitu 100% dengan realisasi 100%;
- k. Indikator sasaran "Persentase penyelesaian rencana aksi Perbaikan Pengelolaan Tenaga Non ASN nomor (62)". Target dari indikator sasaran ini yaitu 100% namun realisasi belum dapat dinilai dikarenakan pada Perjanjian Kinerja target tersebut di Triwulan IV;
- l. Indikator sasaran "Persentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) nomor (63)". Target dari indikator sasaran ini yaitu 100% dengan realisasi 100%;
- m. Indikator sasaran "Persentase pelaksanaan penugasan pengawasan atas kegiatan yang dibiayai PEN". Target dari indikator sasaran ini yaitu 100% dengan realisasi 100%;
- n. Indikator sasaran "Persentase Pemanfaatan E-Order". Target dari indikator sasaran ini yaitu 100% dengan realisasi 100%;
- o. Indikator sasaran "Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta". Target dari indikator sasaran ini yaitu 100% dengan realisasi 100%;
- p. Indikator sasaran "Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022". Target dari indikator sasaran ini yaitu AA (91), namun untuk realisasi masih proses penilaian oleh Tim Kementerian PAN dan RB
- q. Indikator sasaran "Jumlah Surat atau Nota Dinas masuk ke akun seluruh SKPD yang terproses/terdisposisi" Target dari indikator sasaran ini yaitu 100% dengan realisasi 100%;
- r. Indikator sasaran "Jumlah perbal/produk hukum yang dibuat melalui system e-perbal" Target dari indikator sasaran ini yaitu 100% dengan realisasi 100%;
- s. Indikator sasaran "Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur" dengan target dari indikator sasaran ini yaitu 100% dengan realisasi 100%;
- t. Indikator sasaran "Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat". Target dari indikator sasaran ini yaitu 100% dengan realisasi 100%;
- u. Indikator sasaran "Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)". Target dari indikator sasaran ini yaitu 100% dengan realisasi 100%.



B. STRATEGI MENDATANG

Dalam rangka peningkatan Laporan Kinerja Inspektorat Provinsi DKI Jakarta maka perlu diketahui beberapa rencana aksi perbaikan maupun peningkatan dalam proses pencapaian kinerja sebagai berikut:

1. Tetap membentuk tim-tim khusus yang berkelanjutan dalam rangka mempertahankan opini LKPD yang WTP;
2. Perlu diterbitkannya Instruksi Gubernur tentang penyampaian data/dokumen keperluan opini WTP kepada seluruh perangkat daerah;
3. Perlu adanya komitmen dari seluruh perangkat daerah untuk mempertahankan opini WTP dengan terus menerbitkan Instruksi Gubernur tentang rencana aksi yang harus dilakukan perangkat daerah beserta targetnya dan dilakukan pengembangan sistem yang terintegrasi untuk pengelolaan keuangan dengan pengelolaan barang milik daerah;
4. Perlu adanya komitmen yang kuat pada pimpinan perangkat daerah dengan menerbitkan kebijakan daerah yang menekankan pentingnya manajemen kinerja dan penerapan SAKIP;
5. Meningkatkan pemahaman atas manajemen kinerja dan penerapan SAKIP kepada Tim penyelenggara SAKIP, sehingga dapat bersinergi terutama dalam menindaklanjuti hasil evaluasi yang direkomendasikan oleh Kementerian PAN & RB;
6. Membentuk Tim Penyelenggara SAKIP di tingkat Perangkat Daerah dan diberikan pemahaman yang memadai dalam penerapan SAKIP dan manajemen kinerja;
7. Berdasarkan permasalahan sebagaimana uraian di Bab III, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta akan melakukan upaya sebagai berikut :
 - a. Upaya kepada *Stakeholders*
 - 1) Memfasilitasi peningkatan kapabilitas SDM pada seluruh Perangkat Daerah dalam Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Implementasi Penyelenggaraan SAKIP, Penilaian Mandiri SPIP, Penilaian dan Penanganan Risiko melalui SIPERISAI, dan Penyelenggaraan Pencegahan dan Pengendalian Korupsi.
 - 2) Memfasilitasi peningkatan kapabilitas SDM dalam pengelolaan keuangan serta pengadaan barang/jasa pada Perangkat Daerah dengan melibatkan instansi terkait (LKPP, BPKP, BPSDM dan BPKD)
 - 3) Memfasilitasi dan mendorong seluruh Perangkat Daerah untuk menerapkan manajemen risiko melalui aplikasi yang sudah dibuat oleh Inspektorat yaitu

Sistem Informasi Penilaian Risiko dan Pengendalian (SIPERISAI), terutama untuk menilai risiko terhadap sasaran program atau kegiatan yang strategis atau prioritas guna meminimalisir dampak yang kemungkinan akan terjadi, khususnya kerugian daerah atau tindak pidana korupsi (*fraud risk*).

- 4) Memfasilitasi dan mendorong seluruh Perangkat Daerah untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dan pengendalian korupsi di wilayah kerjanya melalui kegiatan sosialisasi anti korupsi di internal, pembentukan tim whistleblowing system, pemasangan banner anti korupsi pada unit pelayanan publik.
- 5) Memfasilitasi dan mendorong Perangkat Daerah untuk mempercepat proses penyelesaian Tindak Lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan baik oleh BPK RI maupun oleh APIP.
- 6) Melaksanakan kegiatan sosialisasi gratifikasi, *whistleblowing*, Saber Pungli, dan anti korupsi di unit-unit kerja yang rawan terjadinya korupsi.
- 7) Berkoordinasi secara intensif dan terprogram dengan BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta untuk optimalisasi penerapan SPIP di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- 8) Berkoordinasi secara intensif terkait program-program pencegahan dan pengendalian korupsi di Pemerintah Daerah dengan KPK RI dalam rangka meningkatkan kesadaran dan terciptanya budaya anti korupsi.

b. Upaya *Internal*

- 1) Membentuk Tim Pengawasan Klinik Konsultasi, Tim Reformasi Birokrasi, Struktur Manajemen Risiko, Tim Penilaian Mandiri PK APIP dan Tim Penilaian Mandiri SPIP Tahun 2023 guna mendukung peningkatan indeks reformasi birokrasi, nilai maturitas SPIP, Level Kapabilitas APIP, Manajemen Risiko Indeks dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi serta Survey Penilaian Integritas oleh KPK.
- 2) Peningkatan kapabilitas APIP melalui kediklatan teknis maupun kediklatan profesi; perencanaan kegiatan pengawasan berbasis risiko; optimalisasi penggunaan aplikasi AMS dalam pelaksanaan audit; pelaksanaan telaah sejawat internal terhadap hasil pengawasan; dan lain-lain.
- 3) Pelaksanaan kegiatan "Inspektorat Berwawasan" secara berkelanjutan sebagai salah satu wadah bagi Auditor dan P2UPD dalam meningkatkan kapabilitasnya sebagai APIP.
- 4) Meningkatkan kualitas hasil pengawasan melalui pelaksanaan kegiatan audit, reuiu, monitoring dan evaluasi secara tepat sasaran, tepat guna dan tepat waktu.

- 5) Meningkatkan peran pembinaan kepada Perangkat Daerah dalam rangka memberikan alternatif-alternatif solusi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**RAPAT HARI ANTI KORUPSI
SEDUNIA (HAKORDIA)**
JAKARTA, 08 NOVEMBER 2022



LAMPIRAN



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SYAEFULOH HIDAYAT
Jabatan : Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D
Jabatan : Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2022

PIHAK KEDUA,

Gubernur Daerah Khusus Ibukota
Jakarta,

ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D

PIHAK PERTAMA,

Inspektur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

SYAEFULOH HIDAYAT
NIP 197612221998111001

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

Nama : Syaefuloh Hidayat
 NIP : 197612221998111001
 Jabatan : Inspektur
 Unit Kerja : Inspektorat

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
Sasaran Strategis											
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	1	Indeks Reformasi Birokrasi	e-SAKIP	<p>Dasar Hukum: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi</p> <p>Definisi: Indeks Reformasi Birokrasi adalah nilai akhir dari serangkaian kegiatan evaluasi atau penilaian 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi, yaitu: a. Manajemen Perubahan b. Penguatan pengawasan c. Penguatan akuntabilitas d. Penataan Organisasi e. Penataan tatalaksana f. Penataan manajemen SDM g. Deregulasi Kebijakan h. Peningkatan kualitas pelayanan publik.</p> <p>Metode Pengukuran: Indeks Reformasi Birokrasi = Aspek Pengungkit (60%) + Aspek Hasil (40 %) Aspek Pengungkit (60%) = Aspek Pemenuhan (20%) + Aspek Hasil Antara (10%) + Aspek Reform (30%) Aspek Hasil (40%) = Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan (10%) + Kualitas Pelayanan Publik (10%) + Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN (10%) + Kinerja Organisasi (10%)</p> <p>Sumber Data: Adapun penilaian Indeks Reformasi Birokrasi dilakukan oleh Kementerian PAN-RB.</p>	N/A	N/A	N/A	91	91	Indeks
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang taktis dan adaptif berbasis data, serta model organisasi pemerintahan yang dinamis	1	Opini Laporan Keuangan Daerah	e-SAKIP	<p>Dasar Hukum: Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004</p> <p>Definisi: Pernyataan profesional badan pemeriksa keuangan RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah Pemprov DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan.</p> <p>Metode Pengukuran: - Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) - Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) - Opini Tidak Wajar - Tidak Memberikan Pendapat (TMP)</p> <p>Sumber Data: BPK RI</p>	N/A	(3) WTP	N/A	N/A	(3) WTP	Predikat

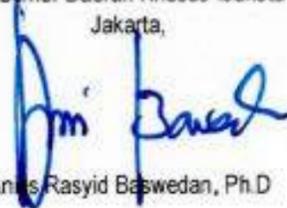
		2	Nilai/Predikat AKIP	e-SAKIP	<p>Dasar Hukum: 1. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. 2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah</p> <p>Definisi: Besaran hasil penilaian tingkat akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.</p> <p>Metode Pengukuran: Berdasarkan komponen yang dinilai yaitu perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (25%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi internal (10%), dan capaian kinerja (20%)</p> <p>Kategori Penilaian: (1) Nilai >90-100, predikat AA interpretasi Sangat Memuaskan (2) Nilai >80-90, predikat A interpretasi Memuaskan (3) Nilai >70-80, predikat BB interpretasi Sangat Baik (4) Nilai >60-70, predikat B interpretasi Baik (5) Nilai >50-60, predikat CC interpretasi Cukup (Memadai)</p> <p>Sumber Data: Hasil Evaluasi AKIP oleh Kementerian PAN-RB</p>	N/A	N/A	N/A	AA (91)	AA (91)	Nilai
3	Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Intern Instansi Pemerintah	1	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	e-SAKIP SIPERISAI	<p>Dasar Hukum: Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga /Pemerintah Daerah</p> <p>Definisi: Penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, serta mencakup unsur - unsur :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 2. Manajemen Risiko Indeks 3. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi 4. Kapabilitas APIP <p>Metode Pengukuran: Penetapan skor maturitas penyelenggaraan SPIP menggunakan skor hasil evaluasi dengan membuat rerata tertimbang. Skor ini yang kemudian akan digunakan untuk menentukan tingkat maturitas SPIP. Interval skor tingkat maturitas SPIP adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rintisan dengan interval $1,00 \leq \text{Skor} < 2,00$ 2. Berkembang dengan interval $2,00 \leq \text{Skor} < 3,00$ 3. Terdefinisi dengan interval $3,00 \leq \text{Skor} < 4,00$ 4. Terkelola dan Terukur dengan interval $4,00 \leq \text{Skor} < 4,50$ 5. Optimum dengan interval Skor $\geq 4,50$ <p>Sumber Data: BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta</p>	N/A	N/A	N/A	3,57	3,57	Nilai

4	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Anggaran	1	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	e-SAKIP	<p>Definisi: Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dilakukan dengan mengukur 3 Komponen pada subkegiatan di bawah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yaitu:</p> <p>a. Penyerapan Anggaran. Komponen ini mengukur kesesuaian realisasi anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan di lingkungan Perangkat Daerah. Nilai penyerapan anggaran maksimal adalah 40%. Penyerapan anggaran bernilai 40% apabila serapan anggaran $\geq 80\%$. Apabila serapan anggaran di bawah $< 80\%$ maka perhitungan nilai penyerapan anggaran = (Persentase Serapan Anggaran x 40%). Anggaran yang diperhitungkan meliputi APBD dan BLU, dan tidak termasuk dana transfer dari pemerintah pusat.</p> <p>b. Efisiensi adalah sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dari subkegiatan yang target sarannya telah dicapai. Apabila pencapaian output tidak tercapai 100% maka unsur efisiensi tidak diukur. Sisa dana adalah selisih lebih pagu anggaran dengan realisasi anggaran dimana selisih lebih pagu dimaksud sudah tidak dialihkan kembali untuk subkegiatan/belanja lainnya.</p> <p>c. Pencapaian output adalah persentase capaian indikator kinerja subkegiatan (output). Realisasi pencapaian output dapat dilihat dalam aplikasi e-monev Anggaran hasil inputan PD/UKPD</p> <p>Metode Pengukuran: 1. Serapan Anggaran $\geq 80\%$ dan output 100% Realisasi = (40%) + ((%efisiensi X 10%)/20%) + (50%) 2. Serapan Anggaran $< 80\%$ dan output $\leq 100\%$ Realisasi = (Penyerapan Anggaran X 40%) + (pencapaian output X 50%) 3. Serapan Anggaran $\geq 80\%$, namun output $\leq 100\%$ Realisasi = (40%) + (pencapaian output x 50%)</p>	N/A	N/A	N/A	91%	91%	Persen
5	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Meraih Laporan Keuangan Daerah dengan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Nomor (38)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Meraih Laporan Keuangan Daerah dengan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Nomor (38)	N/A	100%	N/A	N/A	100%	Persentase
		2	Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA Nomor (39)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA Nomor (39)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
		3	Persentase penyelesaian rencana aksi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Nomor (41)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Nomor (41)	N/A	100%	100%	100%	100%	Persentase
		4	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan Nomor (61)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan Nomor (61)	N/A	100%	N/A	100%	100%	Persentase
		5	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Layanan Pengaduan Masyarakat Melalui Aplikasi Citizen Relation Management (CRM) Nomor (60)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Layanan Pengaduan Masyarakat Melalui Aplikasi Citizen Relation Management (CRM) Nomor (60)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase

		6	Persentase penyelesaian rencana aksi Perbaikan Pengelolaan Tenaga non ASN Nomor (62)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Perbaikan Pengelolaan Tenaga non ASN Nomor (62)	100%	100%	N/A	N/A	100%	Persentase
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Nomor (63)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Nomor (63)	N/A	N/A	N/A	100%	100%	Persentase
Sasaran Khusus											
7	Suksesnya Penyerapan Anggaran Pinjaman PEN 2021 dan Ketercapaian Output Sesuai KAK	1	Persentase pelaksanaan penugasan pengawasan atas kegiatan yang dibiayai PEN	e-Kinerja	Realisasi penugasan pengawasan dibanding dengan rencana penugasan pengawasan kegiatan yang dibiayai PEN	N/A	N/A	N/A	100%	100%	Persen
8	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	1	Persentase Pemanfaatan E-Order	e-Kinerja	Formula Pengukuran : Jumlah Realisasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) rekening makan minum rapat, jamuan dan lapangan dibandingkan dengan transaksi di e-order Sumber Data : Data Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) BPKD Kode Rekening Makan Minum (Dikecualikan untuk Galon, Kopi, Teh, Gula, dst.)	100%	100%	100%	100%	100%	Persen
9	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	1	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	e-Kinerja	a) Persentase tersusunnya strategi komunikasi program unggulan atau program umum Perangkat Daerah. b) Persentase tersusunnya editorial plan sesuai strategi komunikasi. Dinas Kominfotik menyusun <i>editorial plan</i> lingkup Provinsi. c) Persentase tersusunnya materi mitigasi krisis dan bahan komunikasi pada saat krisis dalam kurun waktu <6 jam. d) Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal OPD atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang. Penghitungan: a) Bobot 20%: PD menyusun materi strategi komunikasi program unggulan (KSD) atau program umum per triwulan. b) Bobot 20%: PD menyusun materi <i>editorial plan</i> sesuai strategi komunikasi per triwulan. c) Bobot 30%: PD menyusun materi mitigasi krisis per triwulan, dan bahan komunikasi pada saat krisis (<i>draft press release</i> dan data pendukung) dalam kurun waktu <6 jam. d) Bobot 30%: PD mempublikasikan materi komunikasi (realisasi editorial plan, min. 15 materi per triwulan) melalui media internal atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang per triwulan.	100%	100%	100%	100%	100%	Persen
10	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	1	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022	e-Kinerja	Nilai/Predikat diperoleh dan hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat (nilai: 91)	N/A	N/A	N/A	AA (91)	AA (91)	Predikat
11	Peningkatan penggunaan e-Office dalam kegiatan administrasi persuratan	1	Jumlah Surat atau Nota Dinas masuk ke akun Seluruh SKPD yang terproses / terdisposisi	e-Kinerja	Jumlah surat masuk sama dengan Jumlah surat terdisposisi / terproses pada hari yang sama. Pengecekan dan pelaporan dapat dimonitoring dengan menggunakan fitur "Laporan Surat Masuk / Surat Keluar atau Disposisi Masuk dan Disposisi keluar yang ada pada e office". Diperlukan penentuan penanggung jawab akun E office di setiap SKPD. Jumlah surat belum terdisposisi / terproses yang terdapat pada fitur "Surat Masuk" di akun E-Office SKPD akan mempengaruhi TKD dari SKPD tersebut.	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
12	Peningkatan penggunaan e-Produk hukum	1	Jumlah perbal/produk hukum yang dibuat melalui sistem e-perbal	e-Kinerja	Penyambungan antara sistem e-perbal ke aplikasi e-office. Pemberlakuan TTE dan e-produk hukum menjadi salah satu bagian/fitur dari e-office. Jumlah perbal yang terproses di e-perbal sama dengan jumlah perbal yang terdapat pada Google sheet Rekap Perbal yang terdapat di Biro KSD.	75%	90%	100%	100%	100%	Persentase

Sasaran Operasional											
13	Terselesainya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	1	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persen
14	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	1	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persen
15	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	1	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	(90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	25%	25%	25%	25%	100%	Persen

Gubernur Daerah Khusus Ibukota
Jakarta,



Anis Rasyid Baswedan, Ph.D

Jakarta, Februari 2022
Inspektur Provinsi DKI Jakarta



Syaefuloh Hidayat
NIP. 197612221998111001

PENGHARGAAN SAKIP TAHUN 2021 YANG DIPEROLEH OLEH INSPEKTORAT DENGAN PREDIKAT "A"



PENGHARGAAN KEPADA PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA DARI KEMENTERIAN MENPAN RB ATAS PRESTASINYA DALAM AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021 NILAI PREDIKAT NILAI "A"

